

# WAMENLU LIBYA HUBUNGAN DIPLOMATIK DENGAN INDONESIA DITINGKATKAN

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI



# MAJELIS

MPR RUMAH KEBANGSAAN

EDISI NO.05/TH.XVIII/V/2024



Usai Putusan PPHU di MK

## KPU TETAPKAN PRABOWO - GIBRAN

### Sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pilpres 2024



ISSN 0854-6371  
9 770854 637158

**20** Nasional  
Secerch Cahaya di Tengah  
Kegelapan Hukum dan Demokrasi

**32** Kajian MPR  
Membahas Tentang  
Rancangan Peraturan MPR

**39** Selingan  
Disemai dan Dibesarkan  
oleh Pendiri Bangsa

**58** Sosialisasi  
Sosialisasi Empat Pilar  
MPR RI Melalui Youtube



**MPR**  
RUMAH KEBANGSAAN  
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA  
DAN KEDAULATAN RAKYAT



**Buku Digital MPR RI**



**MUDAH DI AKSES  
EFEKTIF & EFISIEN**

**MAJALAH MAJELIS, JURNAL,  
PROSIDING DAN HASIL KAJIAN  
MPR RI DALAM GADGET ANDA**

**“ Segera  
Unduh  
Aplikasinya !**

**DI PLAY STORE**  
<http://bit.ly/bukudigitalmprri>

[MPR.GO.ID](http://MPR.GO.ID)



**@MPRG0ID**



BEDIA INFORMASI DAN KOLABORASI KONSTITUSI

**MAJELIS**



**EMPAT PILAR MPR**  
PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA



**Buku Digital MPR RI**  
SETJEN MPR RI

# Daftar Isi

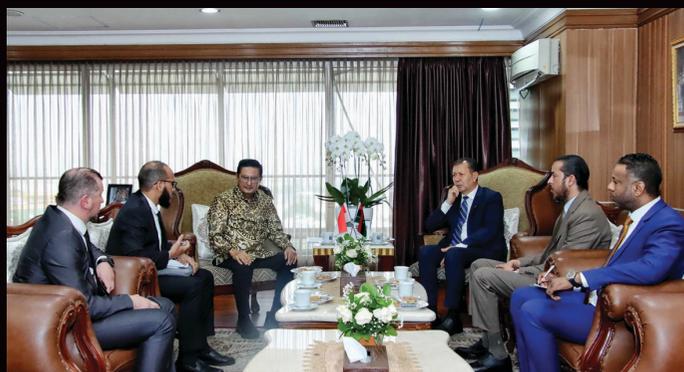
EDISI NO.05/TH.XVIII/V/ 2024



## 08 BERITA UTAMA

### Usai Putusan PPHU KPU Tetapkan Prabowo - Gibran

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan dari pemohon pasangan Capres dan Cawapres Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo - Mahfud Md dalam perkara PPHU Pilpres 2024. Usai putusan MK, KPU secara resmi menetapkan pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Pilpres 2024.



## 18 Nasional

### Wamenlu Libya: Buka Kembali Program Beasiswa dan Peningkatan Perdagangan



## 64 Varia MPR

### MPR RI Periode 2019-2024 Tengah Siapkan Berbagai Legacy



## 39 SELINGAN Dibersihkan oleh Pendiri Bangsa



## 74 Profil H. Yanuar Prihatin, M.Si.

Pengantar Redaksi .....	04
Perspektif .....	06
Kolom .....	36
Aspirasi Masyarakat .....	47
Gema Pancasila .....	48
Diskusi Majelis .....	50
Wawancara .....	68
Figur .....	70
Ragam .....	72
Dari Rumah Kebangsaan .....	78
Rehal .....	81



## COVER

Edisi No.05/TH.XVIII/V/ 2024

Kreatif: Jonni Yasrul - Foto: Istimewa

## Prabowo – Gibran Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pilpres 2024

**R**ANGKAIAN dan tahapan pemilihan presiden (Pilpres) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 telah usai. Ini ditandai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024. Dalam sidang putusan di Gedung MK pada Senin, 22 April 2024, Majelis Hakim MK telah memutuskan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya dalam perkara PHPU Pilpres 2024 yang diajukan pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud Md.

Sebagai catatan, baru pertama kali dalam sejarah PHPU Pilpres di MK, putusan dalam perkara PHPU diwarnai pendapat berbeda (*dis-senting opinion*). Tiga hakim konstitusi, yaitu Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat, menyatakan pendapat yang berbeda dalam putusan PHPU Pilpres 2024. Betapa pun, dengan putusan MK, Pilpres sudah selesai karena tidak ada lagi upaya hukum untuk membatalkan hasil Pilpres. Putusan MK dalam perkara PHPU Pilpres 2024 bersifat final and binding (final dan mengikat). Artinya, putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.

Berdasarkan putusan MK dalam perkara PHPU Pilpres 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Rapat Pleno Terbuka dengan agenda Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu 2024 pada Rabu, 24 April 2024. Rapat pleno ini sesuai dengan Pasal 4 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2024 yang menyebutkan, penetapan pasangan Capres dan Wapres terpilih paling lambat tiga hari setelah pembacaan putusan MK mengenai perkara PHPU. Rapat pleno ini dihadiri pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 01 dan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02, para petinggi partai politik, Ketua MPR, perwakilan pemerintah, TNI, Polri, Bawaslu, dan

pejabat tinggi lainnya.

Penetapan pasangan Capres dan Wapres terpilih dalam Pemilu 2024 itu tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 504 Tahun 2024. Isinya, menetapkan pasangan Capres dan Wapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan Capres dan Wapres terpilih periode 2024 – 2029 dalam Pemilu 2024. Pasangan Prabowo – Gibran berhasil meraih 96.214.691 suara atau 58,59% dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 24 April 2024.

Setelah penetapan presiden dan wakil presiden terpilih, KPU akan melanjutkan ke tahapan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pilpres 2024. Selanjutnya, dijadwalkan pada 20 Oktober 2024, MPR akan menggelar Sidang Paripurna MPR dengan agenda pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden. Tahapan pelantikan atau pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden menjadi tahapan terakhir dalam serangkaian penyelenggaraan Pilpres 2024.

Dengan Keputusan KPU yang menetapkan Prabowo – Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Pilpres 2024, kontestasi Pilpres selesai sudah. Berakhir pula proses dan tahapan Pilpres 2024 yang cukup panjang dan lama yang menyita tenaga, pikiran, dan diwarnai persaingan hingga perdebatan keras di antara tiga pasangan Capres dan Cawapres. Pihak yang kalah memang harus legowo, dan pihak yang menang jangan jumawa.

Kita berharap, masyarakat Indonesia mengakhiri segala perdebatan seputar Pilpres 2024 sebagaimana harapan yang disampaikan Pimpinan MPR RI. “Waktu bertanding sudah selesai, kini saatnya untuk bersanding,” begitu isi pesan Ketua MPR Bambang Soesatyo. “Perjalanan jauh ke batu balai, jangan lupa mampir mandi. Pilpres 2024 telah usai, mari kita bersatu kembali,” ucap Wakil Ketua MPR Yandri Susanto. □



### PENASEHAT

Pimpinan MPR-RI

### PEMIMPIN REDAKSI

Siti Fauziah

### REDAKTUR PELAKSANA

### KOORDINATOR REPORTASE

Djarot Widiarto

### FOTOGRAFER

Tim Medvis

### STAF DISTRIBUSI

Amelia Rubinta, Ikhwani Bimo F

### TIM AHLI

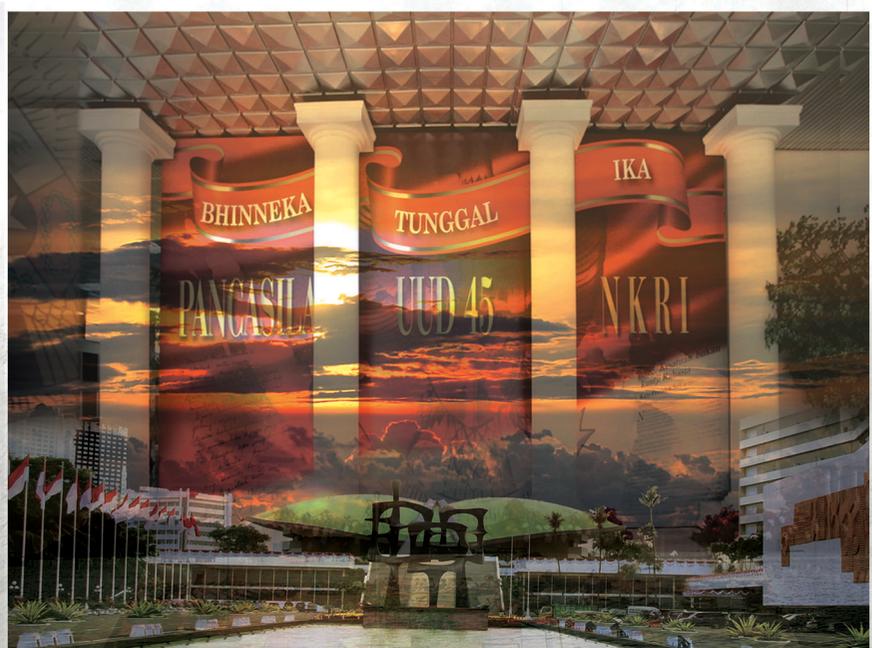
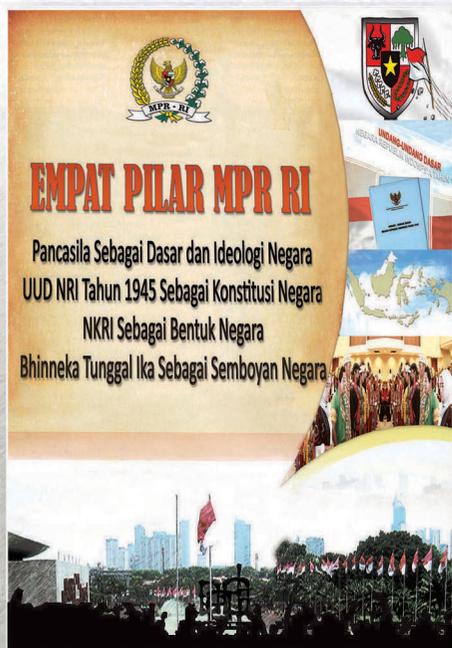
Syahril Chili, Jonni Yasrul,  
Ardi Winangun, Budi Suchahyo,  
Derry Irawan, M. Budiono

### ALAMAT REDAKSI

Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi,  
Sekretariat Jenderal MPR-RI  
Gedung Nusantara III, Lt. 5  
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6,  
Senayan, Jakarta 10270.  
Telp. (021) 57895237, 57895238,  
57895251 Fax.: (021) 57895237  
Email: pemberitaan@setjen.mpr.go.id



# SELAMAT HARI BURUH INTERNASIONAL, 1 MEI 2024



## Menghayati Berkah Idul Fitri bagi Harmonisasi Kehidupan Bersama

**A**KHIRNYA, akan selalu ada momentum bagi semua orang memulihkan kelembutan hati yang sejatinya ada pada setiap pribadi. Bagi masyarakat Indonesia yang agamis, salah satu momentum itu adalah Puasa Ramadan yang kemudian memuncak pada perayaan hari kemenangan, Idul Fitri. Hati yang lembut sebagai berkah Idul Fitri 1445 H itu hendaknya mampu memulihkan silaturahmi di antara sesama anak bangsa, dengan kemauan dan kesediaan mengakhiri sekat-sekat akibat beda pilihan politik yang mengemuka di sepanjang periode persiapan dan pelaksanaan Pemilu 2024.

Hari-hari, ketika masyarakat menempuh perjalanan mudik ke kampung halaman untuk merayakan Idul Fitri 2024 yang jatuh pada tanggal 10 dan 11 April tahun ini, mereka secara tidak langsung sudah mengatakan bahwa pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan anggota legislatif (Pileg) sudah selesai. Dengan suasana hati yang lembut, komunitas pemudik ingin segera sampai di kampung halaman, berjumpa sanak keluarga, dan dengan ceria menyongsong Idul Fitri. Tumbuh semangat yang nyata untuk mengakhiri sekat-sekat akibat beda sikap dan pilihan politik saat Pilpres dan Pileg, Februari lalu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada Rabu (20/3), telah menetapkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres. Dua pasangan lain yang keberatan terhadap putusan KPU itu sudah menggugat, dan gugatan itu sedang dan

sudah berproses di Mahkamah Konstitusi (MK). KPU juga telah menetapkan Hasil Pileg 2024. Siapa saja yang keberatan akan hasil Pileg pun dapat mengajukan gugatan ke MK.

Sesuai perkiraan sebelumnya, tidak semua komunitas puas atau mau menerima hasil Pemilu 2024 apa adanya. Kecenderungan seperti itu wajar saja. Sebagaimana terlihat di ruang publik dan juga menyimak berbagai pernyataan sejumlah kelompok masyarakat, ada kekecewaan pun kemarahan. Patut disyukuri, karena penyikapan atau keberatan atas hasil Pemilu 2024 itu diaktualisasikan sesuai koridor hukum yang berlaku, sehingga ketertiban umum tidak terganggu.

Memang, stabilitas nasional dan ketertiban umum haruslah diutamakan agar semua komunitas dapat menjalankan ragam aktivitas produktif sebagaimana biasanya. Pilpres dan Pileg secara langsung bukan agenda atau sesuatu yang baru bagi masyarakat Indonesia, termasuk dalam menyikap hasil Pemilu itu sendiri. Sejak awal dekade 2000-an, masyarakat sudah berulang kali melihat dinamika penyikapan terhadap hasil Pemilu. Dan, fakta membuktikan bahwa pada akhirnya segala sesuatunya akan berjalan baik-baik saja.

Khusus Pemilu 2024 ini akhir dari rangkaian prosesnya berdekatan dengan bulan suci Ramadan, bulan penuh rahmat. Penghayatan sepenuh hati semua komunitas terhadap hakekat makna bulan suci Ramadan mendorong setiap orang untuk fokus pada olah rohani.

**Dr. H. Bambang Soesatyo, SE., SH., MBA.**  
Ketua MPR RI



Kehendak dan niat tulus setiap pribadi untuk introspeksi di sepanjang bulan Suci Ramadan akan memunculkan kesadaran untuk menerima dan menyerap yang baik dan benar, serta mengakhiri segala sesuatu yang salah. Kesadaran yang demikian mendorong setiap orang dengan lapang dada memaafkan atau mengampuni sesama, dan sebaliknya memohon maaf kepada pihak lain untuk salah yang disengaja maupun tidak disengaja.

Hati lembut yang melahirkan niat tulus untuk saling memaafkan dan mengampuni akan menjadi kekuatan besar yang mampu mengakhiri disharmoni antar-komunitas, dan juga mengakhiri sekat-sekat karena beda pilihan politik. Dari titik itulah kehidupan bersama memulai lembaran baru dan harapan akan masa depan yang lebih baik.

Fakta tentang begitu banyak komunitas terlibat dalam rivalitas sengit selama persiapan hingga hari pelaksanaan Pemilu 2024 tak perlu ditutup-tutupi. Adalah fakta juga bahwa rivalitas itu masih menyisakan persoalan hingga saat ini. Namun, sisa-sisa persoalan Pemilu itu hendaknya tidak membuat masyarakat ragu atau cemas.

Sebab, fakta historis sudah memberi bukti dan

pelajaran bahwa rivalitas itu pada akhirnya bisa diselesaikan dengan baik dan benar. Hal itu bisa terwujud karena semua komunitas anak bangsa akan kembali pada pijakan tradisi luhur kebangsaan Indonesia, yakni bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan kebangsaan.

Berkah Idul Fitri 1445 H pasti menyulut sentimen positif pada nurani semua komunitas untuk segera memulihkan silaturahmi di antara sesama anak bangsa. Dan, penyerapan sentimen positif itu sudah diperlihatkan dengan sangat jelas oleh komunitas pemudik yang sedang melakukan perjalanan untuk berlebaran. Tepat di hari yang Fitri lalu, para pemudik menyegarkan kembali ikatan silaturahmi dengan kerabat dan tetangga di kampung halaman masing-masing.

Masyarakat selalu menjadikan berkah Idul Fitri sebagai momentum dan pijakan untuk memulihkan harmonisasi kehidupan bersama. Maka, dengan bijaksana dan penuh keberanian, marilah memulai lembaran baru dengan penuh pengharapan. □

*Selamat Idul Fitri 1445 H, Mohon Maaf Lahir dan Batin.*

## Usai Putusan PPHU di MK

# KPU Tetapkan **Prabowo-Gibran** Sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pilpres 2024



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan dari pemohon pasangan Capres dan Cawapres Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo - Mahfud Md dalam perkara PPHU Pilpres 2024. Usai putusan MK, KPU secara resmi menetapkan pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Pilpres 2024.

**P**ASANGAN calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) pemenang Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, berangkat bersama menuju Gedung KPU. Keduanya berangkat dari kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sekitar pukul 09.35 WIB. Prabowo – Gibran mengenakan kemeja putih. Keduanya menaiki mobil Toyota Alphard dengan plat nomor B 108 PSD.

Keluar dari rumah, Prabowo sempat membuka kaca mobilnya dan melambaikan tangan saat disapa awak media yang sudah menunggu di depan rumahnya. Beberapa stasiun televisi menayangkan siaran langsung mengikuti perjalanan pasangan Capres – Cawapres itu menyusuri jalan menuju Gedung KPU di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Rute yang dilewati adalah jalan Jenderal Sudirman hingga bunderan Hotel Indonesia, kemudian memutar bunderan untuk kemudian berbelok menuju Jalan Imam Bonjol, Menteng. Iring-iringan mobil menembus kepadatan jalan Jenderal Soedirman pagi itu.

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka datang ke Gedung KPU untuk menghadiri Rapat Pleno Penetapan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pilpres 2024 yang dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WIB di Gedung KPU, Rabu, 24 April 2024. Sekitar

4.266 personel dikerahkan untuk mengamankan agenda penetapan presiden dan wakil presiden terpilih di kantor KPU. Selama rapat pleno digelar, jalan di depan kantor KPU ditutup dan steril. Tidak ada aksi unjuk rasa dan demonstrasi saat itu.

Menjelang pukul 10.00 WIB, iring-iringan kendaraan yang membawa Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tiba di halaman kantor KPU. Kedatangan keduanya disambut komisioner KPU, para pimpinan partai politik Koalisi Indonesia Maju dan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo – Gibran. Turun dari mobil, Prabowo – Gibran menghampiri awak media dan memberi keterangan bahwa kehadirannya di KPU untuk menerima penetapan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada Pilpres 2024. Setelah memberi keterangan, Prabowo – Gibran memasuki gedung KPU dan menuju ruang tunggu menanti dimulainya Rapat Pleno KPU.

Tak lama berselang, sekitar pukul 10.05 WIB, iring-iringan kendaraan Capres dan Cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar memasuki halaman KPU. Keduanya turun dari mobil, Anies mengenakan kemeja putih dan jas berwarna hitam, sedangkan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga mengenakan kemeja putih dan jas berwarna hijau gelap. Keduanya disambut Komisioner KPU dan petinggi partai pengusung Capres – Cawapres



nomor urut 01. Anies Baswedan dan Cak Imin juga menghampiri awak media dan memberi keterangan sebelum memasuki gedung KPU.

Semula dijadwalkan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pilpres Tahun 2024 dimulai pukul 10.00 WIB, namun pelaksanaan molor hingga sekitar pukul 10.45. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari secara resmi membuka Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden – Wakil Presiden Terpilih Pemilu 2024. “Dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, Rapat Pleno KPU Terbuka dengan agenda penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pemilu 2024 pada hari ini, Rabu 24 April 2024 dinyatakan terbuka,” ujar Hasyim. Dalam Rapat Pleno ini Hasyim Asy'ari didampingi komisioner KPU lainnya, yaitu Idham Holik, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Yulianto Sudrajat, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, dan Sekretaris Jenderal KPU Bernard Dermawan Sutrisno.

Rapat Pleno KPU ini dihadiri pasangan Capres dan Cawapres terpilih Prabowo

Subianto – Gibran Rakabuming Raka, dan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar. Sedangkan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 03 Ganjar Pranowo – Mahfud Md berikut petinggi partai pendukungnya tidak menghadiri Rapat Pleno Penetapan Pasangan Capres dan Cawapres Terpilih Pemilu 2024 ini.

Adapun sejumlah pejabat dan petinggi partai politik yang hadir, di antaranya Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo – Gibran Rosan Roeslani, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua MPR sekaligus Waketum Golkar Bambang Soesatyo, Menteri ATR/BPN sekaligus Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bahilil Lahadalia, Mendagri Tito Karnavian, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, Ketua PSI Kaesang Pangarep. Turut hadir Ketua dan anggota DKPP, anggota Bawaslu RI, perwakilan TNI, Polri, BIN, Kejaksaan Agung.

### Kontestasi Telah Selesai

Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 ini diawali dengan pembacaan Berita Acara yang diikuti dengan penandatanganan Berita Acara tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilu 2024. Selanjutnya pembacaan Keputusan KPU Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilu 2024.

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, penetapan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan Capres dan Cawapres terpilih pada Pemilu Presiden sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 504 Tahun 2024. “Keputusan KPU Nomor 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilu Tahun 2024,” ujarnya.

Hasyim melanjutkan, “Memutuskan, kesatu, menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 H. Prabowo Subianto

dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2024 – 2029 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.”

Ketua KPU menambahkan bahwa Prabowo – Gibran berhasil meraih 96.214.691 suara atau 58,59% dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Adapun keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan pada hari Rabu, 24 April 2024. “Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 April 2024 Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy’ari ditandatangani. Bismillahirrahmannirrahiim,” ucapnya.

Selanjutnya berlangsung penyerahan Berita Acara kepada MPR, DPR, Perwakilan Presiden, Mendagri, partai politik peserta Pemilu, dan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Kemudian waktu diberikan kepada pasangan Capres dan Wapres terpilih untuk berpidato. Pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka maju ke podium untuk menyampaikan pidato.

Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan, proses Pilpres yang panjang memang banyak menyita tenaga, pikiran, serta diwarnai dengan persaingan hingga perdebatan yang keras. Meskipun demikian, menurut Prabowo, hal itulah yang dinamakan demokrasi sesuai harapan rakyat Indonesia. “Kita telah menjalankan proses ini dengan cukup panjang, cukup lama, cukup menyita tenaga pikiran, kontestasi di antara tiga pasangan calon telah kita lakukan, persaingan, perdebatan yang keras, yang penuh semangat,” ujarnya.

“Inilah tuntutan demokrasi. Inilah yang diharapkan oleh rakyat kita. Debat kadang-kadang panas, tapi satu hal yang saya kira kita saksikan bersama, sekeras apapun, setajam apapun, kita menyadari tetap satu rumpun, satu keluarga, sama-sama anak bangsa Indonesia,” imbuhnya.

“Kontestasi telah selesai. Pertandingan telah selesai. Kita semua lelah dan mungkin di antara kita ada yang tidak puas dan kecewa. Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah berada di posisi Anda. Saya tahu, senyuman Anda berat sekali. Tapi ini yang dituntut oleh rakyat kita. Kalau kontestasi

adem-adem saja tidak tajam dan keras, namanya bukan pilihan untuk rakyat, rakyat minta perbandingan,” kata Prabowo.

Di akhir pidatonya, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memilihnya dan Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024 – 2029. Ia kemudian berjanji bersama Gibran akan bekerja dan berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia. “Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan saya tegaskan kembali, saya



**Prabowo Subianto**

dan saudara Gibran, kita akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, bekerja untuk rakyat Indonesia. Saya akan buktikan bahwa saya bekerja dan berjuang untuk rakyat Indonesia, termasuk yang tidak memilih saya,” pungkasnya.

KPU menggelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu 2024 sesuai dengan Pasal 4 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2024, yaitu Penetapan Pasangan Capres dan Wapres Terpilih paling lambat tiga hari setelah pembacaan putusan MK mengenai perkara PPHU. Pada Senin, 22 April 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pembacaan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan pemohon pasangan Capres

dan Cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo – Mahfud MD. Dalam putusannya, MK menolak seluruh permohonan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo – Mahfud MD.

Sidang pembacaan putusan dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo. Dalam amar putusan, MK menolak seluruh permohonan yang diajukan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. Menurut MK, permohonan kedua kubu tersebut tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Atas putusan itu, terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari tiga hakim konstitusi, yakni Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat. Pada intinya, ketiga hakim konstitusi tersebut menyatakan, seharusnya MK memerintahkan pemungutan suara ulang di beberapa daerah (lihat bagian kedua “Putusan MK Menolak Permohonan Pemohon dalam Perkara PPHU Pilpres 2024”).

### Ucapan Selamat

Usai majelis Hakim MK membacakan putusan atas perkara PPHU Pilpres 2024, pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka mendapat ucapan selamat. Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengucapkan selamat untuk kemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. “Kami sampaikan kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran, selamat menjalankan amanat konstitusi, selamat bekerja menunaikan harapan rakyat yang kini diembankan di atas pundak bapak-bapak berdua,” kata Anies dalam keterangan video di Jakarta, Senin malam, 22 April 2024.

Anies dan Muhaimin menyebut, koalisi perubahan sudah selesai usai putusan MK terkait sengketa PPHU Pilpres 2024. “Koalisi perubahan secara target, tujuan dan fungsi sudah selesai,” kata Muhaimin di Kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jakarta, Senin malam, 22 April 2024.

Sementara Capres dan Cawapres nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud Md yang juga hadir dalam sidang pembacaan putusan perkara PPHU Pilpres 2024 di MK menyatakan, menerima keputusan MK yang



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

menolak gugatan terkait sengketa Pilpres 2024. Ganjar Pranowo pun mengucapkan selamat bekerja kepada Prabowo – Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. “Saya dan Pak Mahfud tinggal hari ini saja, akhir dari sebuah perjalanan. Maka apapun keputusannya kami sepakati untuk menerima, kami terima, dan tentu kami ucapkan selamat bekerja untuk pemenang dan mudah-mudahan PR-PR bangsa ke depan bisa diselesaikan,” kata Ganjar di Gedung MK pada Senin, 22 April 2024.

Mahfud MD juga mengucapkan selamat bertugas kepada presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. “Mas Ganjar dan saya di MK juga sudah menyatakan menerima keputusan ini dengan lapang dada dan mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran atas keputusan hari ini, dan selamat bertugas. Mudah-mudahan negara ini semakin baik,” kata Mahfud MD, Senin, 22 April 2024.

“Artinya, Pemilu itu, Pilpres itu dari sudut hukum sudah selesai. Tidak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan. Pokoknya, Pilpres sudah selesai. Penentuan hasilnya, karena hasil Pilpres itu hanya ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi, tidak ada upaya hukum lain. Oleh sebab itu kita harus secara sportif menerima keputusan MK ini,” imbuhnya.

Pimpinan MPR juga memberi perhatian terhadap proses persidangan gugatan PHPU hingga putusan di MK. Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta semua pihak menghormati dan mematuhi putusan MK yang menolak seluruh permohonan dari pemohon pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 01 dan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 03. “Mari kita hormati dan patuhi keputusan MK terkait sengketa perselisihan hasil Pilpres 2024. Pihak yang kalah harus legowo, yang menang harus merangkul. Waktu bertanding sudah selesai, kini saatnya untuk bersanding,” kata Bamsuet, sapaan Bambang Soesatyo, menanggapi



putusan MK.

“Kini saatnya kita dukung penuh pasangan Prabowo – Gibran untuk memimpin bangsa ini ke depan, melanjutkan berbagai program pembangunan Jokowi. Karena, seluruh tahapan hukum sudah dijalani sesuai aturan yang ada, saatnya kita kembali bergandengan tangan. Sebagai pemenang Pilpres, Prabowo memiliki tanggungjawab untuk mempersatukan bangsa dan membangun sinergi serta kekuatan untuk kemajuan bangsa dan negara,” katanya.

Wakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam Pemilu 2024. Syarif Hasan menilai, setelah putusan MK yang menolak seluruh permohonan dari pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 01 dan nomor urut 03 maka rangkaian Pilpres telah selesai. Saatnya Indonesia menyambut pemimpin baru yang diharapkan akan membawa kemajuan dan kesejahteraan.

Syarief Hasan mengatakan, pasangan Prabowo – Gibran hadir di saat yang tepat. “Ini adalah jiwa zamannya. Kita berdoa semoga pasangan Prabowo – Gibran diberikan kelancaran dalam menjalankan pemerintahan. Saatnya semua komponen bangsa kembali bersatu, menatap ke depan, menuju Indonesia maju dan Sejahtera,” ucapnya.

Tak jauh berbeda, Wakil Ketua MPR Yandri Susanto juga mengatakan hal yang sama. Yandri mengajak seluruh masyarakat Indonesia mengakhiri perdebatan seputar Pemilu 2024. “Saat ini KPU telah menetapkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilu 2024. Seluruh masyarakat diharapkan dapat mengakhiri semua perdebatan yang berlangsung selama Pemilu,” pintanya dalam acara Halalbihalal Keluarga Besar Persatuan Warga Kabupaten Kaur (PWKK) dan Keluarga Besar Himpunan Keluarga Jurai Kedurang (HKJK) se-Jabodetabek dan Banten di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen, Jakarta, Ahad, 28 April 2024.

Melalui se bait pantun Waketum PAN tersebut mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu padu melanjutkan pembangunan. “Perjalanan jauh ke batu balai, jangan lupa mampir mandi. Pilpres 2024 telah usai, mari kita bersatu kembali,” ucapnya. □

MBO/BSC

## Sidang Perkara PPHU Pilpres 2024

# MK Tolak Permohonan Pemohon Seluruhnya

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan Capres - Cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta Capres - Cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud Md, dalam perkara PPHU Pilpres 2024. MK menyatakan permohonan pemohon “tidak berasal dari hukum seluruhnya.”



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**K**OMISI Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan dan menetapkan hasil Pemilihan Presiden Pemilu 2024 pada Rabu, 20 Maret 2024. Setelah sebulan penuh melakukan rekapitulasi suara (sejak Februari 2024), KPU mengumumkan hasil Pemilu Presiden, yaitu pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka memperoleh 95.214.691 suara atau 58,59%. Pasangan Capres dan Cawapres yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) ini unggul di 36 provinsi dari 38 provinsi di Indonesia.

Di posisi kedua, pasangan Capres dan

Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar meraup 40.971.906 suara atau 24,95%. Pasangan yang diusung Partai Nasdem, PKB, dan PKS ini unggul di dua provinsi (DI Aceh dan Sumatera Barat). Sedangkan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 03 Ganjar Pranowo – Mahfud Md meraih 27.040.878 suara atau 16,47%. Dari hasil rekapitulasi suara ini, pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 menjadi pemenang Pemilu Presiden 2024.

Hanya selang sehari setelah pengumuman KPU atau Kamis, 21 Maret 2024, Tim Hukum pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 01 mengajukan

gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan PPHU itu terdaftar dengan nomor registrasi 01/PHPU.Pres/XXII/2024. Sesuai aturan, pihak yang berkeberatan dengan hasil Pilpres bisa mengajukan gugatan PPHU ke MK. Pengajuan gugatan itu diberi batas waktu tiga hari setelah pengumuman hasil rekapitulasi Pemilu. Gugatan serupa juga diajukan Tim Hukum pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 03 di hari terakhir pengajuan gugatan PPHU, hari Sabtu, 23 Maret 2024, dan terdaftar dengan nomor registrasi 02/PHPU.Pres/XXII/2024.

MK mulai menggelar sidang PPHU pada

Rabu, 27 Maret 2024. Sidang PHPU dipimpin Ketua MK Suhartoyo, dan dihadiri para hakim MK lainnya, yaitu Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Daniel Yusmic Foekh, Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur. Sedangkan hakim MK Anwar Usman tidak ikut mengadili sidang PHPU. Sementara Tim Hukum pasangan Capres dan Cawpres 01 diantaranya Bambang Widjojanto, Refli Harun, Ari Yusuf Amir. Tim Hukum pasangan Capres dan Cawapres 03 diantaranya Todung Mulya Lubis, Maqdir Ismail, Henry Yosodiningrat. Dan, Tim Hukum pasangan Capres dan Cawapres 02 dipimpin Yusril Ihza Mahendra didampingi Otto Hasibuan, Hotman Paris Hutapea, OC Kaligis,

Dalam sidang pendahuluan sengketa hasil Pemilu, kubu Anies Baswedan mendapat kesempatan pertama menyampaikan permohonan gugatan PHPU pada pukul 08.00 WIB, sementara kubu Ganjar Pranowo menyusul pada pukul 13.00 WIB. Selanjutnya, pada Kamis, 28 Maret 2024, MK mendengar jawaban KPU sebagai termohon, serta keterangan dari pihak-pihak terkait. Setelah itu, pemeriksaan perkara berlangsung periode 1 sampai 18 April 2024, dan MK membacakan putusan pada 22 April 2024. Pemeriksaan sengketa PHPU tidak boleh melebihi 14 hari kerja.

### **Kecurangan TSM**

Pada intinya, pemohon 01 dan pemohon 02 mendalilkan terdapat kecurangan yang terstruktur, masif, dan sistematis (TSM) dalam Pemilu yang memenangkan pasangan calon nomor urut 02, yaitu Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. Menurut para pemohon, Pemilu 2024 tidak berlangsung secara bebas, jujur, dan adil. Selain itu, pemohon juga mempermasalahkan pencalonan wakil presiden nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka. Menurut pemohon, proses pencalonan Gibran sebagai Cawapres sudah bermasalah sejak awal, ditambah dengan fakta bahwa Gibran adalah anak sulung dari Presiden RI yang saat ini masih menjabat, yakni Joko Widodo.

Pencalonan Gibran sebagai Cawapres seharusnya didiskualifikasi karena terdapat pelanggaran kode etik dalam putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Hal ini diperkuat dengan adanya putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)



**Tim Hukum pasangan Capres dan Cawpres 01**

mengenai pelanggaran kode etik Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari terkait penerimaan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, pemohon memohon agar MK menyatakan batal dan tidak mengikat terhadap Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Selain itu, pemohon memohon agar MK menyatakan diskualifikasi terhadap Cawapres nomor urut 02, yaitu Gibran Rakabuming Raka karena tidak memenuhi syarat usia pencalonan Cawapres dan menyatakan batal Keputusan KPU Nomor 1632 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2023 dan Keputusan KPU Nomor 1644 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil



**Tim Hukum pasangan Capres dan Cawapres 02**



Tim Hukum pasangan Capres dan Cawapres 03

Presiden Republik Indonesia Tahun 2023, sepanjang berkaitan dengan Cawapres atas nama Gibran Rakabuming Raka. Untuk itu, pemohon juga memohon MK untuk memerintahkan termohon (KPU) untuk melaksanakan Pemilu ulang tanpa mengikutsertakan Cawapres nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka.

Dalam persidangan Tim Hukum paslon 01 mengajukan sejumlah saksi dan ahli, di antaranya ekonom senior Faisal Basri, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan, ekonom UI Vid Adrison, pakar otonomi daerah Djohermansyah Djohan. Sedangkan saksi ahli yang dihadirkan Tim Hukum Paslon 03 di antaranya Guru Besar Ilmu Ekonomi Pembangunan Universitas Padjadjaran Didin Damanhuri, Guru Besar Filsafat STF Driyarkara Franz Magnis Suseno, Guru Besar Psikologi UI Hamdi Muluk, Mantan anggota KPU I Gusti Putu Artha.

Persidangan sengketa PHPU di MK juga meminta keterangan empat menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM), yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. Keempat menteri KIM ini dihadirkan dalam persidangan sengketa PHPU atas permintaan Hakim MK untuk memberi keterangan adanya hubungan antara pemberian bantuan sosial (Bansos) dengan pemenangan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto

– Gibran Rakabuming Raka.

Setelah pemeriksaan perkara (27 Maret – 5 April), Mahkamah Konstitusi menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) (16 April – 21 April) untuk memutus sengketa PHPU yang diajukan Tim Hukum Paslon 01 dan Tim Hukum Paslon 03. Pada Senin, 22 April 2024, MK menggelar sidang putusan perkara PHPU di Ruang Sidang Lantai II Gedung I MK, Jakarta. Hasilnya, MK menolak permohonan sengketa PHPU yang diajukan Paslon 01 Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar dan Paslon 03 Ganjar Pranowo – Mahfud MD. “Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Suhartoyo.

**Berikut ini, beberapa kutipan dari putusan MK.**

**Pertama**, MK menyatakan tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa Presiden Joko Widodo mengintervensi perubahan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. “Tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah telah terjadi inervensi presiden karena perubahan syarat pasangan calon tahun 2024,” kata Hakim MK, Arief Hidayat, membacakan putusan MK.

Putusan Majelis Kehormatan MK (MKMK) Nomor 2 Tahun 2023, kata Arief Hidayat, memang menyatakan Ketua MK Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat akibat Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023. Namun, hal itu bukan berarti membuktikan bahwa ada cawe-cawe Kepala Negara dalam perubahan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. “Tidak serta merta dapat menjadi bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi tindakan nepotisme yang melahirkan *abuse of power* presiden dalam perubahan syarat pasangan calon ersebut,” kata Arief.

“Terlebih, kesimpulan Putusan MKMK Nomor 2 Tahun 2023 itu sendiri yang kemudian dikutip dalam Putusan Mahkamah Nomor 141 Tahun 2023, antara lain telah menegaskan MKMK tidak berwenang membatalkan keberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi,” tegasnya.

**Kedua**, MK menyatakan Presiden Jokowi



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

tidak melakukan nepotisme karena menyetujui dan mendukung puteranya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. MK menolak dalil kubu Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar yang menuding Jokowi melanggar ketentuan mengenai nepotisme di Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, serta Undang-Undang Pemilu.

“Mahkamah berpendapat, dalil pemohon mengenai pelanggaran atas Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998, UU 28/1999, dan Pasal 282 UU Pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum,” kata hakim MK Daniel Yusmic Foekh saat membacakan putusan dalam sidang putusan sengketa PPHU. MK beralasan, kubu Anies – Muhaimin tidak menguraikan lebih lanjut dan tidak membuktikan dalilnya sehingga Mahkamah tidak yakin akan kebenaran dalil tersebut.

Apalagi jabatan wakil presiden yang dipersoalkan adalah jabatan yang diisi melalui pemilihan, bukan jabatan yang ditunjuk atau diangkat secara langsung. “Jabatan yang terkait dengan larangan nepotisme adalah jabatan yang pengisiannya dilakukan dengan cara ditunjuk/diangkat secara langsung. Artinya, jabatan yang diisi melalui pemilihan umum tidak dapat dikualifikasi sebagai bentuk nepotisme,” kata Daniel.

**Ketiga**, Mahkamah Konstitusi menolak korelasi Bansos dengan perolehan suara Capres-Cawapres. MK menyebut dalil kubu Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar terkait dengan adanya korelasi bantuan sosial (Bansos) dengan perolehan suara salah satu pasangan Capres dan Cawapres “tidak terbukti” sehingga tidak beralasan menurut hukum.

Untuk mencermati dalil yang disampaikan pemohon dari Tim Amin, pada 5 April 2024, Mahkamah memanggil empat menteri, yaitu Menteri PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani, dan Mensos Tri Rismaharini. Namun, dari penjelasan para menteri, Mahkamah menemukan bahwa program Bansos yang merupakan bagian dari program perlindungan sosial (Perlinsos) telah diatur dalam UU APBN tahun anggaran 2024, khususnya pasal 8 ayat 2.

Dari total belanja Rp 3.325 triliun yang direncanakan dalam APBN, sebanyak Rp

496,8 triliun dianggarkan untuk program Perlinsos. Atas data-data yang disampaikan para menteri, Mahkamah menilai perencanaan dan distribusi Bansos merupakan tindakan yang sah secara hukum, karena memang terdapat peraturan perundang-undangan yang melandasinya.

Adapun mengenai “kecurigaan bahwa terhadap intensi/niat lain di luar tujuan penyaluran dana Perlinsos”, Mahkamah disebutkan “tidak mendapatkan bukti yang meyakinkan kebenaran dalil pemohon tersebut”. Dari sisi pembuktian, kata Hakim Arsul Sani, pemohon Tim Amin mengajukan alat bukti berupa hasil survei dan keterangan

Nurbaningsih, dan Arief Hidayat, menyatakan pendapat berbeda dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024.

Saldi menyatakan, seharusnya Mahkamah memerintahkan pelaksanaan pemungutan suara ulang di beberapa daerah sepanjang berkenaan dengan politisasi Bansos dan mobilisasi aparat/aparatur negara/ penyelenggara negara adalah beralasan menurut hukum. “Seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah,” kata Saldi.

Hal yang sama juga disampaikan Enny Nurbaningsih. Menurut Enny, untuk menjamin terselenggaranya Pemilu yang jujur dan adil



**Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih**

ahli. Hanya saja, paparan hasil survei dan keterangan ahli tidak memunculkan keyakinan bagi Mahkamah akan korelasi positif antara Bansos dengan pilihan pemilih secara faktual.

“Berpijak dari hal demikian, terhadap dalil pemohon menurut Mahkamah tidak terdapat alat bukti yang secara empiris menunjukkan bahwa Bansos nyata-nyata telah memengaruhi/mengarahkan secara paksa pemilih,” kata Arsul Sani.

### **Dissenting Opinion**

Untuk pertama kali dalam sejarah sidang sengketa PPHU, putusan dalam perkara PPHU diwarnai pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Tiga hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Saldi Isra, Enny

sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) NRI Tahun 1945, seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang, karena diyakini telah terjadi ketidaknetralan pejabat yang sebagian berkelindan dengan pemberian Bansos yang terjadi di beberapa daerah.

Sementara, Arief Hidayat mengatakan, seharusnya Mahkamah memerintahkan KPU untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di daerah pemilihan Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera Utara, dalam waktu 60 hari. Menurut Arief, seharusnya Mahkamah juga melarang adanya pembagian Bansos sebelum dan pada saat pemungutan suara ulang. □

**BSC**



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Dr. Benny K. Harman, SH, MH, Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR RI

## Kemenangan Prabowo – Gibran Memiliki Legitimasi Hukum dan Politik

**M**AHKAMAH Konstitusi (MK) sudah memutuskan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dalam sidang pembacaan putusan PHPU di MK pada Senin, 22 April 2024. Dalam putusan perkara PHPU itu, Ketua MK Suhartoyo menyebutkan, MK menolak permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan pasangan Capres – Cawapres nomor urut 01 Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar maupun pasangan Capres – Cawapres nomor urut 03 Ganjar Pranowo – Mahfud MD. “Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK. Namun, dalam putusan perkara PHPU Pilpres 2024 itu, tiga hakim MK menyatakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menindaklanjuti putusan MK itu dengan menggelar sidang pleno penetapan pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka sebagai Capres dan Cawapres terpilih Pemilu 2024. Sidang pleno itu dilaksanakan pada Rabu, 24 April 2024,

dihadiri pasangan Capres – Cawapres Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, dan turut hadir pasangan Capres – Cawapres nomor urut 01 Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar, namun tidak dihadiri pasangan Capres – Cawapres nomor urut 03 Ganjar Pranowo – Mahfud MD.

Dalam sidang pleno itu, KPU secara resmi menetapkan pasangan Capres – Cawapres Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk periode masa jabatan 2024 – 2029 sekaligus menandai berakhirnya tahapan Pilpres 2024. Dalam Pilpres 2024, pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka mendapat dukungan 96.214.691 suara pemilih mengungguli pasangan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar yang memperoleh 40.971.906 suara dan pasangan Ganjar Pranowo – Mahfud Md yang meraih 27.040.878 suara.

Bagaimana evaluasi pelaksanaan tahapan Pilpres hingga putusan MK ini, berikut wawancara Majelis dengan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Dr. Benny K.

Harman, SH., MH., beberapa waktu lalu. Petikannya.

**Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak permohonan pemohon pasangan Capres – Cawapres nomor urut 01 Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar dan pasangan Capres – Cawapres nomor urut 03 Ganjar Pranowo – Mahfud Md, dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024. KPU pun telah menetapkan secara resmi pasangan Capres – Cawapres Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk masa jabatan 2024 – 2029. Bagaimana Bapak melihat tahapan dalam Pilpres ini hingga akhir sidang di MK?**

Pemilihan Presiden 2024 ini berlangsung dengan sangat dinamis. Tahapan Pilpres sudah dilaksanakan, dan kita sudah mengetahui hasilnya. Rakyat telah datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan memilih pasangan calon presiden dan calon presiden yang dikehendaki. Hasilnya,

pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menang dalam Pilpres. Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun telah menetapkan pasangan ini secara resmi sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pilpres 2024. Dengan demikian, rakyat sudah memutuskan memilih pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden untuk periode 2024 – 2029.

KPU menetapkan pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara, mulai dari penghitungan di TPS, desa/kelurahan, rekapitulasi di tingkat kecamatan, kemudian di tingkat kabupaten/kota, sampai pada rekapitulasi di tingkat provinsi, dan KPU pusat. Hasilnya, sekali lagi, pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka meraih suara terbanyak. Jadi, yang menetapkan pemenang Pilpres 2024 adalah KPU bukan Mahkamah Konstitusi (MK).

Setelah KPU menetapkan pemenang Pilpres, pasangan nomor urut 01 dan pasangan nomor urut 03 tidak menerima hasil pengumuman KPU. Mereka lalu mengajukan gugatan PHPU ke MK. Tetapi, setelah diajukan gugatan PHPU ke MK, setelah melalui proses persidangan, MK menolak permohonan dan permintaan pemohon, yaitu pasangan Capres – Cawapres 01 dan 03, yang intinya memohon kemenangan pasangan Capres – Cawapres nomor urut 02 dianulir, dan agar dilakukan pemungutan suara ulang Pilpres.

MK telah menolak permohonan pemohon dari Paslon 01 dan Paslon 03. Artinya, kemenangan Paslon 02 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka telah mempunyai legitimasi secara hukum. Dengan demikian, kemenangan Paslon 02 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka telah secara lengkap mendapat legitimasi, baik politik maupun hukum. Legitimasi politik diperoleh karena dipilih rakyat secara langsung, sedangkan legitimasi hukum diperoleh dari MK.

Karena itu, saat ini keabsahan kemenangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka sudah sempurna. Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 ini sudah mengantongi dua legitimasi, yaitu legitimasi politik dan legitimasi hukum. Kini tinggal saatnya nanti KPU mengajukan permintaan kepada MPR untuk mengesahkan Capres dan Cawapres terpilih, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.

**Dalam sidang perkara PHPU Pilpres 2024, ada tiga hakim MK yang**

**menyatakan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*), yaitu Hakim MK Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat. Bagaimana pendapat Bapak melihat adanya hakim MK yang memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dalam perkara PHPU Pilpres ini?**

Adanya *dissenting opinion* atau pendapat yang berbeda dari hakim MK dalam suatu perkara adalah hal yang biasa. Tetapi, *dissenting opinion* atau pendapat yang berbeda itu adalah “sampah”. Dalam arti, *dissenting opinion* atau pendapat yang berbeda itu tidak mempunyai kekuatan hukum apapun, tidak ada gunanya. Sebab, *dissenting opinion* atau pendapat yang berbeda itu minoritas, sedangkan keputusan



Mahkamah adalah keputusan yang mayoritas.

Jadi, kita tidak bisa mengatakan karena *dissenting opinion* itu hakim yang menangani perkara PHPU di MK terbelah, maka kemenangan Paslon 02 tidak mempunyai legitimasi. Sekalipun tiga dari delapan hakim MK menyatakan pendapat yang berbeda atau *dissenting opinion*, tetap kemenangan Paslon 02 sah, keputusan MK mengikat secara hukum dan politik.

**Apakah pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari tiga hakim MK dalam perkara PHPU Pilpres 2024 bisa dianggap sebagai masukan atau kritik terhadap pelaksanaan Pilpres untuk perbaikan dalam Pemilu berikutnya?**

Ya, anggap saja pendapat yang berbeda dari tiga hakim MK itu sebagai catatan kaki dalam pelaksanaan Pilpres pada Pemilu 2024

ini agar ke depan bisa dilakukan perbaikan yang lebih baik lagi. Tetapi *dissenting opinion* dari tiga hakim MK itu tidak berpengaruh pada hasil putusan hakim MK secara keseluruhan. Putusan MK itu bersifat final dan mengikat.

**Dalam putusannya hakim MK juga menyebutkan sejumlah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan, misalnya melalui revisi UU Pemilu untuk pelaksanaan Pilpres pada Pemilu berikutnya. Apa pendapat Bapak?**

Kekurangan dalam pelaksanaan Pilpres pada Pemilu 2024 ini untuk ke depan memang harus diperbaiki. Mereka (para hakim MK) juga mengakui adanya kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan Pilpres kali ini. Namun, kekurangan-kekurangan itu tidak memengaruhi hasil Pilpres.

**Salah satu yang menjadi perhatian adalah soal bantuan sosial (Bansos) yang dibagikan Presiden. Ada masukan agar dibuat UU Kepresidenan yang mengatur tentang dana operasional presiden sehingga penggunaan dana operasional presiden memilih arah yang jelas. Apa komentar Bapak?**

Sebenarnya apa urgensinya agar dibuat UU Kepresidenan? Kadang-kadang argumentasi hakim MK juga tidak jelas, berlarian kemana-mana. Jangan seperti itu. Lebih baik fokus pada perkara saja.

**Jadi, UU Kepresidenan memang belum diperlukan?**

Kalau itu terkait dengan bantuan sosial (Bansos), masak orang lapar tidak boleh diberi makan (Bansos)? Kalau ada orang lapar, orang miskin dan kekurangan, ya dibantu dengan cara memberi makan (Bansos). Kalau mereka yang mendapat bantuan kemudian berterima kasih kepada yang memberi, bagaimana kita bisa mengetahuinya? Itu terlalu jauh. Kecuali kalau dengan bantuan itu dia menyandera, misalnya akan diberi makan (Bansos) kalau memilih Paslon tertentu. Kenyataannya tidak seperti itu. Artinya, dalam pemberian makan (Bansos) itu, Paslon 01 dan Paslon 03 telah gagal membuktikan bahwa pemberian makan (Bansos) itu mempengaruhi pilihan.

Di daerah pemilihan (Dapil) saya saja, orang memilih Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka bukan karena Bansos. Mereka memilih Prabowo Subianto karena memang Prabowo mempunyai kemampuan, Prabowo mempunyai pengalaman. Itu yang membuat masyarakat memilih Paslon 02 Prabowo – Gibran. □

Delegasi Wamenlu Libya

Fadel Muhammad  
**Buka Kembali Program Beasiswa**  
 dan Peningkatan Perdagangan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Dalam kunjungannya di Indonesia pada 26 April 2024, Wakil Menteri Luar Negeri Libya, Mohamed Khalil AbuBakr Issa, menyatakan, ingin agar hubungan diplomatik dengan Indonesia ditingkatkan. Libya membuka kembali program beasiswa dan bisnis.

**M**PR bagi pemerintah Libya merupakan lembaga negara yang penting. Buktinya, dalam kunjungan sehari di Indonesia pada 26 April 2024, MPR termasuk lembaga negara yang dikunjungi oleh Wakil Menteri Luar Negeri Libya, Mohamed Khalil AbuBakr Issa.

Kehadiran Wakil Menlu dari salah satu negara di Afrika utara, didampingi oleh Duta Besar Libya untuk Indonesia, Zakarya MM. El Moghrabi, diterima oleh Wakil Ketua MPR RI, Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad, di ruang kerjanya, Lt.9 Gedung Nusantara III, Komplek MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, 26 April 2024.

Selepas pertemuan dengan Khalil AbuBakr, Fadel Muhammad kepada wartawan mengatakan, banyak hal yang dibahas dengan pria alumni University of Benghazi itu. Fadel menyatakan, Libya ingin agar hubungan diplomatik dengan Indonesia ditingkatkan. Saat ini, katanya, pemerintah Indonesia belum membangun gedung kantor kedutaan besar yang mengalami kerusakan akibat konflik yang terjadi di negara itu beberapa waktu yang lalu. "Khalil AbuBakr mengatakan, sekarang negaranya sudah aman dan damai, sudah tidak ada

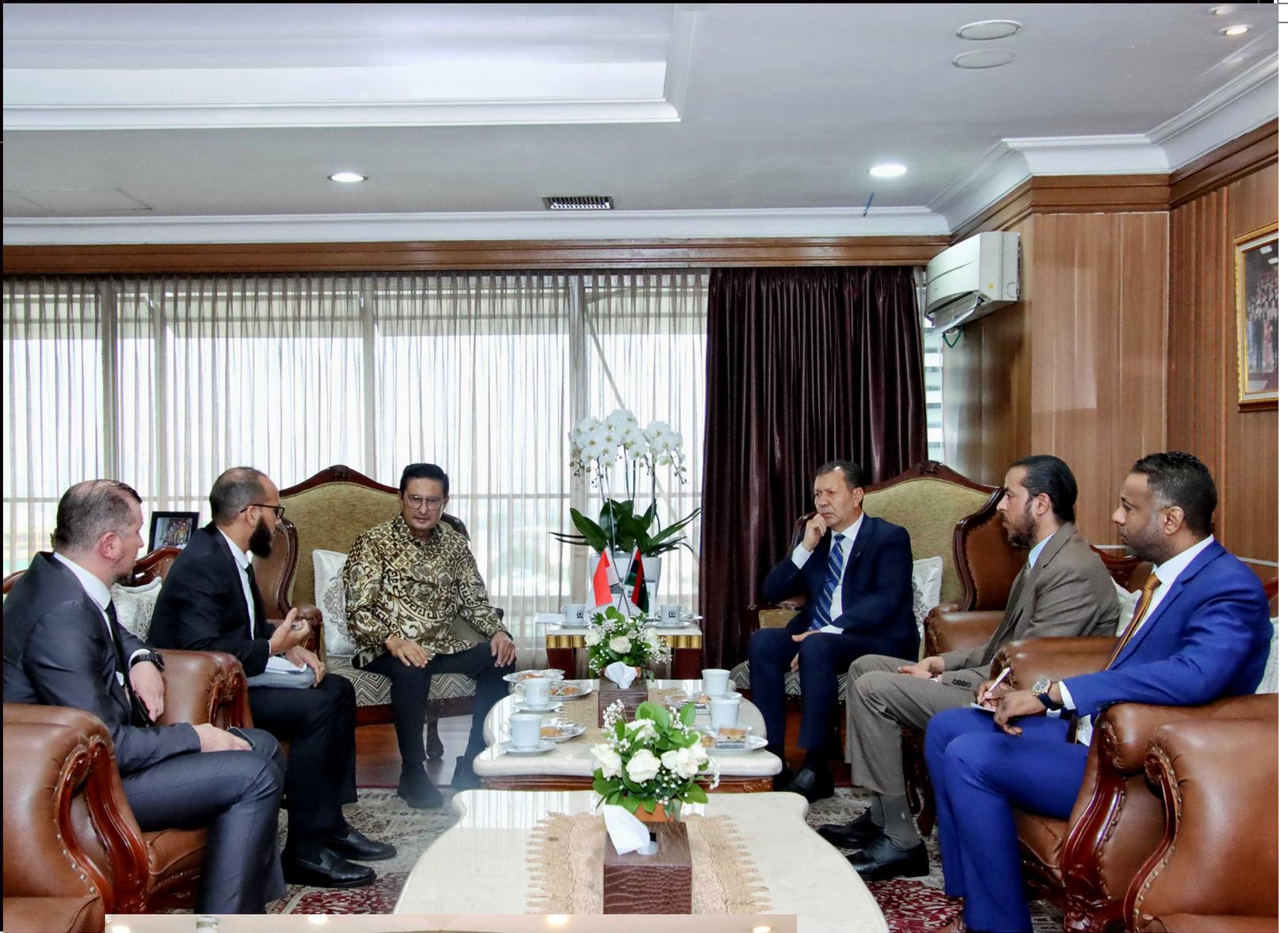
pertikaian," ujar Fadel Muhammad.

Dulu, menurut Fadel, ada ribuan pelajar Indonesia di Libya yang mendapat beasiswa. "Ada yang dari lembaga pendidikan Al Khairaat," tutur pria alumni ITB itu. "Dari lembaga pendidikan yang lain juga banyak," tambahnya.

Kini, menurut Fadel Muhammad, pemerintah Libya membuka kembali program beasiswa untuk para pelajar dari Indonesia. "Sebelum konflik pecah di Libya, sudah banyak pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan di sana," ungkapnya.

Kepedulian Libya kepada Indonesia, kata Fadel, tidak hanya melimpahnya program beasiswa, namun negara yang berbatasan dengan Tunisia itu juga banyak membantu pembangunan masjid di Indonesia.

Sebelum tiba di Indonesia, Khalil AbuBakr lebih dahulu melakukan kunjungan ke Malaysia. Di negeri jiran itu, ia melakukan kesepakatan kerja sama dengan para pengusaha. Apa yang dilakukan di Malaysia, menurut Fadel Muhammad, juga akan dilakukan di Indonesia. "Bahkan, Beliau mengundang saya dan para pengusaha di sini untuk



berkunjung ke sana,” ungkapnya. Atas undangan itu, Fadel menyatakan: “Insya Allah saya datang dan akan bertemu dengan Khalil AbuBakr dan Presiden Libya untuk membuka kembali hubungan bisnis kedua

negara.”

Potensi bisnis di negeri yang berbatasan dengan Mesir itu sangat potensial. Pertamina, jelas Fadel, pernah mempunyai lahan yang cukup besar di sana. “Kita bisa

ekspor pulp and paper yang mutunya sangat bagus,” ujarnya. “Bidang medical, seperti produk kimia farma, juga bisa diandalkan, selain produk makanan dan minuman”, tambahnya. Pemerintah Libya, katanya, menunggu produk-produk dari Indonesia yang sangat mereka butuhkan.

Kedatangan Khalil AbuBakr, menurut Fadel Muhammad, merupakan tanda dan langkah baru hubungan Indonesia-Libya. “Mereka membuka kembali program beasiswa dan bisnis”, ujarnya. Banyaknya penerbangan ke Libya juga bisa meningkatkan jumlah wisatawan kedua negara.

Selepas mengadakan kunjungan ke MPR, Khalil AbuBakr direncanakan akan mengadakan pertemuan dengan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Pahala Nugraha Mansury. “Dalam pertemuan itu dibahas berbagai masalah peningkatan hubungan kedua negara,” ujar mantan Gubernur Gorontalo itu. □

‘Sahabat Pengadilan’

# Ahmad Basarah: Secerch Cahaya di Tengah Kegelepan Hukum dan Demokrasi

Banyak pihak mengajukan diri sebagai ‘Sahabat Pengadilan’ atau Amicus Curiae jangan dianggap sebagai langkah mengintervensi para hakim MK. ‘Sahabat Pengadilan’ merupakan praktik lazim dalam hukum Indonesia yang keberadaannya dan urgensinya diatur dalam berbagai landasan hukum.

**W**AKIL Ketua MPR, Ahmad Basarah, mengatakan, sikap Megawati Soekarnoputri dan para mahasiswa, akademisi, budayawan, hingga agamawan yang mengajukan diri menjadi ‘Sahabat Pengadilan’ atau Amicus Curiae bagi Mahkamah Konstitusi (MK) menunjukkan besarnya kepedulian banyak pihak terhadap lembaga negara, pengawal konstitusi itu. Sikap menjadi ‘Sahabat Pengadilan’ itu juga setidaknya menjadi ‘secercah cahaya di tengah kegelapan hukum dan demokrasi’ yang sedang terjadi saat ini.

“Saat praktik bernegara menunjukkan gejala penguasa melakukan *abuse of power* dengan berupaya mengakali konstitusi untuk melanggengkan kekuasaannya maka konsistensi para pemimpin bangsa yang merupakan negarawan sejati yang taat pada konstitusi ibarat secercah cahaya di tengah kegelapan hukum dan demokrasi,” ujar Basarah dalam keterangannya tertulis kepada wartawan di Jakarta, Kamis (18/4).

“Pilihan Megawati Soekarnoputri dalam kapasitasnya sebagai seorang warga negara menjadi Amicus Curiae dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilu Pilpres 2024 di MK menunjukkan kualitas kesadaran bernegaranya yang selalu taat pada konstitusi. Sikap itu sekaligus sebagai bentuk dukungan agar penyelesaian sengketa politik dalam Pemilu 2024 diselesaikan lewat jalur hukum di MK, dan bukan melalui jalan lain di luar koridor konstitusi. Hal itu juga merupakan wujud kenegarawanannya yang taat pada nilai demokrasi dan hukum,” ujar Basarah.

Basarah mengatakan, sikap yang diambil Megawati sejak dulu sejalan antara perkataan dengan perbuatan. Saat melawan rezim Orde Baru, Megawati mendukung pembentukan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) untuk memperjuangkan hak-hak politiknya. Begitu pun saat melawan kezaliman pada



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

saat ini, lanjut Basarah, Megawati sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan tidak pernah mengarahkan, apalagi menginstruksikan kader-kadernya, untuk melakukan aksi demonstrasi di jalan, sejak sidang perkara PHPU 2024 digelar di MK.

“Sikap itu memperlihatkan konsistensi perjuangan Ibu Megawati sebagai tokoh bangsa yang selalu berpedoman pada prinsip negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum dan etika. Hingga kini, Ibu Megawati juga masih percaya Mahkamah Konstitusi yang dibentuk pada Agustus 2003 saat dirinya menjadi Presiden masih tetap menjaga kredibilitasnya sebagai ‘Penjaga Konstitusi’,” ujar Basarah.

Oleh karena itu, Basarah mengatakan, banyaknya pihak yang mengajukan diri sebagai ‘Sahabat Pengadilan’ jangan

dianggap sebagai langkah mengintervensi para hakim MK. Menurut Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Diponegoro itu, Amicus Curiae atau ‘Sahabat Pengadilan’ merupakan praktik lazim dalam hukum Indonesia yang keberadaannya dan urgensinya diatur dalam berbagai landasan hukum.

Terkait dengan keberadaan ‘Sahabat Pengadilan,’ Basarah menegaskan, UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan bahkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sendiri memberikan ruang partisipasi melalui opini hukum atau pendapat hukum bagi masyarakat untuk terlibat dalam penyelesaian suatu perkara yang menyita perhatian dan berdimensi kepentingan publik (*public interest*).

Di sisi lain, Basarah menjelaskan, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga

negara pengawal konstitusi memiliki kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana dijamin UUD NRI Tahun 1945. Ia kemudian merujuk Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 2 UU 24 Tahun 2003 tentang MK yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kemudian, Basarah yang juga pengajar Program Doktor di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta, itu juga menambahkan, pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

“Berbagai landasan hukum tersebut

menunjukkan pengadilan bukan sekedar menegakkan hukum, tapi juga keadilan. Keadilan yang wajib ditegakkan pengadilan adalah keadilan dari masyarakat. Bukan sekedar di ruang persidangan. Maka, pengadilan perlu membuka diri atas berbagai pandangan dan pendapat hukum dari masyarakat, meskipun kewenangan putusan sepenuhnya di tangan hakim. Dengan adanya para ‘Sahabat Pengadilan’ justru akan menambah bobot keyakinan hakim saat mengambil keputusan untuk kepentingan bangsa dan negara,” ujar Basarah.

Sebagai sebuah produk hukum, putusan MK juga harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai norma dasar (grundnorm), di mana tujuan pembentukan hukum harus menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan bagi sekelompok orang saja.

Oleh karena itu, Basarah berharap, para hakim MK bisa memecah kebuntuan dan mengedepankan prinsip keadilan substansial dalam memutuskan sengketa Pilpres 2024 tanpa kehilangan independensi dan imparialitasnya.

“Selain untuk kepentingan tegaknya keadilan substantif dalam sengketa Pilpres 2024 di MK, maka pesan lain yang tersirat adalah berbondong-bondongnya masyarakat menjadi ‘Sahabat Pengadilan’ sesungguhnya merupakan bentuk peringatan bagi penguasa untuk tidak kembali melakukan praktik abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mencederai nilai demokrasi dan etika politik dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak nasional yang sebentar lagi akan diselenggarakan,” ujar Basarah, yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan itu. □

## Konflik Iran-Israel

# Syarief Hasan: Perlu Upaya Bersama untuk Meredamnya

Langkah tanggap Kementerian Luar Negeri dengan mengontak Pemerintah Iran dan AS, dan menyerukan deeskalasi serta solusi meja perundingan sudah tepat. Ini perlu diapresiasi.

**W**AKIL Ketua MPR, Syarief Hasan mendorong deeskalasi di Timur Tengah paska terjadinya serangan Iran terhadap Israel. Ketegangan ini tidak saja berimbas pada wilayah Timur Tengah, namun berdampak global, termasuk bagi Indonesia. Bahkan, kondisi ini berpotensi memantik konflik yang meluas, dengan respon militer yang masif. Ini harus jadi keprihatinan kolektif.

“Situasi Timur Tengah yang kian bergejolak hanya berdampak destruktif pada kehidupan kemanusiaan. Perlu upaya bersama untuk meredamnya. Indonesia, dalam kapasitas sebagai Anggota G-20, anggota ASEAN dan negara berpenduduk muslim terbesar kedua di dunia punya tanggung jawab untuk meredakan ketegangan. Langkah tanggap kementerian luar negeri dengan mengontak Pemerintah Iran dan AS, dan menyerukan deeskalasi serta solusi meja perundingan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

sudah tepat. Ini perlu diapresiasi,” ujar Politisi Senior Partai Demokrat ini.

Menurutnya, Iran adalah salah satu negara eksportir minyak terbesar, termasuk

dengan kapasitas militer yang besar. Artinya, gejolak yang terjadi akan berdimensi ekonomi dan politik sekaligus. Secara ekonomi, konflik lebih lanjut akan

mengerek harga energi, ujungnya berdampak inflasi bagi negara net importer, seperti Indonesia. Secara politik, respon militer hanya memantik respon lainnya, memicu konflik meluas, bahkan mungkin berskala global.

Anggota Komisi Luar Negeri DPR RI ini meminta Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB bertindak lebih proaktif dan imparial. Mendudukkan konflik ini

dengan bijak serta fokus pada solusi. PBB harus melihat akar konflik secara proporsional dan holistik sehingga langkah yang diambil juga solutif dan berkelanjutan. Yang juga penting dan ditunggu adalah peran mediasi dan penengah konflik dari negara-negara berpengaruh pada konflik, seperti AS, Negara Arab, Uni Eropa, Rusia, dan China.

“Dalam konteks domestik, pemerintah

juga mesti memitigasi konflik ini. Kita belum tahu skalanya akan sebesar apa dan arahnya akan kemana. Hal yang terutama adalah dampak ekonominya yang langsung terasa, naiknya harga minyak, inflasi, serta terganggunya rantai pasok global. Langkah penyelamatan ekonomi yang segera dan terukur menjadi prioritas, khususnya bagi UMKM dan koperasi,” tutup Syarif. □

## Ancaman Pornografi

# Lestari Moerdijat: Segera Wujudkan Upaya Perlindungan Anak secara Menyeluruh

Data mengungkapkan, jumlah kasus pornografi anak di Indonesia masuk dalam peringkat empat di dunia dan peringkat dua terbanyak di Asia Tenggara atau negara-negara ASEAN.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**U**PAYA penanganan dan mitigasi terkait kasus pornografi anak melalui pembentukan satuan tugas yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga harus mampu mengakselerasi langkah perlindungan terhadap setiap warga negara dari ancaman dampak pornografi di tanah air.

“Temuan maraknya kasus pornografi anak ini harus segera ditangani dengan langkah masif dan terukur, sehingga mampu menciptakan sistem perlindungan yang menyeluruh bagi para generasi penerus

bangsa,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (19/4).

Catatan National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) ada lima juta lebih temuan konten terkait kasus pornografi anak Indonesia. Data tersebut mengungkapkan jumlah kasus pornografi anak di Indonesia masuk dalam peringkat empat di dunia dan peringkat dua terbanyak di lingkungan Asia Tenggara atau negara-negara ASEAN.

Menurut Lestari, upaya pemerintah untuk menangani kasus pornografi anak mulai dari

tahap pencegahan, penanganan, penegakan hukum, hingga pasca kejadian itu, harus mendapat dukungan semua pihak.

Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat, pelibatan sejumlah kementerian dan lembaga dalam penanganan kasus pornografi anak menuntut dibangunnya sinergitas yang baik lintas sektoral.

Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, sangat berharap komitmen yang tinggi dari para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dalam penanganan kasus-kasus pornografi anak di tanah air dapat diwujudkan.

Karena, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, masa depan bangsa ini sangat tergantung pada kualitas anak-anak atau sumber daya manusia (SDM) yang akan menjadi generasi penerus di masa datang.

Rerie sangat berharap, proses tumbuhkembang anak bangsa menjadi generasi penerus yang berdaya saing dapat berjalan sesuai harapan.

Sehingga, tegasnya, mengedepankan berbagai upaya secara konsisten untuk meningkatkan kualitas SDM nasional harus menjadi pemahaman bersama, demi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi nilai-nilai warisan para pendahulu bangsa, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. □

## Perayaan Lebaran Ketupat di Gorontalo

# Fadel Muhammad: Tradisi Ini Harus Terus Dijaga Jangan Sampai Punah

Wakil Ketua MPR RI, Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad, antusias merayakan rangkaian tradisi besar khas Gorontalo 'Lebaran Ketupat' yang jatuh pada hari Rabu (17/4/2024).

**T**EPAT pukul 06.30 pagi, mantan Gubernur Provinsi Gorontalo dua periode ini mengawali perayaan Lebaran Ketupat dengan melaksanakan doa sunat hari raya atau Ketupat di Masjid AlMuttaqin Desa Yosonegoro, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, yang digelar oleh warga masyarakat Jawa Tondano (Jaton).

Turut hadir bersama Fadel Muhammad, Penjabat (Pj) Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya, Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo, Forkopimda Provinsi dan Kabupaten Gorontalo, para aparaturnya, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat sekitar.

Usai melakukan doa dan saling mengucapkan selamat hari raya, Fadel Muhammad, Pj. Gubernur, dan Bupati Gorontalo secara bergantian memukul bedug tua milik masjid sebagai tanda dimulainya perayaan Lebaran Ketupat, dilanjutkan dengan menyantap kuliner khas, seperti lemong, ketupat, dan opor ayam kampung.

Dalam keterangannya, Fadel Muhammad, tokoh nasional yang gemar olahraga diving, ini mengungkapkan bahwa Lebaran Ketupat



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

adalah tradisi yang sangat baik. Untuk itu, Fadel mendorong agar tradisi ini dijaga kelestariannya dan terus ditumbuhkembangkan.

Perayaan Lebaran Ketupat di Gorontalo, lanjutnya, pertama kali digelar oleh masyarakat keturunan Jawa-Tondano (Jaton), sejak kedatangan mereka pada tahun 1909. Dari orang-orang Jawa inilah, budaya lebaran ketupat menyebar di Sulawesi.

"Tradisi ini sangat penuh makna. Di mana seluruh masyarakat Gorontalo merayakan, saling gembira, saling meminta dan memberi maaf, semua rumah terbuka lebar. Ini adalah gambaran riil karakter Indonesia yang sangat mempertahankan persatuan dan kesatuan, tidak melihat perbedaan yang ada," katanya.

Ada hal yang unik, begitu keluar Masjid Fadel Muhammad dan rombongan langsung diundang ke rumah warga untuk merayakan. Penganan khas lebaran pun tersaji kembali. Fadel Muhammad pun mengajak tuan rumah dan masyarakat yang hadir untuk kumpul dan makan bersama.

Di sepanjang jalan dari Masjid Desa Yosonegoro, Fadel Muhammad pun tak hentinya menghampiri masyarakat yang ramai berdiri di pinggir jalan, untuk sekedar bersalaman. Masyarakat antusias menyambut uluran tangan tokoh legenda hidup Gorontalo itu.

"Di momen ini saya ucapkan kepada seluruh rakyat Gorontalo dan rakyat Indonesia, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Jaga dan rawat selalu persatuan serta harmonisasi antarelemen bangsa," tandasnya. □



Halal Bi Halal PWKK dan HKJK

# Yandri Susanto : Pemilu Telah Usai, Mari Bersatu Kembali

Yandri mengajak seluruh hadirin bersatu padu mengambil peran dalam pembangunan Bengkulu. “Keberhasilan yang dicapai hari ini merupakan berkah dan doa dari orang tua dan leluhur di Bengkulu. Kita harus berperan aktif dalam pembangunan tanah kelahiran kita,” kata Yandri



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**W**AKIL Ketua MPR RI H Yandri Susanto S.Pt mengajak seluruh masyarakat Indonesia mengakhiri perdebatan seputar Pemilu 2024. Saat ini KPU telah menetapkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilu. Sehingga seluruh masyarakat diharapkan dapat mengakhiri semua

perdebatan yang berlangsung selama Pemilu.

Melalui se bait pantun Waketum PAN tersebut mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu padu melanjutkan pembangunan. “Perjalanan jauh ke batu balai, Jangan lupa mampir mandi. Pilpres 2024 telah usai, Mari kita bersatu kembali,” ujar Yandri

Yandri Susanto menyampaikan hal itu dalam acara Halal Bi Halal keluarga besar Persatuan Warga Kabupaten Kaur (PWKK) dan Keluarga Besar Himpunan Keluarga Jurai Kedurang (HKJK) se-Jabodetabek dan Banten Ahad, 28 April 2024, di Gedung Nusantara IV Komplek MPR/DPR Senayan Jakarta.



Turut hadir Ketua PWKK Laksma TNI Taufik Arif, Ketua HKJK Idian Amani, Kepala Kantor Penghubung Provinsi Bengkulu Arif Munandar, Ketua Yayasan Bai Mahdi Sholeh Ma'mun Ratu Rachmatuzakiyah, dan Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR Marisun.

Yandri menyampaikan bahwa dengan acara Halal Bi Halal diharapkan masyarakat dapat mengakhiri pertikaian dan perdebatan yang terjadi selama Pemilu. "Kita akhiri perbedaan dan kita pererat tali silaturahmi," ajak Yandri.

Dalam kesempatan tersebut, tidak lupa Yandri mengajak seluruh peserta yang hadir untuk bersatu padu mengambil peran dalam pembangunan Bengkulu. "Keberhasilan yang dicapai hari ini merupakan berkah dan doa dari orang tua dan leluhur di Bengkulu. Kita harus berperan aktif dalam



pembangunan tanah kelahiran kita," lanjut Yandri

"Jangan lupa bahwa perempuan yang

pertama kali menjahit bendera merah putih adalah Ibu Fatmawati. Putri asli Bengkulu," tutup Yandri. □

## Peletakan Batu Pertama SMP IT Kedurang

# Yandri Susanto: Lembaga Pendidikan Berperan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Lembaga pendidikan memberikan akses ke ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan dan kesejahteraan dalam kehidupan.

**W**AKIL Ketua MPR RI H Yandri Susanto S.Pt menegaskan, pentingnya kehadiran lembaga pendidikan bagi masyarakat.

Karena, pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menanggulangi kebodohan dan kemiskinan masyarakat.

"Kehadiran lembaga pendidikan diharapkan menjadi sebuah upaya untuk menanggulangi kebodohan dan kemiskinan masyarakat," ujar Yandri Susanto

Demikian disampaikan Wakil Ketua MPR H Yandri Susanto saat melakukan prosesi Peletakan Batu Pertama Pembangunan SMP IT (Islam Terpadu) Ummi Biasmawati Subarno di Palak Siring, Kedurang Bengkulu Selatan pada hari minggu 14 April 2024.

Hadir juga Wakil Bupati Bengkulu Selatan, H. Rifai Tajudin, Anggota DPRD Bengkulu Selatan Siptin Gunawan, Kepala Kemenag



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Bengkulu Selatan H Irawadi, Ketua Yayasan Bai Mahdi Sholeh Ma'mun Ratu Rachmatuzakiyah, dan Tenaga Ahli Wakil

Ketua MPR Marisun.

Dalam kesempatan tersebut, Yandri menekankan pentingnya peran lembaga



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

pendidikan mencerdaskan dan mengembangkan potensi dalam diri masyarakat. Sehingga masyarakat yang mengenyam pendidikan dapat menjadi SDM unggul.

“Lembaga pendidikan memberikan akses ke ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan dan kesejahteraan dalam kehidupan. Lahirnya

SDM yang unggul dapat membuat Indonesia menjadi negara maju,” tegas Waketum PAN Yandri Susanto.

Yandri berharap, pembangunan SMP IT Ummi Biasmawati dapat menjadi berkah bagi masyarakat Palaksiring Kedurang. Karena SMP IT ini dapat menjadi tempat penggemblengan meraih bekal ilmu

pengetahuan dan ilmu agama masyarakat.

“Semoga SMP IT Ummi Biasmawati dapat menjadi kawah candradimuka bagi masyarakat Palaksiring Kedurang. Sehingga dapat mencerdaskan masyarakat dengan memberikan bekal ilmu pengetahuan dan ilmu agama,” tutup Yandri. □

### Keraton Majapahit Jakarta

# Bamsoet Apresiasi Gagasan AM Hendropriyono Lestarkan Budaya Bangsa

**K**ETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi langkah mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono yang membangun Keraton Majapahit Jakarta, di daerah Cipayung Jakarta Timur. Keraton Majapahit Jakarta merupakan replika dari sebagian Istana Raja Majapahit yang pernah ada di Jawa Timur pada tahun 1292-1526 M.

“Keberadaan Keraton Majapahit Jakarta ini sangat dibutuhkan oleh generasi muda Indonesia untuk mempelajari sejarah bangsa Indonesia. Kejayaan Majapahit yang





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

ditampilkan kembali melalui miniatur di Keraton Majapahit Jakarta menjadi bukti bahwa kita adalah bangsa yang besar,” ujar Bamsuet usai bersilaturahmi dengan AM Hendropriyono dan berkunjung ke Keraton Majapahit Jakarta, Ahad (13/4/24).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Keraton

Majapahit Jakarta memiliki sejumlah fasilitas layaknya Keraton Majapahit sebenarnya. Antara lain, Taman Madakaripura, Pendopo Maharaja Hayam Wuruk, Balairung Mahapatih Gajah Mada, dan Alun-Alun Wilwatikta.

“Saya sendiri mendapatkan banyak informasi di Keraton Majapahit Jakarta ini. Sekaligus mereview pengetahuan sejarah

yang pernah saya miliki. Ternyata banyak yang salah dan tadi diluruskan lewat tayangan film bagaimana kerajaan Majapahit tumbuh dan berkembang di masa lalu,” kata Bamsuet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini mengajak semua anak bangsa menjaga serta melestarikan kebudayaan nasional. Terlebih, pentingnya menjaga ketahanan budaya dan memajukan kebudayaan nasional ini mempunyai dasar pijakan yang kuat, karena diatur dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada asal 32 ayat 1 dinyatakan, Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

“Untuk memastikan seni dan budaya bangsa tetap terpelihara, perlu dibangun literasi kebudayaan. Budaya bangsa menjadi legasi kesejarahan yang diwariskan. Sehingga generasi muda bangsa tidak menjadi generasi yang tercerabut dari akar budayanya sendiri, karena minimnya literasi budaya,” pungkas Bamsuet. □



Diskusi Dampak Perang Iran-Israel

# Lestari: Potensi Konflik Global Berkelanjutan Harus segera Diantisipasi

Perlu langkah antisipasi dampak berkelanjutan konflik global melalui berbagai kebijakan sebagai bagian upaya meningkatkan daya tahan perekonomian nasional.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**K**ONFLIK Israel Iran dapat berdampak pada sektor energi nasional dan menimbulkan potensi risiko terhadap pasar komoditas global. Sejumlah kebijakan antisipatif harus dipersiapkan untuk meredam dampak itu terhadap kinerja perekonomian nasional,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam sambutan tertulisnya pada diskusi daring bertema Setelah Iran Menyerang Israel: Dampak Geopolitik dan Ekonomi, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (24/4).

Diskusi yang dimoderatori Luthfi Assyaukanie, Ph.D., (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu, menghadirkan Abdul Kadir Jailani (Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri RI), Jaleswari Pramodhawardani (Pengamat Militer), Broto Wardoyo, Ph.D., (Dosen Hubungan Internasional, Universitas Indonesia), dan Esther Sri Astuti (Direktur Eksekutif INDEF/Institute for Development of Economics and Finance) sebagai narasumber. Selain itu hadir pula Muhammad Farhan (Anggota Komisi I DPR RI) sebagai

penanggung.

Menurut Lestari, meskipun dampak langsung dari konflik global terhadap pasar komoditas relatif tidak terlalu besar, ketegangan geopolitik yang sedang berlangsung dan respons kebijakan setiap negara akan terus memengaruhi sentimen investor dan mendorong fluktuasi pasar.

Rerie, sapaan akrab Lestari berpendapat, kita harus mengakui bahwa kondisi ekonomi nasional terkini tidak dalam kondisi ideal, sehingga membutuhkan kebijakan antisipatif menyikapi eskalasi konflik global.

Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah mendorong agar langkah diplomasi politik dan ekonomi segera dilakukan dalam upaya meredakan konflik yang terjadi.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap, semua pihak dapat mengambil langkah yang tepat dalam mengantisipasi dampak gejala dan tantangan global, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur di masa datang.

Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika,

Kementerian Luar Negeri RI, Abdul Kadir Jailani, mengungkapkan, ketegangan antara Iran dan Israel merupakan situasi yang sangat bahaya, karena rawan terjadi salah perhitungan yang berpotensi timbulkan perang di kawasan Timur Tengah.

Di dalam dunia yang sangat terkait, ujar Abdul Kadir, konflik di Timur Tengah itu berpotensi berdampak pada ekonomi nasional. Karena, tambah dia, kemungkinan yang akan terjadi adalah terjadinya disrupsi pada perairan dunia di Laut Merah yang akan mengganggu rantai pasok perdagangan global. Pada konflik Ukraina-Rusia saja yang relatif jauh dari Indonesia, tegas Abdul Kadir, berdampak besar pada perekonomian nasional.

Abdul Kadir berpendapat, kemungkinan yang akan terjadi dalam konflik Iran-Israel adalah aksi blokade Selat Hormuz yang merupakan hub dari perdagangan minyak dunia. Sehingga, jelas dia, bila terjadi perang kawasan akan berdampak pada meningkatnya harga minyak dunia.

Bila harga minyak dunia meningkat drastis, tegas Abdul Kadir, potensi gangguan ekonomi akan berdampak pada kenaikan harga BBM di dalam negeri, kenaikan harga komoditas, ekspor ke Timur Tengah dan Eropa berpotensi terganggu dan melemahnya nilai tukar rupiah.

Meski semua kemungkinan di atas belum terjadi, Abdul Kadir menegaskan, Indonesia harus mempersiapkan skenario terburuk untuk menghadapi atau menjawab berbagai tantangan tersebut.

Abdul Kadir mengungkapkan, Indonesia juga konsisten mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera bereaksi mengakhiri pendudukan Israel di Palestina dalam upaya menekan ketegangan di Timur Tengah.

Pengamat Militer, Jaleswari Pramodhawardani mengungkapkan, kondisi dunia semakin dipenuhi dengan ketidakpastian. Instabilitas politik dan

volatilitas ekonomi, tambah Jaleswari, menjadi faktor pendorong situasi yang memburuk.

Menurut dia, dalam satu dekade terakhir terjadi penguatan intensitas konflik global di berbagai wilayah mulai dari Eropa hingga Timur Tengah. Di tengah konflik global yang terjadi saat ini, ujar Jaleswari, Indonesia dinilai masih memiliki risiko menengah-rendah. Meski begitu, tambah dia, konflik global harus segera diantisipasi.

Dia berpendapat, perang kawasan akan terjadi bila negara-negara Arab mulai terlibat mendukung Iran atau Israel. Keterlibatan Arab Saudi dalam perang Iran-Israel diakui Jaleswari akan menegaskan terjadinya perang di kawasan.

Dosen Hubungan Internasional, Universitas Indonesia, Broto Wardoyo, Ph.D mengungkapkan, hubungan antara Iran dan Israel sejak 1975 hingga 2024 tidak pernah ada fase tenang. Broto menegaskan, konflik yang terjadi antara Iran-Israel tidak terlepas

dari pendudukan Israel di Palestina.

Dalam konflik dengan Iran, ujar Broto, Israel menjalankan sejumlah operasi intelejen yang menasar para Jenderal pengambil keputusan di Iran, serta kelompok-kelompok proxy Iran. Langkah Israel itu, jelas Broto, dijawab oleh Iran dengan operasi militer terbatas melalui serangan terhadap pusat militer Israel dan Amerika Serikat.

Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti mengungkapkan, kondisi perekonomian Indonesia tidak terlepas dari global shock di sektor politik dan keamanan. Menurut Esther, konflik yang melibatkan sejumlah negara Timur Tengah, yang merupakan produsen minyak dunia, tentu saja berpotensi mengganggu pasokan. Apalagi, tambah dia, negara-negara di Timur Tengah memproduksi 13 juta barel per hari. Esther sangat berharap, konflik Iran-Israel tidak meluas dan hanya limited war, agar tidak berdampak luas bagi Indonesia.

Anggota Komisi I DPR RI, Muhammad

Farhan berpendapat, konflik di Timur Tengah adalah konflik geopolitik yang menggunakan motivasi agama. Pendudukan Israel di Palestina, ujar Farhan, salah satu tujuannya adalah untuk memberi ruang lebih luas bagi kelompok Yahudi. Aksi tersebut, jelas Farhan, mendapat perlawanan dari kelompok-kelompok Islam di Timur Tengah yang belum bersatu.

Dalam upaya mencegah dampak konflik di Timur Tengah meluas ke perekonomian nasional, Farhan berharap, pemerintahan yang baru pada tahun pertamanya harus segera merealisasikan janjinya untuk memberikan bantuan sosial, bantuan langsung tunai (BLT) dan program makan siang gratis. Setidaknya, jelas Farhan, langkah tersebut dapat menekan biaya konsumsi masyarakat.

Selain itu, Farhan juga berharap, pemerintahan baru konsisten merealisasikan peningkatan investasi dengan tetap mengedepankan hak-hak masyarakat adat. □

## Art Jakarta Gardens 2024

# Bamsoet: Jangan Hanya Berhenti di Hutan Kota Plataran

Dapat memberikan pengalaman memukau kepada para pengunjung, karena dapat menggabungkan seni dan alam.

**K**ETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi tersegenggaranya Art Jakarta Gardens 2024 di Hutan Kota, Plataran, 23-28 April 2024. Kegiatan ini menghadirkan berbagai karya dari seniman terkemuka dari berbagai generasi, seperti Loris dan Lara Marino dari generasi Z hingga maestro modern Indonesia G. Sidharta, Nyoman Nuarta, seniman lainnya dengan eksperimen kreatif seperti Dian Hardiansyah dan Lara Marino dari Switzerland.

“Sejak dimulai pada tahun 2022, Art Jakarta Gardens telah berkembang menjadi acara seni tahunan yang dinanti para pecinta dan penggemar seni. Kali ini menampilkan 23 galeri terkenal serta 30 patung dan instalasi luar ruangan yang menawan.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Sehingga dapat memberikan pengalaman memukau kepada para pengunjung karena

dapat menggabungkan seni dan alam,” ujar Bamsoet usai menghadiri Art Jakarta Gar-



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

dens 2024, di Hutan Kota Plataran, Jakarta, Jumat (26/4/24).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, kehadiran Art Jakarta Gardens yang rutin diselenggarakan setiap tahun, telah memberikan ruang bagi para seniman untuk menampilkan berbagai karyanya. Sekaligus turut memperkaya acara seni dan hiburan bagi masyarakat di Jakarta dengan latar belakang perkotaan di Hutan Kota by Plataran yang diubah menjadi galeri terbuka yang dinamis.

“Art Jakarta Gardens juga mendorong lebih banyak korporasi untuk berkolaborasi dengan seniman Indonesia, baik dalam event tahunan Art Jakarta Gardens maupun proyek lainnya. Sehingga dapat menambah dukungan yang lebih kuat terhadap ekosistem seni,” jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI

dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, event seperti ini jangan hanya berhenti di Hutan Kota Plataran saja. Melainkan juga harus diikuti oleh berbagai korporasi di daerah lain, dengan memanfaatkan ruang-ruang terbuka hijau yang ada di setiap daerah.

“Apresiasi kita terhadap karya seni anak negeri adalah bentuk keberpihakan terhadap penguatan kedaulatan budaya bangsa,” ujar Bamsoet. Maka, menurut Bamsoet, penyelenggaraan event seperti Art Jakarta Gardens yang dimulai pada transisi pandemi Covid, menyiratkan sebuah pesan penting bahwa pandemi tidak boleh mengendurkan semangat, melemahkan hati, dan memasung pikiran kita untuk tetap bekerja dan berkarya.

Karenanya event ini harus tetap rutin terselenggara, sekaligus menyebar ke berbagai daerah lainnya,” pungkas Bamsoet. □



**Implementasi Sila-sila Pancasila**

- Berhenti saling menyakiti, mulailah saling menghargai
- Berhenti saling merendahkan, mulailah menghormati perbedaan
- Berhenti takabur, mulailah bersyukur
- Stop marah-marah, mulailah bersikap ramah
- Berhenti memaki, mulailah memakai hati
- Berhenti curiga, mulailah menyapa.
- Berhenti berseteru, mulailah bersatu
- Berhenti memaksakan, mulailah berkorban
- Berhenti mencari perbedaan, mulailah bergandeng tangan
- Berhenti silang pendapat, mulailah mencari muafakat
- Berhenti besar kepala, mulailah berlapang dada
- Berhentilah bersilat lidah, mulailah bermusyawarah
- Berhenti malas, mulailah bekerja keras
- Stop diskriminasi, mulailah toleransi
- Berhenti menang sendiri, mulailah berbagi

**EMPAT PILAR MPR RI**

Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara  
 UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara  
 NKRI Sebagai Bentuk Negara  
 Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Sembayan Negara

## Kuliah Pembaruan Hukum Program Doktor

# Bamsoet Dorong Penyempurnaan UU Pemilu

Berbagai pandangan mengindikasikan bahwa perlu adanya evaluasi untuk menyempurnakan sistem Pemilu, baik dari segi peraturan maupun teknis di lapangan.

**K**ETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar serta dosen tetap Pascasarjana Universitas Borobudur, Trisakti, dan Universitas Pertahanan RI (UNHAN) Bambang Soesatyo mengungkapkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) masih menyisakan pekerjaan rumah bagi parlemen dan pemerintah yang akan datang. Salah satunya terkait perbaikan aturan main dalam Pemilu (legislatif dan presiden-wakil presiden). Selain putusan PHPU, ada juga beberapa putusan MK terkait uji materi UU Pemilu yang harus ditindaklanjuti.

Begitupun dengan pandangan berbagai pihak dan pendapat para ahli yang juga bisa menjadi masukan berharga dalam melakukan pembaruan hukum nasional agar penyelenggaraan Pemilu semakin demokratis. Misalnya, pandangan presiden terpilih Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia berisik dan melelahkan. Serta pandangan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang menilai politik semakin mahal.

"Berbagai pandangan tersebut mengindikasikan bahwa perlu adanya evaluasi untuk menyempurnakan sistem Pemilu, baik dari segi peraturan maupun



teknis di lapangan," ujar Bamsoet saat mengajar mata kuliah Pembaruan Hukum Nasional dengan Nilai Demokrasi, Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Borobudur, di Jakarta, Sabtu (27/4/24).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, secara umum

dari berbagai putusan MK dan hasil evaluasi Pemilu dan Pilkada dari berbagai kalangan, ada beberapa hal yang perlu disempurnakan dalam UU Pemilu yang akan datang. Antara lain, terkait sistem Pemilu, ambang batas parlemen, ambang batas pencalonan presiden - wakil presiden, besaran kursi per dapil, konversi suara menjadi kursi, keserentakan Pemilu, digitalisasi, hingga biaya politik yang mahal.

"Ada baiknya penyempurnaan UU Pemilu tersebut selesai pada awal masa pemerintahan yang akan datang. Jika selesai di tahun 2025 atau 2026, maka partai politik dan penyelenggara Pemilu serta pihak terkait lainnya memiliki cukup waktu melakukan sosialisasi dan persiapan hingga pelaksanaan Pemilu 2029," jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum UNPAD dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sejak tahun 2017 sudah melakukan kajian yang menekankan perlunya negara hadir memberikan dukungan terhadap pendanaan partai politik. Sehingga partai politik tidak tersesat dalam memenuhi kebutuhan operasionalnya.

Idealnya, per suara sah yang didapatkan partai politik dikompensasi Rp 16.922. Dari kebutuhan ideal tersebut, setidaknya menurut KPK dan LIPI, negara bisa memenuhi 50%-nya, yakni sekitar Rp 8.461 per suara. Saat ini, berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 2018, negara hanya memberikan bantuan pendanaan kepada partai politik sebesar Rp 1.000 per suara sah.

"Hasil kajian KPK dan LIPI tersebut sangat menarik untuk dielaborasi lebih jauh, sehingga partai politik tidak lagi terjebak dalam oligarki. Membersihkan partai politik dari torpedo oligarki kekuatan uang juga akan berefek pada kualitas pengambilan keputusan politik dalam melayani kepentingan rakyat yang lebih besar," pungkas Bamsoet. □



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

## Membahas Tentang Rancangan Peraturan MPR



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Anggota Badan Pengkajian MPR dan sejumlah guru besar, serta dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar secara bersama membahas mengenai draf tata tertib MPR. Disebut kedudukan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki peran penting bagi perkembangan dan kemajuan bangsa. Jadi, begitu strategisnya peran MPR dalam demokrasi perwakilan di Indonesia

**B**ERTEMPAT di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kelompok V Badan Pengkajian MPR bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (FH Unhas) mengadakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD). Kegiatan yang digelar pada 2 April 2024 itu bertema *Pembahasan (Uji Sahih) Draft Tata Tertib MPR*.

FGD diikuti, dari Badan Pengkajian MPR, yakni Ketua V, Ajbar (anggota MPR dari Kelompok DPD) dan para anggota Kelompok V, yaitu Drs. Supriyanto (Fraksi Partai Gerindra), H. Ferdiansyah, S.E., M.M., (Fraksi Partai Golkar), Hj. Sri Wulan, S.E., (Fraksi Partai Nasdem), dan Ir. H. Marwan Cik Asan, M.M., (Fraksi Partai Demokrat).

Sedang dari FH Unhas, hadir Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H.; Prof. Dr. Syamsul Bachrie, S.H., M.S.; Prof. Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H.; dan Fajlurrahman Jurdi, S.H., M.H.

Dalam makalah yang dipresentasikan dengan judul *Beberapa Catatan Tentang Rancangan Peraturan MPR*, Abdul Razak mengatakan, kedudukan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki peran penting bagi perkembangan dan kemajuan bangsa.

Konstruksi ketatanegaraan Indonesia menempatkan MPR sebagai lembaga negara joint session DPR dan DPD, memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan UUD (*The Making of the Constitution*) sekaligus sebagai lembaga negara yang merepresentasikan seluruh kehendak rakyat, serta penjaga kepentingan masyarakat (*The Guardian of The Public Interest*). Begitu strategisnya peran MPR dalam demokrasi perwakilan di Indonesia.

Lebih lanjut disebut, di samping berwenang dalam mengubah dan menetapkan UUD, MPR juga diberikan kewenangan konstitusional lainnya yang bersifat strategis. Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Diterangkan oleh Guru Besar Hukum Administrasi Negara itu, MPR memiliki kewenangan, antara lain: 1) Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden; 2) Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar; 3) Memilih



Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden, dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden; 4) Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, dari 2 (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya; 5) Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti,

diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan.

Menurut Ketua Asosiasi Pengajar HTN-HAN Sulawesi Selatan itu, kewenangan dan tugas MPR yang sangat strategis tersebut perlu dilengkapi dengan tata tertib MPR yang lebih komprehensif. Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib MPR yang ada perlu menyesuaikan dengan dinamika dan perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia. Penyusunan dan penyempurnaan tata tertib ini diperlukan agar pelaksanaan wewenang dan tugas konstitusional MPR dapat diselenggarakan dengan baik dan tertib. Khususnya, pada beberapa isu krusial dalam rancangan Tata Tertib MPR, diantaranya: 1). Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden; 2). Produk hukum/jenis putusan MPR; 3). Penguatan kewenangan MPR dalam merumuskan Pokok-Pokok Haluan Negara/PPHN dalam bentuk Ketetapan MPR; 4) Sidang Tahunan MPR; 5) Perubahan UUD NRI Tahun

1945; serta beberapa isu krusial lainnya.

Dalam isu Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, MPR perlu mengeluarkan Ketetapan bersifat penetapan (*beschikking*) yang menetapkan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden terpilih.

Dalam isu produk hukum/jenis putusan MPR, MPR setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945 tidak lagi memiliki kewenangan membuat ketetapan MPR yang bersifat pengaturan (*regeling*), tetapi dalam Peraturan Tata Tertib MPR No 1/2019 justru mengatur ketetapan MPR yang bersifat pengaturan (*regeling*). MPR masih memiliki kewenangan membuat Ketetapan MPR yang bersifat penetapan (*beschikking*), tetapi justru dalam peraturan Tata Tertib MPR tidak mengatur mengenai Ketetapan MPR yang bersifat penetapan (*beschikking*). Penggunaan istilah/kata/nomenklatur “Keputusan” juga mesti dikaji kembali, apakah tetap menggunakan nomenklatur “Jenis Keputusan MPR” atau “Jenis Putusan MPR”?



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Dalam isu Penguatan kewenangan MPR dalam merumuskan Pokok-Pokok Haluan Negara/PPHN dalam bentuk Ketetapan MPR mesti dirumuskan secara hati-hati agar tidak bertentangan atau berbenturan secara norma dengan UUD NRI Tahun 1945. Dalam isu Sidang Tahunan MPR, yang selama ini menjadi konvensi ketatanegaraan yang terus terpelihara dengan baik, serta memberi warna tersendiri dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, dirasa perlu dikembangkan sebuah konvensi ketatanegaraan bahwa MPR sebagai lembaga negara yang memiliki unsur keterwakilan tertinggi, merepresentasikan unsur rakyat dan unsur daerah, karena terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD, untuk

memberikan evaluasi dan rekomendasi atas laporan masing-masing lembaga negara guna perbaikan kinerja dalam setahun ke depan.

Kemudian dalam isu perubahan UUD NRI Tahun 1945, beberapa isu spesifik perlu dicermati dan dirumuskan dengan baik terkait beberapa hal, misalnya: bagaimana mengatur kewenangan Panitia Ad Hoc dalam mengkaji usul perubahan Undang-Undang Dasar dari Pengusul; bagaimana mengatur kewenangan Panitia Ad Hoc dalam mengkaji usulan pasal-pasal perubahan apabila ditemukan kaitan dengan pasal lain meskipun tidak termasuk pasal-pasal yang diajukan oleh Pengusul; bagaimana

mengatur laporan Panitia Ad Hoc dalam mengkaji usul perubahan Undang-Undang Dasar dari Pengusul; dan bagaimana mengatur Materi Muatan yang perlu dilakukan perubahan bagi perbaikan demokrasi dan sistem ketatanegaraan di masa datang.

Anshori Ilyas dalam kesempatan itu menjelaskan, Peraturan MPR sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Diterangkan, Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, terdiri atas: (a). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b). Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c). Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (d). Peraturan Pemerintah; (e). Peraturan Presiden; (f). Peraturan Daerah Provinsi; dan (g). Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Disampaikan, peraturan MPR sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Diungkap dalam ketentuan Pasal 8 mengatur bahwa Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, ... Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. □



# Masih Ada Tap MPR yang Berlaku

Sekalipun MPR tidak lagi memiliki kewenangan membentuk ketetapan, namun masih terdapat kategori TAP MPR yang sampai saat ini masih tetap berlaku, dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak dapat dicabut maupun diganti dengan undang-undang.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**F**AJLURRAHMAN Jurdi dalam makalah yang dipresentasikan di FGD mempertanyakan, di dalam hierarki di mana posisi Peraturan MPR? Pertanyaan itu dijawab, jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat (Pasal 9 ayat 1 UU No. 12/2011).

Sedang Syamsul Bachri dalam makalah

mengatakan, MPR tidak lagi memiliki kewenangan membuat TAP MPR maka urutan peraturan perundang-undangan, substansinya telah diatur dalam UU Nomor 10 tahun 2004, Tap MPR Tidak masuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, namun tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat berdasarkan Tap MPR RI No: 1/MPR/2003 yang diakui berdasarkan Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan UUD 1945. Kemudian UU ini selanjutnya diganti dengan UU Nomor 12 Tahun 2011.

MPR tidak lagi memiliki kewenangan membuat TAP MPR maka urutan peraturan perundang-undangan, substansinya telah diatur dalam UU Nomor 10 tahun 2004, yang selanjutnya diganti dengan UU Nomor 12 Tahun 2011.

Sekalipun MPR tidak lagi memiliki kewenangan mementuk ketetapan, namun masih terdapat kategori TAP MPR yang sampai saat ini masih tetap berlaku, dan

memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak dapat dicabut maupun diganti dengan undang-undang, serta kategori TAP MPR yang masih tetap berlaku dan tidak dapat dicabut atau diganti dengan undang-undang, yaitu: (1). TAP MPRS Nomor: XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah NKRI. Bagi Partai Komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham ajaran Komunis/Marxisme, Leninisme dan; (2). TAP MPR Nomor: XVI/MPR/1998 tentang Politik ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi.

Serta Tap MPR yang masih berlaku sepanjang belum diatur dalam UU, di antaranya (1). Tap MPRS Nomor XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera; (2). Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi, dan Nepotisme.

Sedang Abdul Razak mengatakan, Peraturan MPR No 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib MPR memang perlu disesuaikan kembali dengan dinamika dan perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia. Karena menyangkut "Tata Tertib" maka isi dan substansi yang diatur dalam Peraturan MPR tersebut benar-benar "menata secara tertib, baik tertib asas dan tertib norma, hal-hal yang menjadi kewenangan konstitusional MPR" dalam bentuk Tatib.

Kemudian terkait dengan draf Tatib, beberapa rumusan norma dalam draf tersebut ada yang sudah sesuai, dan ada juga yang perlu dikoreksi secara redaksional. Dasar hukum pada konsideran, mengingat UUD NRI Tahun 1945 terlalu jauh, cukup undang-undang yang menjadi dasar hukum, yaitu; (1). UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (2). UU MD3, (3). UU Pemilu No 7 Tahun 2017. □



**Dr. H. Bambang Soesatyo, SE., SH., MBA.**

Ketua MPR RI

## Mencermati Dampak Eskalasi Ketegangan di Timur Tengah

**D**URASI dan skala dari konflik Iran-Israel tak sekadar mengeskalisasi ketidakpastian, namun juga memengaruhi perubahan dinamika global di hari-hari mendatang. Komunitas internasional, secara tidak langsung, dipaksa untuk mencermati dengan seksama arah konflik kedua negara itu. Mau tak mau, Indonesia pun harus berusaha akurat mengidentifikasi ragam persoalan baru, termasuk memprediksi skenario terburuk dari eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah itu.

Di dalam negeri, Indonesia sudah menambah bobot kepastian ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada Rabu (24/4), menetapkan Presiden-Wakil Presiden terpilih dari Pemilihan Presiden 2024. Penerus kepemimpinan nasional untuk periode 2024-2029 adalah pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil Presiden. Dengan terwujudnya kepastian ini, Indonesia bisa lebih fokus dan cermat menyoroti dampak eskalasi ketegangan di kawasan Timur Tengah yang disulut oleh konflik Iran dan Isreal.

Sudah pasti bahwa Indonesia bersama komunitas internasional berharap dan terus berusaha mendorong, baik Iran maupun Israel, untuk menahan diri dengan tidak mengeskalisasi konflik mereka menjadi perang terbuka menggunakan persenjataan yang dapat menyebabkan kematian massal. Dalam konteks mencegah bencana kemanusiaan akibat konflik kedua negara itu, kontribusi Indonesia melalui pendekatan laku politik luar negeri bebas-aktif tentunya juga dibutuhkan.

Sebab, besar-kecilnya skala konflik kedua negara

itu akan selalu menghadirkan ekkses. Dan, Indonesia bersama banyak negara pun sudah menerima ekkses itu, yang antara lain ditandai dengan naiknya harga minyak. Indonesia, misalnya, harus mencari bahan bakar minyak (BBM) yang murah agar tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun berjalan tidak berlebihan, utamanya pada pos anggaran subsidi BBM.

Selain dampak kenaikan harga minyak mentah, sudah menjadi fakta bahwa Indonesia pun sedang menghadapi lonjakan nilai tukar valuta dolar Amerika Serikat (AS) atau depresiasi rupiah. Proses penguatan nilai tukar dolar AS sudah berlangsung dalam beberapa bulan terakhir ini, dan memuncak pada April 2024 ketika memasuki level di atas Rp 16.000 per dolar AS. Menguatnya nilai tukar dolar AS selalu menghadirkan tekanan terhadap APBN, utamanya belanja dan subsidi BBM maupun membengkaknya beban bunga pembayaran utang luar negeri.

Maka, seperti halnya banyak negara lain, Indonesia pun harus fokus mencermati ekkses atau dampak negatif dari konflik Iran-Israel, termasuk skenario terburuk dari ketegangan di kawasan Timur Tengah. Sebab, disharmoni antarnegara di kawasan itu berpotensi memperbesar skala konflik. Disharmoni itu setidaknya tercermin pada fakta bahwa konflik Israel-Hamas masih berlangsung hingga saat ini, yang menyebabkan penderitaan warga Palestina. Konflik ini terkesan berlarut-larut karena tidak banyak negara di kawasan itu berinisiatif atau mengambil peran mengakhiri konflik itu. Palestina terkesan dibiarkan sendirian, bahkan beberapa negara di kawasan itu menolak para pengungsi dari Palestina.

Selain peduli pada aspek kemanusiaan, fokus mencermati dampak negatif dari eskalasi ketegangan di kawasan Timur Tengah semata-mata bertujuan memampukan Indonesia meminimalisir eksekusi dari ragam persoalan yang mengemuka dan tak dapat dihindarkan. Contoh kasusnya adalah dampak kenaikan harga minyak mentah dan dampaknya terhadap proses pelemahan rupiah. Eskalasi ketegangan di Timur Tengah saat ini pun dipastikan mengganggu rantai pasok global.

Depresiasi rupiah selalu menyebabkan nilai impor BBM otomatis membengkak dalam skala yang bisa signifikan. Harga energi yang mahal akan menggelembungkan biaya produksi di sektor industri dan jasa. Kenaikan harga bahan baku industri pun terhindarkan. Dampak lanjutannya adalah kenaikan harga barang dan jasa, termasuk produk impor. Harga bahan pangan pun pasti mengalami kenaikan. Ketika nilai pendapatan masyarakat tetap, kenaikan harga barang dan jasa akan memperlemah daya beli atau konsumsi masyarakat, dengan dampak lanjutan adalah percepatan laju inflasi.

Memasuki pekan ketiga April 2024, harga minyak mentah dunia sudah melonjak. Harga minyak mentah Brent naik 3,5% menjadi 90,14 dolar AS per barel. Sedangkan minyak West Texas Intermediate (WTI) naik 3,61% menjadi 85,80 dolar AS per barel. Sementara itu, dari posisi rupiah yang kini di level Rp 16.000-an per dolar AS, fluktuasinya di waktu-waktu mendatang dipengaruhi oleh dua faktor, yakni kebijakan bank sentral AS, Federal Reserve (Fed), memperlakukan suku bunga acuan, serta durasi dan skala dari konflik Iran-Israel.

Seperti sudah diketahui semua orang, Fed saat ini menerapkan kebijakan suku bunga tinggi. Sedangkan konflik Iran-Israel telah mendorong investor menarik dana dari Indonesia dan negara lainnya. Likuiditas valuta dolar AS yang menipis di dalam negeri serta kebutuhan dolar AS yang menjadi lebih besar untuk impor BBM menyebabkan nilai tukar dolar AS terus menguat.

Gambaran yang diberikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tutuka Ariadji, akan membantu semua orang lebih memahami permasalahannya. Dia jelaskan bahwa setiap kenaikan harga minyak mentah dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan berdampak pada kenaikan belanja subsidi energi. Setiap kenaikan satu (1) dolar AS harga minyak mentah berkonsekuensi pada beban subsidi dan kompensasi energi dengan kenaikan sekitar Rp 4,5 triliun. Dan, setiap melemahnya kurs rupiah Rp 100 per dolar AS berdampak pada kenaikan subsidi energi sekitar Rp 2,5 triliun hingga Rp 3,5 triliun.

Sedangkan rata-rata konsumsi BBM nasional dari tahun ke tahun terus meningkat. Per tahunnya, Indonesia butuh tak kurang dari 72 juta kiloliter (KL) BBM. Sayangnya, volume produksi di dalam negeri hanya 39 juta KL. Maka, sisanya harus impor. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai impor BBM pada 2022 mencapai 24,07 miliar dolar AS, naik 67% jika dibandingkan nilai impor 2012 yang 14,39 miliar dolar AS.

Menurut BPS, gelembung nilai impor BBM per 2022 disebabkan naiknya harga minyak dan produk minyak. Dari catatan historis ini, siapa pun bisa membuat asumsi tentang beratnya tekanan terhadap APBN tahun berjalan, utamanya pada pos belanja dan subsidi BBM.

Selain persoalan BBM, ketidakpastian sekarang ini juga akan memengaruhi harga bahan pangan di pasar dunia. Dampaknya akan dirasakan konsumen di dalam negeri, karena Indonesia masih impor sejumlah komoditas pangan seperti beras, gandum, gula, daging, jagung hingga kedelai. BPS mencatat bahwa ada kenaikan signifikan nilai impor komoditas pangan di sepanjang tahun 2023.

Tentang durasi dan skala konflik Iran-Israel memang belum dapat diperkirakan. Bagi banyak negara, jauh lebih penting adalah mengkalkulasi dampak konflik itu, utamanya terhadap aspek perekonomian global. Presiden Joko Widodo bersama para menteri pasti bekerjasama dengan tim transisi presiden-wakil presiden terpilih (Prabowo-Gibran) untuk fokus mencermati ragam persoalan yang muncul akibat eskalasi ketegangan di kawasan Timur Tengah. □

## Sarasehan Kehumasan MPR

# Fadel Muhammad Sapa Sahabat Rakyat Gorontalo di Momen Idulfitri 1445 H



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**W**AKIL Ketua MPR RI Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad mengungkapkan bahwa momen perayaan Lebaran Ketupat dalam rangka Hari Raya Idulfitri 1445 H adalah saat yang tepat bagi seluruh elemen bangsa untuk kembali introspeksi diri dan merenung tentang bagaimana semua bersama-sama, bersatu, demi mewujudkan kesejahteraan bersama.

“Kita sebenarnya harus bersyukur sebagai bangsa Indonesia, dianugerahi karakter dan jati diri yang sangat menjunjung tinggi persaudaraan dan kebersamaan. Di tambah lagi, banyak sekali tradisi luar biasa yang mendukung terwujudnya hal itu, salah satunya tradisi Lebaran Ketupat ini,”

katanya.

Hal tersebut disampaikan Pimpinan MPR dari Kelompok DPD RI ini saat menjadi narasumber utama acara Sarasehan Kehumasan MPR RI bertema: ‘Membangun Komunitas yang Kuat dengan Cara Mempererat Silaturahmi dan Persaudaraan’, diselenggarakan oleh MPR RI bekerjasama dengan Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (GPMI) Provinsi Gorontalo, di Kota Gorontalo, Selasa (16/4/2024).

Lebih jauh, anggota DPD Dapil Provinsi Gorontalo ini menjabarkan bahwa kebersamaan yang ada pada tradisi Lebaran Ketupat sesuai dengan implementasi dari Empat Pilar MPR RI, yakni Pancasila, UUD NRI

Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

“Pada intinya, saya sangat apresiasi sekali penyelenggaraan kegiatan Sarasehan Kehumasan MPR RI ternyata banyak diikuti oleh generasi muda. Generasi muda memang sudah semestinya memahami tentang kebangsaan, salah satunya seputar lembaga MPR RI sebagai rumah besarnya rakyat,” tandasnya.

Seperti diketahui, Sarasehan Kehumasan MPR RI adalah program kegiatan MPR dengan tujuan untuk lebih memperkenalkan lembaga MPR RI dan semua produk-produknya. Sasaran atau target peserta adalah seluruh elemen masyarakat terutama generasi muda bangsa. □



## Disemai dan Dibesarkan oleh Pandiri Bangsa

Dalam sejarahnya, gerakan kepanduan di Indonesia dipandang penting oleh para pendiri bangsa. Pada masanya, Mankunegaran, Syarekat Islam, Muhammadiyah, Budi Utomo, Jong Java, dan organisasi pergerakan lainnya membentuk organisasi pandu untuk anggotanya. Ketika istilah ‘padvinder’ dilarang oleh Pemerintah Hindia-Belanda, tokoh bangsa KH Agus Salim menggantikannya dengan istilah ‘pandu’. Presiden Soekarno, sebagai presiden pertama Indonesia, pun ikut ‘cawe-cawe’ dalam soal kepanduan ini. Ia menunjuk Sri Sultan Hamengku Buwono IX untuk mengurus organisasi pandu di tanah air. Di tangan Raja Jawa itulah muncul istilah ‘Pramuka.’ Dan, istilah itu masih digunakan hingga saat ini.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**K**ETIKA Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyatakan, sekolah tetap wajib menyediakan ekstrakurikuler (ekskul) Pramuka bagi siswa-siswi sekolah menengah (SMP-SMA), namun keikutsertaan siswa-siswi bersifat sukarela (tidak wajib). Kebijakan yang dituangkan lewat Peraturan Mendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah itu pun menimbulkan reaksi. Berbagai pihak menyayangkan, dan bahkan menolak Permen tersebut.

Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka, Budi Waseso, di *tempo.co*, 5 April 2024, meminta Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 yang menempatkan Pramuka sebagai kegiatan yang dapat dipilih dan diikuti sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat peserta didik, segera dicabut. Dia mengingatkan, Pramuka sudah ada sejak zaman kemerdekaan. "Oleh sebab itu, menurut saya, Permen itu harus dicabut," ujarnya di media online itu.

Sikap yang sama juga dikatakan oleh para anggota Komisi X DPR. Dalam berbagai

kesempatan, bahkan saat Rapat Kerja Komisi X dengan Mendikbudristek, mereka menyayangkan sikap yang diambil oleh kementerian itu. Anggota Komisi X dari Fraksi PAN, Prof. Dr. Zainuddin Maliki, M.Si., mengatakan, kebijakan yang aneh, karena ekskul Pramuka selama ini tidak ada masalah. "Sejauh ini tidak ada yang mengeluh dengan kewajiban sekolah harus menyelenggarakan ekskul Pramuka," tuturnya. Anggota Komisi X dari Fraksi PKB

yang sekaligus juga Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda, menyebut, kebijakan Kemendikbudristek yang mencabut Pramuka sebagai ekskul wajib sekolah bersifat *kebablasan*.

Anggota Komisi X dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah, menganggap mungkin pemahaman menteri terkait Pramuka tidak utuh. Dia menyebut, dalam memahami Pramuka yang diingat oleh Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim hanya Jurit Malam.



Zainuddin Maliki dan Nadiem Anwar Makarim



Syaiful Huda

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

“Padahal Pramuka bukan hanya Jurit Malam. Banyak nilai dari Pramuka, seperti ketrampilan membaca peta, interaksi sosial dengan masyarakat, dan nilai-nilai positif lainnya,” ungkapnya.

Mengapa semua kompak ‘menolak’ Permen Menteri tersebut? Karena banyak yang mengakui bahwa kegiatan Pramuka memberi banyak manfaat positif bagi para siswa. Di sana banyak nilai yang ditanamkan. Wakil Ketua Komisi X, Hetifah Sjaifudian, menyebut, Pramuka tidak hanya memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan karakter siswa, tetapi juga membantu memperkuat rasa nasionalisme, keterampilan kepemimpinan, kerjasama tim, dan kesadaran akan lingkungan serta kepedulian sosial.

Banyak yang ‘menolak’ Pramuka menjadi kegiatan yang tidak wajib dengan argumen, selain bangsa ini akan kehilangan media pembentuk karakter anak bangsa, kegiatan Pramuka juga mempunyai andil dalam sejarah pergerakan bangsa.

Dari berbagai catatan yang dikumpulkan oleh penulis, gerakan Pramuka di tanah air dimulai dari kegiatan kepanduan milik pemerintah kolonialisme Hindia-Belanda yang bernama *Nederlandesche Padvinders Organisatie* (NPO). *Padvinder* (pandu atau kepanduan) itu didirikan pada tahun 1912. Sebagai cabang gerakan *padvinder* yang pusatnya di Belanda, pada tahun 1916, NPO mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan wilayah jajahannya sehingga namanya diganti menjadi *Nederlands Indische*

*Padvinders Vereniging* (NIVP).

Hadirnya *padvinder* di bawah pembinaan pemerintahan penjajah itu memancing pemerintahan lokal, organisasi pergerakan, dan organisasi keagamaan melakukan hal yang sama, yakni membentuk gerakan *padvinder*. Di tahun 1916, Mangkunegara VII mendirikan *Javaansche Padvinders Organisatie* (JPO). Munculnya JPO memancing organisasi-organisasi pergerakan dan keagamaan, pada masa itu, melakukan hal yang sama, yakni mendirikan organisasi *padvinder*. Muhammadiyah, Budi Utomo, Syarikat Islam, Jong Java, Jong Islamieten Bond, dan berbagai organisasi kepemudaan daerah lainnya silih berganti melahirkan organisasi *padvinder*. Setelah ada NIVP dan JPO, selanjutnya ada *Hizbul Wahtan* (HW), *Jong Java Padvinderij* (JJP), *Nationale Padvinders* (NP), *Nationaal Indonesische Padvinderij* (NIP), *Pandoe Pemoeda Sumatra* (PPS), dan *Syarikat Islam Afdeling Padvinderij/Syarikat Islam Afdeling Pandu* (SIAP).

Dari sekian organisasi pandu itu akhirnya ada yang meleburkan diri atau berfusi ke dalam INPO (*Indonesische Padvinderij Organisatie*). Pandu yang melebur ke dalam INPO adalah *Nationale Padvinderij Organisatie* (NPO) dan *Jong Indonesische Padvinderij Organisatie* (JIPO).

Semakin banyaknya organisasi kepanduan yang dibentuk oleh organisasi pergerakan dan keagamaan, rupanya membuat pemerintah Hindia-Belanda khawatir sehingga pemerintah kolonial melarang organisasi yang dilahirkan oleh pemerintah lokal dan organisasi pergerakan menggunakan istilah *padvinder*.

Tak boleh menggunakan kata *padvinder*, para pendiri bangsa tidak kehilangan akal. Dari sinilah, atas kecerdasannya, KH Agus Salim, mengusulkan istilah *pandu* atau *kepanduan* sebagai ganti dari *padvinder* ([museumsumpahpemuda.kemdikbud.go.id](http://museumsumpahpemuda.kemdikbud.go.id)).

Setelah tidak menggunakan kata *padvinder* dan ada hasrat untuk bersatu antarorganisasi pandu maka pada 23 Mei 1928 terbentuklah PAPI (Persaudaraan Antar Pandu Indonesia), organisasi yang menghimpun INPO, SIAP, NATIPIJ, PPS. Setelah kemerdekaan lahir kepanduan bersifat nasional, yaitu Pandu Rakyat Indonesia pada 28 Desember 1945.



Ledia Hanifa Amaliah



Selain PAPI juga ada payung yang menghimpun berbagai organisasi pandu lainnya, yakni Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) yang dirintis oleh tokoh dari JJP, INPO, PPS, dan PK. Ini terbentuk pada tahun 1930.

Selanjutnya, dalam *Wikipedia* diceritakan, sebulan setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia beberapa tokoh kepanduan berkumpul di Yogyakarta dan bersepakat untuk membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia sebagai suatu panitia kerja, menunjukkan pembentukan satu wadah organisasi kepanduan untuk seluruh bangsa Indonesia dan segera mengadakan Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia.

Lebih lanjut, dalam *web* itu ditulis, kongres yang dimaksud dilaksanakan pada tanggal 27–29 Desember 1945 di Surakarta dengan hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia. Perkumpulan ini didukung oleh segenap pimpinan dan tokoh serta dikuatkan dengan “Janji Ikatan Sakti”, lalu pemerintah mengakui sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No.93/Bag. A, tertanggal 1 Februari 1947.

Tahun-tahun sulit dihadapi oleh Pandu Rakyat Indonesia karena serbuan Belanda. Bahkan pada Peringatan Kemerdekaan 17 Agustus 1948 waktu diadakan api unggun



Presiden Sukarno

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

di halaman gedung Pegangsaan Timur 56, Jakarta, ancaman Belanda menimbulkan korban Soeprapto. Ia gugur sebagai martir gerakan kepanduan di Indonesia. Di daerah yang diduduki Belanda, Pandu Rakyat dilarang berdiri. Keadaan ini mendorong berdirinya perkumpulan lain, seperti Kepanduan Putera Indonesia (KPI), Pandu Puteri Indonesia (PPI), Kepanduan Indonesia Muda (KIM) (*Wikipedia*).

Ketika pemerintahan sudah dalam kondisi stabil, Presiden dan MPRS ingin membenahi organisasi kepanduan di Indonesia. Dasar hukum untuk membenahi kepanduan itu adalah Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/

1960, tanggal 3 Desember 1960, tentang Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Dalam paragraph 330 Ketetapan itu menyebutkan, dasar pendidikan di bidang kepanduan adalah Pancasila. Seterusnya penertiban tentang kepanduan (Pasal 741) dan pendidikan kepanduan supaya diintensifkan dan menyetujui rencana Pemerintah untuk mendirikan Pramuka (Pasal 349 Ayat 30). Kemudian “kepanduan supaya dibebaskan dari sisa-sisa Lord Baden Powellisme” (Lampiran C Ayat 8).

Untuk mengejawantahkan hal yang demikian, Presiden Soekarno pada 9 Maret 1961 mengumpulkan para tokoh dan



pemimpin gerakan kepanduan Indonesia di Istana Negara. Dalam pertemuan itu, Sukarno mengungkapkan bahwa kepanduan yang ada harus diperbarui, metode, dan aktivitas pendidikan harus diganti, seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu. Untuk melakukan rencana itu, Presiden membentuk panitia dengan anggota terdiri dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Menteri P dan K Prof. Prijono, Menteri Pertanian Dr. A. Azis Saleh, dan Menteri Transmigrasi, Koperasi, dan Pembangunan Masyarakat Desa, Achmadi.

Selanjutnya Soekarno lewat Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961, tanggal 20 Mei 1961, mengeluarkan kebijakan mengenai organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia, serta mengesahkan anggaran dasar kepanduan yang dijadikan pedoman, petunjuk, dan pegangan bagi para pengelola dalam menjalankan tugasnya.

Selanjutnya, pada 30 Juli 1961, bertempat di Istora Senayan, seluruh tokoh kepanduan menyatakan menggabungkan diri dengan organisasi kepanduan, dan hari bersejarah ini disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Lebih lanjut, dalam pada 14 Agustus 1961, Soekarno melantik MAPINAS (Majelis Pimpinan Nasional) yang diketuai oleh Presiden Soekarno, Wakil Ketua I Sultan



**Sri Sultan Hamengku Buwono IX**

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Hamengku Buwono IX dan Wakil Ketua II Brigjen TNI Dr. A. Azis Saleh. Ditandai dengan penyerahan panji-panji kepanduan oleh Soekarno kepada para tokoh. Pelantikan MAPINAS tersebut dihadiri oleh ribuan pandu. Dalam MAPINAS inilah muncul istilah Pramuka. Istilah ini kali pertama diperkenalkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

Raja Yogyakarta itu mengambil istilah Pramuka dari kata 'Poromuko' yang berarti pasukan terdepan dalam perang. Selanjutnya istilah itu menjadi Praja Muda Karana, artinya Jiwa Muda yang Suka Berkarya.

Dalam *detik.com*, 28 Desember 2023, disebut Sri Sultan Hamengku Buwono IX menjadi Kepala Kwartir Nasional (Kwarnas) yang pertama dan menjabat selama empat periode berturut-turut, yaitu: Tahun 1961-1963, 1963-1967, 1967-1970, dan 1970-1974. Atas sumbangsuhnya dalam memajukan Pramuka, dalam Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka di Dili, Timor Timur (sekarang Timor Leste), ditetapkan bahwa pada 8 November 1998 lewat Surat Keputusan Nomor 10/MUNAS/88 maka Sri Sultan Hamengku Buwono IX ditetapkan sebagai Bapak Pramuka Indonesia. □

AWG/dari berbagai sumber

Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP

## Aturan Mas Menteri Perlu Dikaji Ulang



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**S**AAT Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim, ada catatan agar kementerian tersebut mengkaji ulang Permendikburistek No. 12 Tahun 2024. Dalam Permen tersebut ada kebijakan yang menyatakan kegiatan Pramuka menjadi tidak wajib diikuti oleh siswa, meski sekolah tetap harus menyediakan ekstrakurikuler itu. Mayoritas anggota Komisi X menyayangkan bila Pramuka tidak lagi menjadi kegiatan yang diwajibkan bagi siswa, sebab di organisasi ini banyak nilai positif untuk membentuk karakter anak.

Lalu bagaimana menyikapi permen tersebut? Berikut wawancara Majalah Majelis dengan Wakil Ketua Komisi X Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP. Perempuan alumni ITB dari Fraksi Partai Golongan Karya itu menjawab dengan lugas dan panjang lebar mengenai bagaimana menyikapi aturan Mas Menteri itu. Petikannya:

**Pramuka selama ini menjadi ekstrakurikuler wajib bagi siswa, namun**

**lewat Permendikbud No. 12 Tahun 2024 menetapkan, siswa tidak lagi wajib mengikuti ekstrakurikuler Pramuka. Bagaimana tanggapan Ibu terkait aturan itu?**

Seperti yang dijelaskan oleh Mas Menteri (Menteri Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim) pada 3 April 2024 bahwa Kemendikbudristek mengeluarkan aturan tersebut bukan berarti menghilangkan kewajiban sekolah untuk tidak menjadikan Pramuka sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Kemendikbudristek menjadikan Pramuka “tetap wajib ada di sekolah,” hanya saja siswa bisa memilih untuk mengikuti kegiatan Pramuka sebagaimana mengikuti kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Dengan kata lain, kegiatan Pramuka menjadi kokurikuler atau ekstrakurikuler pilihan.

Kita juga melihat tanggapan para anggota Komisi X DPR pada raker (rapat kerja) tersebut. Hampir semua anggota menyayangkan digantikannya “wajib” menjadi “pilihan” bagi siswa untuk memilih kegiatan ekstrakurikulernya. Karena kegiatan Pramuka sudah ada sejak kemerdekaan. Kami percaya bahwa partisipasi dalam Pramuka tidak hanya memberikan manfaat

yang besar bagi perkembangan karakter siswa tetapi juga membantu memperkuat rasa nasionalisme, keterampilan kepemimpinan, kerjasama tim, dan kesadaran akan lingkungan serta kepedulian sosial. Yang paling diharapkan dari kegiatan ke-Pramuka-an adalah pendidikan karakter yang diperoleh oleh siswa yang mengikuti Pramuka. Pramuka memang tidak bisa “sendirian” dalam mendidik siswa agar berkarakter kuat, namun Pramuka memiliki kontribusi signifikan bagi pendidikan karakter.

Jika saat ini Pramuka dikatakan “kehilangan pamor”, justru itulah yang harus kita jawab dengan salah satunya melakukan revitalisasi gugus depan di masing-masing satuan pendidikan, dan memasukkan dan mengintegrasikan P5 (Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila) ke dalam kegiatan Gerakan Pramuka.

Oleh karena itu, catatan Komisi X pada raker tersebut adalah mendorong Kemendikbudristek untuk mengkaji kembali Permendikburistek No. 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, dengan menekankan agar Gerakan Pramuka menjadi kegiatan kokurikuler di satuan pendidikan.

Dorongan untuk melakukan evaluasi ini juga menjadi dorongan saya kepada Kemendikbudristek, karena Pramuka ini adalah juga adalah amanah Presiden Soekarno untuk menjadikan Pramuka sebagai agen persatuan bagi bangsa Indonesia. Presiden Soekarno melihat Gerakan Pramuka sebagai salah satu bentuk pendidikan karakter yang efektif. Beliau percaya bahwa melalui kegiatan Pramuka, generasi muda Indonesia dapat belajar nilai-nilai seperti kedisiplinan, kerjasama, keberanian, dan tanggung jawab. Presiden Sukarno juga menekankan bahwa Pramuka harus berperan aktif dalam pembangunan bangsa dan masyarakat. Beliau mengajak para Pramuka untuk terlibat dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik Indonesia.

Perlu diingat bahwa Presiden Sukarno



dulu berusaha menyatukan berbagai gerakan kepanduan yang ada di Indonesia yang saat itu masih berbasis kedaerahan maupun berbasis keagamaan. Artinya, gerakan kepanduan ini sudah amat panjang mewarnai sejarah perjuangan Indonesia. Pramuka-lah yang menyatukan berbagai gerakan kepanduan tersebut menjadi gerakan nasional. Dengan kata lain, kita harus melihat sejarah Pramuka di Indonesia secara utuh.

Gerakan Pramuka adalah gerakan kepemudaan. Pramuka merupakan organisasi yang banyak melibatkan pemuda dalam kegiatan-kegiatan pembangunan karakter dan kepemimpinan, serta sering melibatkan kegiatan luar ruang sehingga penempatan Pramuka di bawah Kemenpora mungkin dianggap sesuai. Gerakan Pramuka hingga kini adalah bagian dari kegiatan kepemudaan yang dikoordinir oleh Kemenpora, tepatnya di Deputi Pemberdayaan Pemuda (Deputi 1). Mungkin hal ini pula yang menjadikan Kemendikbud “menurunkan peringkat wajib Pramuka menjadi pilihan” di tingkat sekolah sehingga mereka menganggap “yang dapat mewajibkan Pramuka ya seharusnya kemenpora” karena itu ranah kepemudaan.

Namun, terkait kebijakan tersebut, Komisi X tetap mendorong Kemendikbud untuk mempertimbangkan beberapa poin, yaitu melakukan pendalaman dengan melibatkan Kwarnas Gerakan Pramuka, mengadopsi pola-pola pendidikan gerakan Pramuka kedalam ko-kurikuler, melakukan revitalisasi gugus depan di masing-masing satuan pendidikan, dan memasukkan dan mengintegrasikan P5 (Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila) ke dalam kegiatan Gerakan Pramuka.

**Bila menjadi ekstrakurikuler yang sukarela, bagaimana minat siswa ikut kegiatan Pramuka?**

Minat siswa terhadap kegiatan Pramuka dapat bervariasi, tergantung pada berbagai faktor seperti budaya sekolah, tingkat dukungan dari pihak sekolah, kegiatan yang ditawarkan oleh unit Pramuka, dan minat pribadi siswa. Saya sampai saat ini melihat bahwa ekstrakurikuler Pramuka tetap akan diminati oleh siswa, karena kegiatan luar ruangan akan tetap menjadi daya tarik tersendiri bagi siswa yang biasanya hanya

belajar textbook di kelas, di perpustakaan atau di laboratorium.

Artinya, kegiatan luar ruang ini tetap akan menjadi minat para siswa meski selama ini ternyata bukan hanya Pramuka yang menyajikannya. Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan (HW) yang ada dibawah sekolah Persyarikatan Muhammadiyah misalnya, kalau boleh saya katakan, merupakan gerakan yang menyajikan kegiatan luar ruangan di sekolah-sekolah yang berada dibawah lembaga tersebut sebagaimana Pramuka.

Dengan kata lain, Gerakan Pramuka sebenarnya perlu juga merevitalisasi diri agar tetap menjadi pilihan bagi siswa ketika nanti dia benar-benar dijadikan sebagai

Kegiatan ekstrakurikuler, menurut saya, bukan membebani karena siswa dapat memilih kegiatan ekstra yang menjadi minatnya. Bisa jadi membebaskan siswa dari kewajiban mengikuti ekstrakurikuler Pramuka dapat mengurangi beban mereka, terutama jika mereka memiliki keterbatasan waktu atau minat pada kegiatan tersebut. Dengan tidak adanya kewajiban, siswa yang sebelumnya tidak tertarik atau merasa terpaksa untuk bergabung dengan Pramuka mungkin akan lebih aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler lain yang lebih sesuai dengan minat mereka.

Tapi ingat dampak lainnya. Kebijakan menjadikan Pramuka sebagai pilihan, memiliki dampak terhadap keberlanjutan dan



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

salah satu kegiatan pilihan. Minat siswa sangat tergantung dengan “peran vital Pramuka” itu sendiri bagi siswa.

**Apakah terlalu banyak ekstrakurikuler di sekolah sehingga siswa menjadi banyak terbebani sehingga Pramuka menjadi salah satu pilihan?**

Menurut saya, beban siswa dalam melakukan proses pembelajaran tidak bisa diukur hanya dari kegiatan ekstrakurikulernya saja. Beberapa faktor yang dapat membebani siswa dalam melakukan proses pembelajaran bisa saja dari beban akademik, jadwal yang padat, tekanan orangtua, minimnya dukungan dan bimbingan, kesehatan mental, dan lain-lain.

perkembangan Gerakan Pramuka secara keseluruhan, termasuk penurunan jumlah anggota dan pengurangan sumber daya yang tersedia. Ada kemungkinan bahwa kebijakan ini dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pentingnya Pramuka sebagai bagian dari pendidikan karakter.

Bagaimanapun, perubahan kebijakan ini kemungkinan akan memicu diskusi dan evaluasi lebih lanjut tentang peran ekstrakurikuler dalam pendidikan serta dampaknya terhadap pembentukan karakter dan perkembangan siswa.

**Banyak nilai Empat Pilar MPR dalam Pramuka, jika tidak menjadi wajib apa dampak bagi pembentukan karakter bangsa?**

Jika Gerakan Pramuka tidak lagi menjadi kegiatan ekstrakurikuler wajib di sekolah, ada beberapa dampak yang mungkin terjadi: *Pertama*, penurunan partisipasi. Tanpa status wajib, kemungkinan akan terjadi penurunan partisipasi siswa dalam kegiatan Pramuka. Ini dapat mengakibatkan penurunan jumlah anggota Pramuka dan berdampak pada kegiatan dan program yang diselenggarakan oleh organisasi Pramuka di sekolah. *Kedua*, pengurangan dukungan dan sumberdaya: Jika Pramuka tidak lagi dianggap sebagai kegiatan ekstrakurikuler yang penting, sekolah mungkin mengurangi dukungan dan alokasi sumber daya untuk kegiatan Pramuka, seperti fasilitas, waktu guru pembina, dan anggaran.

*Ketiga*, pemotongan program dan kegiatan. Penurunan partisipasi dan dukungan dari sekolah dapat mengakibatkan pemotongan program dan kegiatan Pramuka, seperti perkemahan, pelatihan keterampilan, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ini dapat mengurangi kesempatan siswa untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan, kemandirian, dan tanggung jawab sosial. *Keempat*, kehilangan nilai-nilai Pramuka. Gerakan Pramuka dikenal karena mengajarkan nilai-nilai seperti kerjasama, kedisiplinan, keberanian, dan kemandirian. Jika Pramuka tidak lagi menjadi kegiatan wajib di sekolah, ada risiko bahwa siswa tidak lagi terpapar atau menginternalisasi nilai-nilai tersebut dengan baik.

*Kelima*, dampak pada identitas sekolah. Bagi banyak sekolah, Pramuka merupakan bagian integral dari identitas sekolah dan budaya sekolah. Pengurangan atau penghapusan Pramuka sebagai kegiatan wajib dapat memengaruhi citra dan identitas sekolah di mata masyarakat dan calon siswa. *Keenam*, ada potensi hilangnya potensi kepemimpinan. Pramuka sering kali menjadi tempat bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan memegang peran-peran kepemimpinan dalam unit Pramuka mereka. Dengan penurunan partisipasi dan dukungan, potensi pengembangan kepemimpinan ini juga dapat terganggu.

Namun, meskipun ada potensi dampak negatif jika Pramuka tidak lagi menjadi kegiatan ekstrakurikuler wajib di sekolah, penting untuk diingat bahwa kebijakan

tersebut juga dapat memberikan fleksibilitas kepada siswa dan sekolah untuk menyesuaikan kegiatan ekstrakurikuler dengan minat dan kebutuhan mereka.

#### **Ekstrakurikuler apa di sekolah yang bisa membentuk karakter kebangsaan bagi siswa?**

Ada banyak kegiatan ekstrakurikuler yang dapat membentuk karakter siswa di sekolah. Termasuk Pramuka, beberapa yang bisa membentuk karakter siswa misalnya, *pertama* olahraga. Kegiatan olahraga seperti sepakbola, basket, voli, renang, atau bulu tangkis dapat membentuk karakter siswa melalui pengembangan kerjasama tim, disiplin, keuletan, dan kecerdasan emosi-

bangkan keterampilan kepemimpinan, kerjasama tim, dan komunikasi.

*Kelima*, kegiatan ilmiah dan penelitian. Mengikuti kegiatan seperti olimpiade sains, penelitian ilmiah, atau klub robotika dapat membentuk karakter siswa melalui pengembangan keterampilan pemecahan masalah, keuletan, dan ketekunan. *Keenam*, pendakian dan petualangan. Kegiatan luar ruangan seperti pendakian gunung, camping, atau orienteering dapat membentuk karakter siswa melalui pengembangan keberanian, kemandirian, ketahanan, dan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan kelompok.

*Ketujuh*, pengembangan keterampilan. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

onal. *Kedua*, seni dan kesenian. Kegiatan seperti paduan suara, tari, teater, orkestra, atau seni rupa dapat membantu siswa mengembangkan kreativitas, rasa kepercayaan diri, ekspresi diri, dan ketekunan.

*Ketiga*, pengabdian masyarakat: Kegiatan seperti *volunteering* di panti asuhan, kampanye lingkungan, atau proyek sosial lainnya dapat membentuk karakter siswa melalui pengembangan rasa empati, tanggung jawab sosial, dan rasa kepedulian terhadap sesama. *Keempat*, klub dan organisasi. Bergabung dengan klub atau organisasi di sekolah seperti klub debat, jurnalisme, ilmu pengetahuan, atau bahasa asing dapat membantu siswa mengem-

berfokus pada pengembangan keterampilan khusus, seperti fotografi, desain grafis, atau pemrograman komputer dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan praktis dan kreativitas.

Tapi ingat, setiap kegiatan ekstrakurikuler memiliki potensi untuk membentuk karakter siswa jika dipimpin dengan baik dan didukung dengan lingkungan yang positif. Penting bagi sekolah untuk menawarkan beragam kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat dan bakat siswa, sehingga mereka dapat memilih kegiatan yang paling cocok untuk pengembangan karakter pribadi mereka. □

AWG/dari berbagai sumber

## Isa Amir Hanafi

Kades Yosonegoro

### Tradisi Kedaerahan Harus Menjadi Ikon Khas Daerah

**K**ARENA sejarahnya, setiap daerah banyak sekali memiliki tradisi kedaerahan yang sangat khas dan menjadi kebanggaan masyarakatnya. Bahkan, banyak dari tradisi itu menjadi atau dijadikan destinasi wisata unggulan, contohnya seperti di Bali.

Begitu pula di Gorontalo ada tradisi kedaerahan yang paling khas, yakni Lebaran Ketupat. Dan, satu yang paling bisa dijadikan destinasi wisata, terutama wisata religi, adalah pra Lebaran Ketupat. Di mana masyarakat, seperti yang diselenggarakan di Desa Yosonegoro dan sekitarnya, melaksanakan prosesi doa hari raya sunat di masjid.

Setelah itu, dilanjutkan dengan bersalaman, memukul bedug tua di dalam masjid, makan bersama kuliner khas lebaran, lalu berkeliling kampung lebaran bersama masyarakat. Saya yakin, tradisi ini akan sangat menarik jika dikembangkan dengan baik. Kami harap mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah, juga pusat. □



DER

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

## Rauf Nagaring

Tokoh Masyarakat

### Masjid Tua Bersejarah Harus Dijaga dan Dilestarikan



**D**I PROVINSI Gorontalo ada sebuah masjid bersejarah yang usianya sudah sangat tua. Masjid yang dimaksud adalah Masjid Hunto Sultan Amay, yang dibangun pada tahun 1495. Masjid ini berlokasi di Kelurahan Biawu, Kota Selatan.

Seperti kebanyakan masjid di Jawa, di area masjid ini banyak situs bersejarah, seperti makam seorang Aulia, Maulana Syeh Syarief Bin Abdul Azis yang dimakamkan pada tahun 1835. Juga terdapat makam Sultan Amay, Raja Hulontalangi atau Raja Gorontalo, bersama prajuritnya. Dan, masjid ini menjadi bukti sejarah awal mula masuk dan berkembangnya Islam di Provinsi Gorontalo.

Saat ini, kondisi masjid masih terdapat kerusakan (lapuk) karena termakan usia. Kami berharap agar pemerintah dan elemen masyarakat memberikan perhatian lebih pada masjid ini.

Kami berharap sebagai masyarakat, walaupun masjid ini sudah ditetapkan menjadi situs cagar budaya, namun menurut saya harus dikembangkan lagi, karena potensinya yang sangat luar biasa menarik minat masyarakat, terutama umat muslim Indonesia, untuk berkunjung ke sini. □

DER

**Resik-Resik Masjid (RRM) Brebes**

# Perkumpulan **Orang-Orang** Yang *Hijrah dari Riba*



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**T**AK sedikit orang mengatakan bahwa budaya tolong-menolong dan gotong-royong sudah semakin langka, bahkan nyaris punah. Ditengarai, persoalan tersebut muncul karena maraknya pembangunan serta kemajuan iptek. Tetapi, jika diperhatikan semakin dalam, dan lebih dalam lagi, kekhawatiran pudarnya sikap kegotong royongan itu tidak sepenuhnya benar. Hal itu bisa dilihat dari kerja nyata dan kerja bersama yang ditunjukkan generasi muda yang tergabung dalam organisasi Resik-resik Masjid (RRM) Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Seminggu sekali, kelompok ini membersihkan masjid, sesuai permintaan dari takmir yang masuk ke Sekretariat RRM. Tetapi, ketika permintaan dari takmir meningkat, mereka bisa mengerjakannya hingga beberapa kali dalam seminggu. Bahkan, mendekati bulan puasa 2024 silam, kelompok ini melakukan bersih-bersih masjid setiap hari.

“Kami memiliki jadwal setiap Sabtu dari jam 09.00-12.00 WIB. Tetapi jika permintaan sangat banyak kita berusaha memenuhinya, meski harus dilakukan setiap hari berurutan dari masjid ke masjid,” kata Mohammad Badrun, Koordinator RRM Brebes kepada Majalah *Majelis* beberapa waktu lalu.

Meski berniat baik untuk membantu umat Islam melaksanakan ibadah di masjid yang

bersih, bukan berarti perjalanan RRM senantiasa mudah. Ada beberapa kali menemui kendala, akibat munculnya kecurigaan beberapa pihak kepada mereka.

Seperti, ketika ada Ketua Takmir Masjid yang tidak mengizinkan masjidnya dibersihkan. Padahal, sebelumnya takmir masjid sudah berkirim surat meminta agar masjid mereka dibersihkan. Tetapi, saat sudah tiba harinya, ternyata rencana tersebut dibatalkan secara sepihak oleh ketua takmir, dengan alasan yang mengada-ada.

“Waktu ada kasus penusukan terhadap Menkopolhukkam Jendral (Purn) Wiranto

pada 2019, kami juga sempat dicurigai terlibat, sampai akhirnya dipanggil ke Polres untuk mengklarifikasi. Alhamdulillah setelah kami jelaskan, pihak kepolisian bisa menerima dan memahami keberadaan RRM,” kata Kang Oeoen, panggilan akrab Mohammad Badrun.

Tetapi, sejak itu nyaris tidak ada persoalan yang menghalangi kiprah RRM di tengah masyarakat. Bahkan, semakin lama keberadaan RRM Brebes ini semakin besar. Mereka tidak hanya melulu melakukan kegiatan resik-resik masjid, tetapi juga ada kegiatan sosial hingga kajian keagamaan.

Bukan saja jenis kegiatannya yang bertambah, RRM Brebes juga berusaha





FOTO-FOTO: ISTIMEWA

melebarkan sayapnya untuk mengajak beramar ma'ruf bersama kelompok masyarakat lainnya. Seperti dengan sejumlah gang motor. Juga bekerja sama dengan lapas Brebes mengajak serta para tahanan yang hampir bebas untuk bermasyarakat dengan melibatkan mereka dalam kegiatan bersih-bersih masjid. Bukan hanya kaum lelaki saja, tetapi juga ibu-ibu atau para istri. Mereka bahu-membahu berbagi tugas untuk membersihkan masjid.

"Kami berpedoman, tidak akan merepotkan takmir. Makanya, segala kebutuhan kami bawa sendiri, mulai dari sabun peralatan

hingga genset untuk menghidupkan mesin cuci, mesin karpet, dan vacuum cleaner," ungkap Kang Oeoen.

### Anti Riba

RRM Kabupaten Brebes berdiri sejak 2019. Ide pendirian organisasi ini muncul dari keresahan anggotanya. Saat itu, hati mereka bergejolak karena pekerjaan yang digeluti berkaitan dengan urusan riba. Beberapa akhirnya memutuskan untuk keluar dari pekerjaan yang telah membuatnya tidak tenang.

Selama dalam ketidaktenangan itu mereka sering berkumpul dan membentuk majelis

ilmu. Mereka saling menguatkan, berdiskusi, mencari jalan keluar. Salah satu yang dihasilkan dari perbincangan tersebut adalah mendirikan RRM. Resik-resik masjid dipilih karena banyak yang memerlukan, sekaligus bisa menjadi pelarian dari kegelisahan yang dirasakan.

Setelah RRM resmi berdiri, masjid pertama yang mereka bersihkan adalah masjid Islamic Center. Saat itu RRM mengajukan diri dan meminta izin untuk membersihkan masjid Islamic Center. Permintaan tersebut ternyata disambut baik oleh pihak takmir masjid. Sejak itu keberadaan mereka mulai dikenal masyarakat. Satu persatu takmir mengajukan diri, meminta agar masjidnya dibersihkan.

"Semakin lama kami merasa kebutuhan terhadap peralatan dan perlengkapan semakin besar. Maka kami buka donasi, tujuan awalnya untuk membeli mobil, guna mengangkut semua peralatan, termasuk genset," kata Kang Oeoen menambahkan.

Seiring berjalannya waktu, RRM merasa ada persoalan hukum dan sosial yang terus mengintai keberadaan mereka. Khawatir terjadi peristiwa yang tidak diinginkan, mereka pun berniat membuat badan hukum. Belum lagi ide membuat badan hukum itu terlaksana ternyata sudah ada lembaga serupa yang sudah berbadan hukum. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, RRM Brebes memutuskan bergabung dengan Yayasan Resik-resik Masjid Jawa Tengah, yang berpusat di Semarang.

"Alhamdulillah kami memiliki teman semakin banyak. Dan, itu membuat kami semakin tenang. Dan, berkat kegiatan resik-resik masjid, teman-teman yang berusaha hijrah dari riba juga sudah tidak merasa gelisah. Mereka juga sudah meninggalkan pekerjaan yang mempraktikkan riba. Dan, itu membuat kami semua merasa hidup ini bertambah tenang," kata Mohammad Badrun lagi. □

MBO

## Masa Depan Pramuka Setelah Tidak Wajib Bagi Siswa

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) membuat kebijakan di mana siswa tidak lagi wajib mengikuti kegiatan Pramuka. Aturan yang dituangkan lewat Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2024 itu menimbulkan banyak protes, termasuk dari anggota Komisi X DPR. Betapa tidak, gerakan Pramuka banyak memberikan nilai positif pada siswa dan membentuk karakter kebangsaan. Lalu, bagaimana akibatnya setelah gerakan Pramuka tidak lagi wajib diikuti oleh para siswa sekolah? Berikut pendapat anggota Komisi X DPR:

**Prof. Dr. Zainuddin Maliki, M.Si** Anggota MPR Fraksi PAN

### Tak Ada Masalah dengan Pramuka, Kenapa Diotak-atik?

**K**EBIJAKAN yang aneh karena ekskul Pramuka selama ini tidak ada masalah. Sejauh ini tidak ada yang mengeluh dengan kewajiban sekolah harus menyelenggarakan ekskul Pramuka. Demikian juga tidak ada preseden buruk dari program ekskul Pramuka. Tidak ada yang merasa dirugikan dengan ekskul Pramuka. Justru kegiatan kepramukaan sejauh ini secara pedagogis dirasakan membantu pembentukan karakter siswa didik. Melalui metode yang khas Pramuka, dalam hal ini dikenal belajar dengan metoda PAKEM - siswa didik dibawa ke dalam pembelajaran ekskul dalam suasana siswa aktif, kreatif, dan menyenangkan. Jadi, buat apa diotak-atik? Tidak ada alasan pedagogis maupun sosiologis yang cukup untuk mengotak-atik kebijakan ekskul Pramuka.

Lingkungan pendidikan kita selama ini cenderung berkarakter budaya behavioristik. Perilaku hanya akan terbentuk jika ada stimulus atau instruksi dari luar. Siswa tidak nyontek hanya kalau diawasi. Diawasi saja masih ada yang nyontek. Proyek kantin kejujuran di sekolah tanpa pengawasan banyak yang bangkrut.

Dalam budaya behavioristik yang kuat seperti itu maka tanpa ada kewajiban dari sekolah bisa ditebak akan terjadi penurunan partisipasi dan motivasi siswa untuk ambil bagian dalam kegiatan ekskul



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Pramuka.

Ekskul Pramuka bermanfaat digunakan untuk menyalurkan minat, bakat, dan penguatan watak bawaan siswa didik. Pramuka dan gerakan kependuan, seperti gerakan Hizbul Wathan, menyediakan cukup wadah menyalurkan minat dan bakat, serta penguatan watak atau karakter siswa.

Kalau siswa didik kehilangan minat beraktifitas di kepramukaan dan atau kegiatan kependuan lainnya maka tentu kita pantas khawatir akan kehilangan satu

peluang bagus dalam pembentukan dan penguatan karakter berbangsa dan bernegara.

Sungguh kalau ditangani dengan baik, ekskul kepramukaan dan atau kependuan bisa menjadi kegiatan yang bermanfaat untuk menguatkan minat, bakat, dan karakter siswa didik apakah di bidang olahraga, seni, sosial kemasyarakatan, kemanusiaan, hingga soal spiritual keagamaan dalam suasana siswa aktif dan menyenangkan. □

AWG

Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si., M.PSi.T. Anggota MPR Fraksi PKS

## Gerakan Pramuka Bukan Hanya Jurit Malam

**D**ALAM UU No.12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka, disebutkan Pramuka merupakan salah satu kegiatan pendidikan, yang dalam hal ini, Pramuka sebagai sebuah Gerakan dan Pramuka sebagai bagian dari pendidikan. Di bagian pendidikan, bentuknya adalah ekstrakurikuler. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa kegiatan Pramuka adalah bersikap sukarela sehingga harus dipahami bahwa sifatnya memang mengajak. Pihak sekolah bisa membuat semacam pengenalan bahwa ekstrakurikuler Pramuka itu seperti apa sehingga bisa menarik minat siswa.

Ketika ada yang menyebut bahwa Pramuka menjadi beban bagi orangtua karena harus menyediakan pakaian seragam dan lain sebagainya, sebenarnya Pramuka bukan diseragamkannya. Gerakan ini ada tetapi tidak pada seragamnya. Bila sudah terlatih, jiwa dan pandunya akan melekat di hati. Ia tidak melekat pada seragamnya, sebab nanti kalau lepas seragamnya akhirnya bisa tidak lagi berjiwa Dasa Darma.

Dari sini bisa dipahami bahwa di sekolah sekalipun siswa ikut Pramuka tetapi tidak berarti ia harus berseragam. Tidak ada aturan tidak boleh ikut Pramuka kalau tidak punya seragam. Ikut kegiatan Pramuka bila diperlukan adanya seragam, itu nanti bisa dipikirkan belakangan. Jadi, seragam bukan sesuatu yang kewajiban.

Karena ini ekstrakurikuler sukarela berarti harus ada tindakan lebih bagi penyelenggara ekstrakurikuler untuk memperkenalkan Pramuka itu apa sih, apa asyiknya ikut Pramuka. Kalau buat saya, memilih ekstrakurikuler di SMP ya Pramuka. Meski sekolahnya di belalang kuburan saya tetap memilih Pramuka, karena Pramuka ekstrakurikuler yang bagus. Sejak SMP sampai kuliah tingkat pertama, saya menjadi bagian dari



Pramuka.

Perlu dipahami ketika sudah menyentuh hati anak-anak dengan kegiatan yang menarik, tentu itu akan menjadi minat dan orang akan sungguh-sungguh mendukung Pramuka. Berarti memang harus dipikirkan bagaimana kakak pembina berpikir, menyosialisasikan, kegiatan Pramuka itu asyik dan menyenangkan.

Di sekolah banyak ekstrakurikuler bagus sehingga siswa bisa memilih. Nah, kalau dalam kurikulum yang disosialisasikan oleh Kemendikbudristek bahwa ada Program P5 kalau tidak didesain dengan baik ia (program) tidak bisa memberikan satu dukungan bagi pembentukan kepribadian sebagaimana di Pramuka, karena Pramuka mempunyai kurikulum yang jelas.

Di Pramuka ada syarat kecakapan umum dan khusus bahkan mempunyai semacam reward, tanda kecakapan umum dan khusus bahwa dia mempunyai ketrampilan tertentu. Artinya, Pramuka bukan cuma kognitif tetapi

juga ada pembentukan karakter, ketrampilan di lapangan, kepedulian sosial. Pokonya, semua ada di Pramuka. Sementara Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim, ikut Pramuka yang diingat hanya Jurit Malam, padahal Pramuka bukan hanya Jurit Malam. Banyak nilai dari Pramuka seperti ketrampilan membaca peta, interaksi sosial dengan masyarakat, dan nilai-nilai positif lainnya.

Esensi filosofi dasar Pramuka itu harus juga dipahami oleh para pembinanya. Kalau kita lihat nilai Empat Pilar MPR di Pramuka itu banyak sekali, dan bagaimana kita bisa mengemasnya menjadi lebih menarik. Di sekolah harus kita pikirkan bagaimana kegiatan ini menjadi aktivitas yang menyenangkan bagi anak.

Sebenarnya semua ekstrakurikuler bisa dikemas dengan baik agar bisa membentuk karakter kebangsaan, tetapi bagaimana dia bisa menjadi intens. Nah, ini bagian yang penting, bisakah kita mengadakan ekstrakurikuler yang intens. □

AWG

Masjid Tertua di Gorontalo

# Fadel Muhammad: Saksi Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Gorontalo

Masjid ini dibangun oleh Sultan Amay, pemimpin Kerajaan Gorontalo pada tahun 1495. Jadi, sudah sangat tua dan menjadi masjid tertua di Gorontalo.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**D**I SELA-SELA kegiatannya di Provinsi Gorontalo, Wakil Ketua MPR RI, Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad, menyempatkan diri mengunjungi dan salat di masjid tertua di Gorontalo, Masjid Hunto Sultan Amay, di Kelurahan Biawu, Kota Selatan, Gorontalo, Senin (15/4/2024).

Begitu tiba di lokasi masjid — yang sudah ditetapkan menjadi situs cagar budaya yang dilindungi UU No.11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya — ini, Fadel Muhammad didampingi pengurus dan takmir masjid, meninjau area dalam dan luar masjid yang kondisi masih tetap terjaga, baik desain maupun arsitektur aslinya.

Dari beberapa area masjid yang disambungnya, ada beberapa tempat yang mendapat perhatian dari Fadel Muhammad. Di antaranya, sumur keramat tempat air wudhu Sultan Amay, yang tak lain adalah Sultan dari Kesultanan Gorontalo yang membangun masjid ini pada tahun 1495, dan makam seorang Aulia. Semuanya masih terjaga keasliannya.

Usai meninjau keliling masjid, Pimpinan MPR dari Kelompok DPD RI ini mengungkapkan bahwa kedatangannya ke Masjid Hunto ini karena mengingat sejarahnya yang sangat luar biasa bagi masyarakat Gorontalo.

“Masjid ini dibangun oleh Sultan Amay, pemimpin Kerajaan Gorontalo pada tahun 1495. Jadi, sudah sangat tua dan menjadi masjid tertua di sini,” jelas Fadel Muhammad.

Sedangkan nama Hunto, menurut Fadel, berasal dari kata Ilohuntungo, yang berarti basis atau pusat perkumpulan dan penyebaran Islam. “Masjid ini juga menjadi saksi sejarah masuk dan berkembangnya Islam di tanah Gorontalo ini. Intinya, masjid ini jadi ikon Gorontalo yang harus dijaga sampai kapanpun,” terangnya.

Dari pengamatannya usai berkeliling masjid, mantan Gubernur Provinsi Gorontalo dua periode ini mengatakan bahwa banyak hal menarik di masjid ini, yang bisa dikembangkan menjadi destinasi wisata religi, terutama untuk wisatawan muslim.

“Tadi saya melihat bangunan masjid ini hampir keseluruhan desainnya masih terjaga keasliannya. Lalu, ada situs sumur keramat tempat sang Sultan dulu mengambil air wudhu, kemudian ada makam seorang Aulia, Maulana Syeh Syarief Bin Abdul Azis yang dimakamkan pada tahun 1835, makam Sultan Amay, Raja Hulontalo atau Raja Gorontalo bersama prajuritnya yang berada di belakang masjid. Jadi saya rasa sudah cocok menjadi tujuan wisata religi,” terangnya.

Melihat pentingnya situs cagar budaya Masjid Hunto ini, Fadel Muhammad berharap agar diperhatikan pemerintah daerah.



Diperhatikan betul bagian mana yang rentan rusak dan perlu direnovasi.

"Kita dan semua elemen masyarakat

Gorontalo juga harus ikut menjaga kelestarian asjid ini, jangan sampai rusak.

Intinya, kita semua menjaga bersama-sama,

karena ini adalah ikon daerah yang penuh sejarah untuk diwariskan kepada generasi mendatang," pungkasnya. □

## Peringatan Hari Bumi

# Lestari Moerdijat: Pelestarian Lingkungan Harus Diwujudkan dalam Tindakan Nyata

Momentum peringatan Hari Bumi kali ini harus dimanfaatkan untuk meneguhkan kembali komitmen para pemangku kepentingan serta masyarakat dalam mewujudkan gerakan berkelanjutan untuk melindungi, serta melestarikan lingkungan yang sehat bagi generasi penerus bangsa.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**U**PAYA pelestarian lingkungan harus diwujudkan dalam tindakan nyata sebagai bagian dari langkah membangun gerakan masyarakat dalam proses pembangunan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

"Tindakan nyata dalam upaya pelestarian lingkungan mendesak untuk dilakukan, mengingat ancaman perubahan iklim dan sejumlah dampak pencemaran di bumi semakin nyata terhadap kehidupan manusia," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/4), dalam rangka Hari Bumi yang diperingati setiap 22 April.

Berdasarkan laman *Eartday.org* peringatan Hari Bumi tahun ini mengangkat tema: *Planet vs. Plastics* yang dimaksudkan untuk menegaskan kembali komitmen mengakhiri penggunaan plastik demi kesehatan manusia dan planet kita.

Terkait komitmen itu juga diserukan untuk mewujudkan tindakan guna mengurangi produksi semua jenis plastik sebanyak 60% pada 2040.

Menurut Lestari, upaya melindungi lingkungan dari ancaman pencemaran plastik dan zat berbahaya lainnya harus direalisasikan dengan langkah nyata dan secara bersama.

Rerie, sapaan akrab Lestari, berpesan, langkah pelestarian lingkungan akan

lebih efektif bila dilakukan dalam bentuk gerakan masyarakat. Sehingga, tambah Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, upaya pemahaman masyarakat terkait bahaya pencemaran plastik terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat misalnya, harus dibangun secara masif.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar momentum peringatan Hari Bumi kali ini benar-benar dimanfaatkan untuk meneguhkan kembali komitmen para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, serta masyarakat, dalam mewujudkan sebuah gerakan berkelanjutan untuk melindungi, serta melestarikan lingkungan yang sehat bagi generasi penerus bangsa. □

Delegasi Dubes Rwanda, Abdul Karim

# HNW: Kita Perlu Meningkatkan Kerjasama Antarparlemen

Duta Besar Rwanda untuk Indonesia, Abdul Karim, memuji keberagaman dan majunya pendidikan Islam di Indonesia. Ia juga melihat dinamika ormas-ormas Islam serta peran yang dilakukan oleh MPR dan DPR.

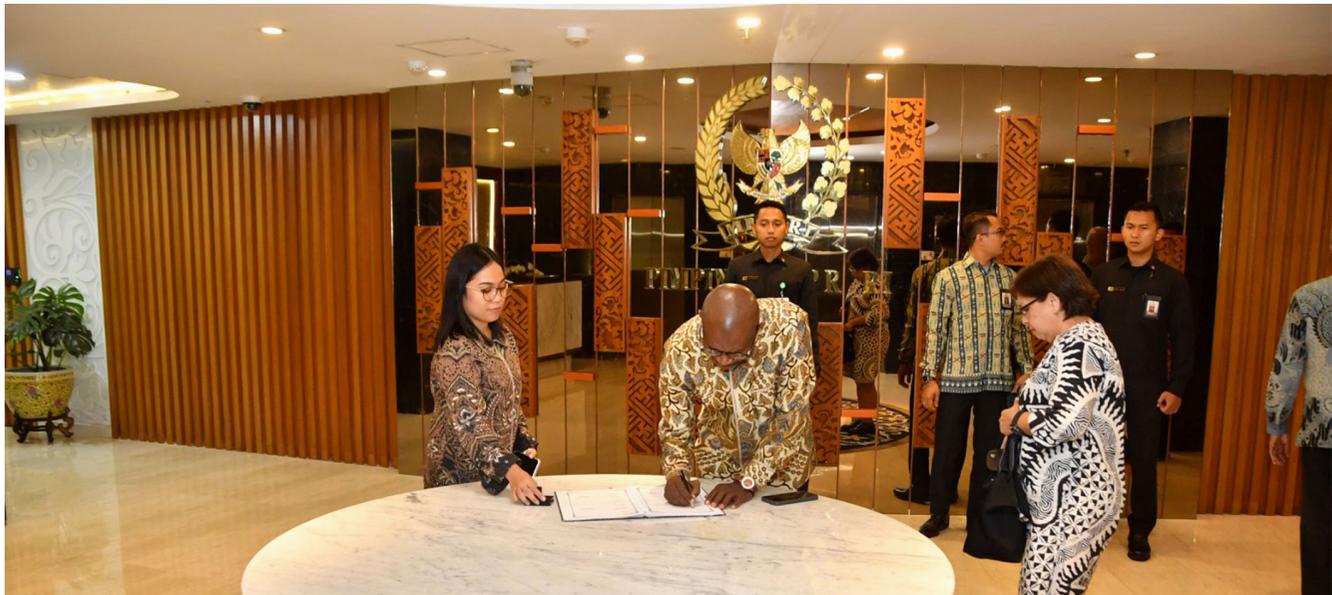


FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**K**EDATANGAN Duta Besar (Dubes) Rwanda untuk Indonesia, Sheikh Abdul Karim Harelimana, di Komplek MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, 30 April 2024, disambut hangat oleh Wakil Ketua MPR Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA.

Rwanda adalah negara yang berada di

Afrika bagian tengah. Negara ini berbatasan dengan Uganda, Tanzania, Burundi, serta Republik Demokratik Kongo.

Kehadiran tamu kehormatan, Abdul Karim yang didampingi Executive Assistant, Helen Mandagi, diterima oleh Hidayat Nur Wahid, atau biasa disapa HNW, di Ruang Kerjanya

Lt.9, Gedung Nusantara III. Dalam pertemuan yang menggunakan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris itu banyak hal yang dibahas oleh HNW dan Abdul Karim.

Kepada wartawan, HNW mengatakan, kedatangan Abdul Karim ke kompleks Parlemen untuk menindaklanjuti pertemuan yang telah dilakukan oleh Presiden Rwanda, Paul Kagame, dan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, pada tahun 2022 lalu. "Kedua negara telah bersepakat membuka hubungan langsung, dan Rwanda sudah membuka Kedutaan Besar di Indonesia," tambahnya. Dan, Abdu Karim merupakan Duta Besar pertama Rwanda di Indonesia.

Sedang untuk menjalin hubungan dengan Rwanda, sampai saat ini Indonesia masih melalui kedutaan besarnya yang ada di Kota Nairobi, Kenya. Duta besarnya masih dirangkap dengan beberapa negara Afrika lainnya. "Mereka ingin agar Indonesia segera membuka kedutaan besarnya di Rwanda," tutur Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

HNW mengatakan, sangat penting untuk meningkatkan hubungan Indonesia-Rwanda. Negara itu memiliki lokasi yang strategis di benua Afrika. Selain itu, negara yang beribukota di Kigali ini sekarang mengalami kemajuan yang pesat. Diakui di sana pernah terjadi konflik antarsuku, Hutu dan Tutsi, yang menimbulkan banyak korban jiwa, namun konflik tersebut akhirnya bisa berakhir dengan damai. "Mereka bisa bangkit setelah konflik antarsuku yang panjang," papar HNW yang juga menjadi Ketua Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor itu.

Selepas konflik dan bangkit, menurut HNW, Rwanda berubah dari negeri yang dulunya terbelakang menjadi negeri yang maju, bisa menghadirkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang baik, serta tercipta persatuan nasional yang kuat berbasiskan keragaman suku dan agama.

Dari beragamnya suku, agama dan golongan, dan kepentingan serta bisa menyudahi konflik antarsuku, bangsa Indonesia bisa menjadikan Rwanda sebagai mitra yang berpengalaman positif, agar potensi konflik serupa di tengah keberagaman dan

kepentingan itu tidak terjadi lagi, tidak terulang dan tidak menyebar. "Dengan mengedepankan keadilan, Rwanda merupakan salah satu negara yang berhasil mengatasi permasalahan peperangan antarsuku yang mengancam persatuan nasional" tuturnya.

Abdul Karim dalam kesempatan itu memuji keberagaman dan majunya pendidikan Islam di Indonesia. Ia juga melihat dinamika ormas-ormas Islam serta peran yang dilakukan oleh MPR dan DPR. "Hal-hal yang seperti ini, menurut Abdul Karim, merupakan sesuatu yang bisa dikerjasamakan dengan Rwanda," ujar HNW.

Hubungan antarpemerintah bagi HNW perlu ditingkatkan, sebab demokratisasi di Rwanda berjalan dengan baik, buktinya partisipasi perempuan Rwanda di parlemen mencapai 61%. Ketua Parlemen Rwanda juga perempuan. "Pemerintah di sana berharap adanya peningkatan kerjasama antarpemerintah," ungkap alumni Universitas Madinah, Arab Saudi, itu.

HNW juga sepakat bila hubungan antarpemerintah dan pemerintahan kedua negara ditingkatkan. Dikatakan, peningkatan hubungan kedua negara bisa terjadi apabila Indonesia telah membuka kedutaan besar di Kigali atau memperkuat kedutaan besarnya yang ada di Nairobi. "Dari sinilah selanjutnya hubungan perdagangan dan yang lainnya bisa diperkuat," pungkasnya. □



PAW Anggota MPR

# Bamsoet Ajak Seluruh Elemen Bangsa Perkuat Persatuan Indonesia

Mendekati akhir periode masa jabatan eksekutif dan legislatif juga masih dihadapkan pada berbagai tantangan kebangsaan, baik dari dalam maupun luar negeri, yang membutuhkan kejernihan sikap dan soliditas sebagai sebuah bangsa.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**K**ETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengingatkan, dalam waktu sekitar lima bulan ke depan, bangsa Indonesia akan dihadapkan pada rangkaian momentum konstitusional. Yaitu, Pelantikan Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada 1 Oktober 2024, serta Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024. Setelah berhasil melalui kontestasi politik dengan baik, kini saatnya seluruh elemen bangsa mengamalkan sila ke-3 Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia.

"Mari berikan ruang kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Pak Prabowo dan Mas Gibran agar bisa menyusun kabinet dengan baik. Sehingga dapat fokus menjalankan program kerja yang telah direncanakan untuk membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik, lebih sejahtera, adil dan makmur. Sesuai dengan

amanat Pembukaan Konstitusi, UUD NRI Tahun 1945," ujar Bamsoet usai memandu Pengucapan Sumpah/Janji Anggota MPR RI Pengganti Antar Waktu, di MPR RI, Jakarta,

Kamis (2/5/24).

Hadir para Wakil Ketua MPR RI, yakni Jazilul Fawaid dan Fadel Muhammad. Anggota MPR RI yang dilantik antara lain,





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Sitti Maryam dari Fraksi Nasdem Dapil Sulawesi Selatan II, Munawaroh dari Fraksi PPP Dapil Jawa Tengah X, Qumi Husnu-niyati dari Fraksi PKB Dapil Jawa Timur IV, dan Gede Ngurah Ambara Putra dari Kelompok DPD Dapil Provinsi Bali.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, mendekati akhir periode masa jabatan eksekutif dan legislatif juga masih dihadapkan pada berbagai tantangan kebangsaan. Baik dari dalam maupun luar negeri, yang membutuhkan kejernihan sikap dan soliditas sebagai sebuah bangsa.

Dari luar negeri, ketika konflik Rusia dan Ukraina belum usai, krisis kemanusiaan yang terjadi di tanah Palestina pun masih terus

menyita perhatian dan simpati seluruh warga dunia. Konflik antara Israel dan Iran semakin memanaskan suhu politik di kawasan Timur Tengah, serta berdampak pada eskalasi ketegangan geo-politik global

“Menyikapi kondisi ini, kita harus menjunjung tinggi amanat konstitusi untuk menentang setiap aksi kekerasan yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberadaban. Sikap tegas dan komitmen kita dalam mendukung perdamaian dunia serta menjunjung tinggi kemanusiaan, harus senantiasa kita perjuangkan melalui jalur diplomatik pada berbagai forum internasional,” jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, dari dalam negeri, bangsa Indonesia harus mewaspadai

dampak yang ditimbulkan oleh gejolak geopolitik global terhadap kondisi perekonomian domestik. Penguatan dolar Amerika terhadap rupiah membuat cadangan devisa kita turun cukup signifikan. Disrupsi rantai pasok global berpotensi menyebabkan naiknya harga komoditas, termasuk pergerakan harga minyak yang akan memengaruhi APBN dan perekonomian bangsa.

“Meskipun demikian, kita masih bersyukur bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi pada triwulan I tahun 2024 tetap tumbuh positif pada kisaran 5,17%. Ini menunjukkan kondisi perekonomian domestik kita masih cukup kuat di tengah tekanan global. Tren positif ekonomi dalam negeri ini harus terus kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan dari waktu ke waktu,” pungkas Bamsoet. □



## Kunjungan Country Head Youtube Indonesia

# Bamsoet Akan Giatkan **Sosialisasi** Empat Pilar MPR RI Melalui Kanal Youtube



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**K**ETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan pemilik akun Youtube 'Bamsoet Channel' Bambang Soesatyo mengajak Youtube Indonesia untuk bekerjasama memasifkan konten Sosialisasi Empat Pilar MPR RI guna menangkal berbagai potensi disintegrasi bangsa, radikalisme, intoleran, dan berbagai paham lainnya yang dapat memecah belah dan mengganggu kedaulatan bangsa. Selama ini, keberadaan Youtube di Indonesia telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

"Kajian Oxford Economics melaporkan bahwa para pelaku ekonomi kreatif yang menggunakan platform Youtube memberikan kontribusi mencapai Rp 7,5 triliun pada PDB Indonesia di tahun 2021. Serta mendukung lebih dari 200.000 pekerjaan setara purna waktu. Membuktikan bahwa para kreator Youtube Indonesia tidak hanya memberikan informasi, menghibur, dan menginspirasi audiensnya, tetapi juga menstimulasi ekonomi kreatif secara umum. Sehingga sangat tepat jika platform Youtube juga dimanfaatkan untuk menyebarkan wawasan kebangsaan guna mempererat ikatan kebangsaan," ujar Bamsoet usai menerima Country Head Youtube Indonesia Suwandi Widjaja, di Jakarta, Kamis (4/4/24).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang



Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, kontribusi Youtube yang besar terhadap PDB sangat signifikan dengan besarnya jumlah pengguna Youtube di Indonesia. Laporan We Are Social mencatat, jumlah pengguna Youtube di Indonesia mencapai 139 juta per Oktober 2023. Menempatkan Indonesia menjadi negara keempat dengan pengguna Youtube terbanyak di dunia. Menyusul Amerika Serikat dan Brazil yang menempati peringkat kedua dan ketiga dengan masing-masing 239 juta pengguna dan 144 juta pengguna.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Serta India yang masih menempati peringkat pertama dengan 462 juta pengguna.

"Youtube pertama kali diperkenalkan kepada dunia sejak tahun 2005. Masuk ke Indonesia sejak tahun 2012. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah

peningkatan kreator paling pesat di dunia. Setidaknya dari tahun 2021 sampai Juni 2022, jumlah kreator yang memperoleh Silver Button (100rb+ subscriber) naik 45%. Setidaknya, konten kreator yang memiliki subscriber diatas 1 juta mencapai 1.500

konten kreator. Sedangkan yang memiliki 10 juta lebih subscriber sudah mencapai 80 konten kreator," jelas Bamsuet.

Penerima Silver Play Button dari Youtube dalam program Creator Awards 2021 dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, Youtube sangat efektif dalam menjangkau anak muda (millennial & Gen-Z). Youtube juga memiliki daya jangkauan yang luas, dalam arti bukan hanya bisa dinikmati di kota-kota besar, tetapi juga ke kota kecil bahkan secara global.

"Kehadiran Youtube telah membuka peluang bagi berbagai pelaku usaha. Tidak hanya bagi pelaku ekonomi kreatif, melainkan juga bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Tak berlebihan jika Youtube telah membantu lebih banyak orang di seluruh Indonesia dalam memperbaiki taraf hidup dan mengoptimalkan potensinya," pungkas Bamsuet. □

## Implementasi Empat Pilar MPR

# Bamsoet Publikasikan Hasil Riset Ilmiah Terkait Empat Pilar Kebangsaan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**K**ETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Dosen Tetap Pascasarjana Program Doktor Hukum Universitas Borobudur Bambang Soesatyo mempublikasikan hasil riset ilmiah mengenai Empat Pilar Kebangsaan dalam Jurnal Ketahanan Nasional, Universitas Gajah Mada.

Riset ilmiah bertajuk: “Strategi Empat Pilar Kebangsaan bagi Pembangunan Generasi Muda dalam Menyongsong Bonus Demografi dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Kepulauan Riau”, itu dimuat dalam Jurnal Ketahanan Nasional, Universitas Gajah Mada Yogyakarta Vol. 30 tahun 2024.

“Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan strategi Empat Pilar Kebangsaan terhadap pembinaan generasi muda dalam menghadapi bonus demografi dan implikasinya terhadap ketahanan sosial Kepulauan Riau. Hasil riset ilmiah tersebut secara lengkap bisa diakses di link <https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/view/94857>,”

ujar Bamsoet di Jakarta, Kamis (25/4/24).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, bonus demografi merupakan peluang emas bagi bangsa Indonesia. Namun, permasalahan sosial yang ada akibat terbatasnya tenaga kerja menjadi ancaman terhadap peluang tersebut. Melalui rekonstruksi Empat Pilar Kebangsaan, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, penguatan generasi muda dilaksanakan sebagai upaya preventif dan pemahaman masyarakat.

“Saat ini bangsa Indonesia telah menapakkan kaki pada fase bonus demografi, di mana komposisi demografi didominasi penduduk usia produktif yang mayoritasnya adalah generasi muda. Titik puncak fase bonus demografi diperkirakan terjadi hingga tahun 2030, di mana jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 285 juta hingga 300 juta jiwa. Dari

jumlah tersebut, sekitar 70%-nya atau sekitar 199,5 juta hingga 210 juta jiwa adalah kelompok usia produktif,” kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum UNPAD dan Dosen Tetap Pascasarjana Universitas Trisakti serta Dosen Pascasarjana Universitas Pertahanan Nasional (UNHAN) RI ini menuturkan, hasil riset menemukan permasalahan utama di Kepri adalah penyelundupan pekerja migran ilegal, terutama di Kota Batam sebagai jalur penyelundupan menuju Malaysia atau Singapura. Ancaman disintegrasi bangsa muncul karena globalisasi, degradasi moral, dan ketidaktahuan masyarakat terhadap Empat Pilar Kebangsaan.

“Pemerintah Kepulauan Riau perlu meningkatkan upaya mengimplementasikan strategi Empat Pilar Kebangsaan untuk menguatkan nilai-nilai pendukung bonus demografi secara masif dan terstruktur. Stakeholders utama yang memerlukan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan adalah guru, pemuka agama, dan masyarakat, dengan pemerintah sebagai penggerak utama dan pencontoh nilai-nilai kebangsaan,” kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, peran masyarakat, terutama keluarga, sangat penting untuk membangun kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila. Secara implementatif, strategi Empat Pilar Kebangsaan yang diterapkan pada generasi muda untuk mendukung bonus demografi masih terbatas pada penyadaran.

Ke depannya dibutuhkan penyesuaian-penyesuaian dengan memanfaatkan kondisi sumber daya setempat. “Diperlukan juga model sosialisasi yang berbeda sesuai dengan target audiens, seperti melalui kegiatan keagamaan, seni budaya, dan literasi digital. Validitas informasi dan penggunaan media dengan cerita inspiratif dapat meningkatkan efektivitas sosialisasi,” pungkas Bamsoet. □

## Empat Pilar MPR di Rumah Aspirasi

# Fadel: Harus Jadi Motivasi untuk Terus Bersatu Bangun Bangsa



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**W**AKIL Ketua MPR RI, Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad, menegaskan bahwa selain menjadi panduan hidup seluruh rakyat Indonesia, Empat Pilar MPR –Pancasila sebagai dasar

negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai simbol negara — bisa dijadikan motivasi untuk terus bertahan dan bersatu dalam wadah



NKRI.

“Ingat tantangan dan hambatan bangsa ini ke depan, dari internal dan eksternal, sangatlah berat. Untuk itu, selain intelektualitas dan wawasan yang harus dijaga dan ditingkatkan, karakter dan jati diri harus sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa yang ada dalam Empat Pilar,” katanya.

Hal tersebut ditegaskan Pimpinan MPR RI dari kelompok DPD RI ini, dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Rumah Aspirasi Fadel Muhammad, Kota Gorontalo, Rabu (17/4/2024). Hadir dalam acara itu, staf khusus Wakil Ketua MPR Hasan Shahab, tokoh masyarakat, generasi muda, dan masyarakat sekitar.

Lebih jauh, mantan Gubernur Provinsi Gorontalo dua periode, ini mengungkapkan bahwa untuk membangun Indonesia tidak cukup hanya dengan mengandalkan ilmu pengetahuan dan penguasaan IPTEK semata, tapi juga harus dibarengi dengan nasionalisme yang tinggi dan sudah teruji.

“Perpaduan antara penguasaan IPTEK dan wawasan kebangsaan yang baik akan menjadi satu kekuatan besar untuk mengarahkan kapal besar bernama Indonesia ini ke tujuan akhir, yakni Indonesia yang maju, sejahtera rakyatnya, dikagumi negaranya,” imbuh Fadel Muhammad.

Sekali lagi, Fadel Muhammad mengajak rakyat Gorontalo dan seluruh rakyat Indonesia untuk tetap memegang teguh nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar MPR apapun kondisi bangsa dan negara ini.

“Makin berat kondisi bangsa ini maka harus semakin erat kita berpegang teguh kepada Empat Pilar MPR. Seperti Pemilu 2024 kemarin. Momen itu sangat berat, sebab seluruh bangsa harus mengalami pengkotak-kotakan karena perbedaan pilihan,” pungkasnya. □

Sarasehan Kehumasan

# Fadel Muhammad Ajak Seluruh Masyarakat Indonesia Memikirkan Masa Depan Bangsa

**W**AKIL Ketua MPR RI Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad mengingatkan seluruh rakyat Gorontalo dan juga seluruh rakyat Indonesia bahwa ketika pemilu sudah usai maka lupakanlah semua kontroversi. Saatnya bersatu memikirkan masa depan bersama. Sebab, tanpa kekuatan seluruh elemen masyarakat, akan sangat mustahil bangsa ini sejahtera.

Hal tersebut disampaikan Fadel Muhammad saat menjadi narasumber acara Sarasehan Kehumasan MPR RI Menyapa Sahabat Kebangsaan' dengan tema: Membangun Keharmonisan dan Stabilitas Pasca Pemilu. Acara ini diselenggarakan MPR bekerjasama dengan Aliansi Mahasiswa dan Pelajar Kawasan Paguyaman Raya Gorontalo, di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Rabu (17/4/2024).

Hadir dalam kegiatan tersebut staf khusus Wakil Ketua MPR Hasan Shahab, pengurus dan anggota Aliansi Mahasiswa dan Pelajar, tokoh masyarakat, dan generasi muda setempat sebagai peserta.

Generasi muda, lanjut Pimpinan MPR dari Kelompok DPD RI ini, mesti menjadi agen



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

menjaga harmonisasi dan menularkannya di lingkungan masing-masing. "Ini penting, sebab kita tidak ingin perseteruan pilpres, pileg berlarut-larut. Apalagi kita akan menghadapi pilkada," jelasnya.

Untuk itu, sekali lagi Fadel Muhammad mengingatkan semua untuk secara bersama

menjaga harmonisasi hubungan antaranak bangsa. "Saya harapkan, mudah-mudahan momen Idul Fitri kali ini akan membawa harmonisasi lebih kental lagi," imbuhnya.

Terkait pilkada yang kelak akan berlangsung, Fadel Muhammad mengingatkan agar rakyat dan generasi muda, khususnya di Gorontalo, untuk memilih dengan sangat hati-hati. Pilihlah pemimpin yang sudah jelas kerja dan kontribusinya untuk daerah. "Jangan memilih pemimpin yang tidak memiliki semangat untuk membangun daerah. Sebab, pemimpin akan menentukan masa depan daerah dan rakyatnya," tandasnya.

Dalam kesempatan itu, Fadel Muhammad juga memberikan pemahaman tentang lembaga MPR RI. MPR, jelas Fadel, adalah rumah besarnya rakyat, sahabatnya rakyat. Sebagai rumah besar rakyat, MPR membuka diri kepada rakyat tanpa kecuali. "Salah satu bentuknya keterbukaan itu, MPR menyediakan berbagai jalur informasi, seperti website, media social, jika rakyat ingin mengetahui segala hal tentang MPR, baik fungsi, kewenangan, dan tugas pokoknya," pungkasnya. □



Halalbihalal di Lingkungan Setjen MPR

# Siti Fauziah: Ruang Silaturahmi Antarpegawai dan Para Purnabakti



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**S**UDAH menjadi sebuah tradisi, bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri setiap tahunnya, Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI menyelenggarakan acara Halalbihalal diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan Setjen MPR RI dan sekaligus Pelepasan Pegawai Purnabakti.

Untuk Idul Fitri 1445 Hijriyah tahun ini, acara Halalbihalal dan Pelepasan Pegawai Purnabakti berlangsung hari Jum'at (3 Mei

2024) di Ruang Delegasi, Komplek MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta. Lebih dari 300 pegawai di lingkungan Setjen MPR menghadiri acara yang dimulai sejak pukul 09.00 itu.

Di antara para pejabat dan pegawai Setjen MPR yang telah menjalani masa purnabakti, di antaranya tampak dua mantan Sesjen MPR. Keduanya adalah: Dr. Rahimullah, SH., MH., dan Drs. Eddie Siregar, M.Si., serta para purnabakti lainnya.

Plt. Sesjen MPR RI, Siti Fauziah, M.Si., dalam sambutannya, mengucapkan syukur kepada Allah, karena pada hari ini seluruh pegawai dan para purnabakti mendapat berkah, sehingga dapat menghadiri acara halalbihalal ini, "Setelah berpuasa satu bulan penuh, hari ini kita menjalin silaturahmi," tuturnya.

Kebetulan penyelenggaraan acara halalbihalal ini berlangsung di hari baik, hari Jumat. "Kita gelar pagi hari, sebab hari Jumat di mana bapak-bapak sebentar lagi akan menunaikan ibadah salat Jumat", tuturnya sembari tersenyum.

Lebih lanjut, Bu Titi, begitu dia biasa disapa, menyatakan, acara yang digelar rutin setiap tahun tersebut sebagai hal yang baik. Dia berharap, acara halalbihalal dan silaturahmi antarpegawai yang masih aktif dan para purnabakti dijadikan tradisi tahunan. Karena, sebut perempuan asal Kota Bandung ini, selain memberi makna dan hikmah yang mendalam, juga menjadi ajang untuk mempertemukan semua keluarga besar Setjen MPR.

"Kegiatan ini selalu mendapat respon yang baik dari seluruh keluarga besar Setjen MPR", ujarnya. Untuk itu, Bu Titi memberi dorongan kepada para pegawai MPR selanjutnya agar kegiatan semacam ini dilakukan secara rutin. "Dengan silaturahmi inilah semua akan berjalan dengan baik," katanya.

Dalam kesempatan itu, Bu Titi juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pegawai purnabakti dan para pegawai yang selama ini telah melakukan pengabdian dan kinerjanya di lingkungan Stjen MPR RI. Dan, tak lupa selaku Plt. Sesjen MPR RI dan pribadi, Bu Titi mengucapkan: Selamat Idul Fitri 1445 Hijriyah, Minal Aidin wal Faizin.

Acara Halalbihalal dan Pelepasan Pegawai Purnabakti yang bertepatan dengan Idul Fitri 1445 Hijriyah ini diakhiri dengan secara bersama-sama saling berjabat tangan dan saling maaf-memaafkan. □



## Rapat Pimpinan MPR RI

# Bamsoet MPR RI Periode 2019-2024 Tengah Siapkan Berbagai Legacy



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**K**ETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengungkapkan, MPR RI periode 2019-2024 sudah dan sedang mempersiapkan berbagai legacy (peninggalan). Antara lain Forum MPR se-Dunia, UU MPR, Pembentukan Badan Kehormatan MPR, Tata Tertib MPR RI yang baru, serta Bentuk Hukum dan Substansi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Pembentukan Forum MPR se-Dunia (Forum for World Consultative Assembly) yang diinisiasi oleh MPR RI sudah terwujud dengan disetujui pembentukannya oleh 15 negara, serta Parliamentary Union of the OIC Members States/PUIC (Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam/OKI) dan Muslim World League (Liga Muslim Dunia) pada Oktober 2022 lalu di Bandung, Jawa Barat.

“Legacy lain yang sedang berjalan, yakni mengenai kehadiran UU MPR. Sangat penting bagi lembaga keparlemen seperti MPR, DPR, dan DPD untuk menjalankan amanat ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Khususnya Pasal 2 Ayat (1), Pasal 19 Ayat (1), dan Pasal 22C Ayat (4), yang mengamanatkan bahwa kelembagaan MPR, DPR, dan DPD diatur dengan undang-undang tersendiri,” ujar Bamsoet dalam Rapat Pimpinan MPR RI,

Senin (29/4/24).

Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI, antara lain Ahmad Basarah, Jazilul Fawaid, Hidayat Nur Wahid, Amir Uskara, dan Fadel Muhammad.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, pemisahan UU MPR, UU DPR, dan UU DPD sangat penting. Mengingat masing-masing lembaga memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda. Misalnya, lembaga permusyawaratan rakyat yang memiliki kewenangan tertinggi untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar berbeda dengan DPR dan DPD yang merupakan lembaga perwakilan rakyat.

“Sehingga perlu ada UU MPR, UU DPR, dan UU DPD yang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Tidak seperti saat ini yang bergabung dalam UU MD3. MPR RI melalui Badan Pengkajian sudah menyelesaikan usulan naskah akademik dan rancangan UU MPR. Dalam waktu dekat, pimpinan MPR akan bertemu Pimpinan DPR untuk membahas pemisahan UU MD3 menjadi UU MPR, UU DPR, dan UU DPD, sebagai implementasi perintah undang-undang dasar,” jelas Bamsoet.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Dosen Ilmu Hukum UNPAD dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini

menerangkan, MPR RI juga akan menghadirkan payung hukum pembentukan Badan Kehormatan MPR RI melalui

perubahan Tata Tertib MPR RI yang dilakukan dalam Rapat Gabungan Pimpinan MPR RI bersama Pimpinan Fraksi, Kelompok DPD, dan Alat Kelengkapan.

“Rapat Gabungan juga akan membahas bentuk hukum dan substansi PPHN. Serta membahas perubahan lain dalam Tata Tertib MPR RI untuk merubah/menyesuaikan beberapa ketentuan. Antara lain, mengenai Kewenangan MPR untuk mengeluarkan Tap MPR (yang bersifat beschikking dan bukan regeling) untuk menetapkan Presiden dan Wakil Presiden, berdasarkan Keputusan KPU; Perbaikan rumusan jenis putusan dan nomenklatur penulisan putusan/keputusan pada pasal 99 dan 100 Tata Tertib MPR; serta penyelenggaraan sidang tahunan MPR untuk memfasilitasi penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara secara langsung,” pungkas Bamsuet. □

## Lomba MTQ 2024 di Lingkungan Parlemen



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**S**EKRETARIAT Jenderal MPR RI bersama Sekjen DPR dan DPD menggelar lomba Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) di lingkungan kerja Parlemen, Senayan, Jakarta. Lomba ini diikuti 68 peserta berlangsung di Masjid Baiturrahman oleh Korpri MPR, DPR, dan DPD. Diselenggarakan dalam rangka mengisi kegiatan keagamaan selama Ramadan 1445 Hijriyah.

Lomba MTQ merupakan salah satu rangkaian dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan di lingkungan Parlemen dalam rangka mengisi bulan Ramadan 1445

Hijriyah. Selain MTQ, kegiatan lainnya adalah memberi santunan pada anak yatim dan ikaf.

Penutupan sekaligus pengumuman pemenang Lomba MTQ dilaksanakan pada hari Selasa (02/4/2024). Perwakilan Setjen MPR RI menyabet dua kategori lomba, yakni: Juara II MTQ atas nama Eti Nurmawati (ASN Setjen MPR). Lalu, juara II untuk cabang Da'I diraih oleh Hariyanto, juga ASN Setjen MPR RI.

Plt. Sesjen MPR RI Siti Fauziah berharap agar prestasi yang didapat oleh perwakilan Setjen MPR RI dipertahankan dan ditingkatkan

lagi di kemudian hari. Dan, juga berharap agar kegiatan bermanfaat ini terus dipertahankan, sebab selain untuk mengisi kegiatan keagamaan di bulan suci Ramadan juga untuk memupuk kecintaan kepada agama, bangsa, dan negara.

Adapun para pemenang lomba MTQ secara lengkap untuk putera, masing-masing: Juara I cabang Tilawah Putra adalah Jalaludin (ASN Setjen DPR RI); Juara II Aidil Fitriyah (Tenaga Ahli Setjen DPR RI), dan Juara III Yazid Manan (Cleaning Service Setjen DPR RI). Sementara untuk cabang Tilawah Puteri, masing-masing: Juara Harapan I Imeldayati (ASN Setjen DPD RI), dan Juara Harapan II Nur Miftahulyanah (ASN Setjen DPR RI).

Lalu untuk cabang Tartil Putera, juara I diraih oleh Jamaludin (TSP Setjen DPR RI); Juara II Rehanul (Staf Anggota Setjen DPR RI), dan Juara III M. Hendar (TSP Setjen DPR RI). Sedangkan untuk cabang Tartil Puteri, yaitu: Juara I Desi Pareni (ASN Setjen DPD RI), Juara II Eti Nurmawati (ASN Setjen MPR RI), dan Juara III Nensiana (ASN Setjen DPD RI).

Kemudian untuk cabang Da'I dimenangkan oleh: Juara I Moch. Thamrin (TSP Setjen DPR RI), Juara II Hariyanto (ASN Setjen MPR RI), dan Juara III Saepuluh (PPNPN Setjen DPD RI). Dan, untuk cabang Da'iyah: Juara Harapan I Septiani Puji Rahayu (ASN Setjen DPR RI), dan Juara Harapan II Maghfira (ASN Setjen DPR RI). □



Di Masa Transisi Kepemimpinan Nasional

## Bamsoet: Pimpinan MPR Akan Bangun Komunikasi Politik



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**K**ETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan, menjelang transisi politik kepemimpinan nasional, MPR RI kembali akan melakukan Silaturahmi Kebangsaan ke berbagai tokoh bangsa. Antara lain, Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Maruf Amin; Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo - Gibran; Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, dan Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno, Wapres ke-9 Hamzah Haz, Wapres ke-10

dan 12 Jusuf Kalla, Wapres ke-11 Boediono; para mantan Ketua MPR RI; pimpinan partai politik; serta pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan termasuk organisasi keagamaan.

"MPR RI juga akan menyelenggarakan Silaturahmi Nasional Kebangsaan dengan menggunakan format pertemuan Meja Bundar, bersama pimpinan lembaga negara. Membahas berbagai hal penting seputar kebangsaan untuk memastikan transisi pemerintahan berjalan efektif dan efisien," ujar Bamsoet dalam Rapat Pimpinan MPR RI,

Senin (29/4/24).

Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI, antara lain: Ahmad Basarah, Jazilul Fawaid, Hidayat Nur Wahid, Amir Uskara, dan Fadel Muhammad.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Silaturahmi Kebangsaan diperlukan agar MPR RI bisa tetap membumi di berbagai kalangan. Menjadi Rumah Kebangsaan yang menjaga kemajemukan bangsa, pengawal ideologi Pancasila, serta penegak konstitusi dan kedaulatan rakyat. Menjadi benteng bagi tetap berdirinya NKRI.

"Sekaligus memastikan bahwa perjalanan bangsa ini tetap tegak lurus dan bermuara pada terwujudnya cita-cita nasional yang telah digariskan oleh para pendiri bangsa, yaitu menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur," jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, Silaturahmi Kebangsaan dilandasi pada prinsip bahwa kemerdekaan yang diraih sejak 78 tahun yang lalu tidaklah terlahir dari ruang hampa. Bukan pula didapatkan secara instan, ataupun hasil pemberian. Tetapi, buah dari perjuangan dan pengorbanan yang didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, yang dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kerja keras dan perjuangan para pendiri bangsa, sejak dulu dan dilanjutkan hingga saat ini, menjadi modal bangsa kita dalam melangkah menuju Indonesia Emas 2045.

"Indonesia Emas yang dicita-citakan adalah Indonesia yang rakyatnya sejahtera, yang ditandai dengan nihilnya angka kemiskinan. Indonesia yang memiliki pengaruh kuat dalam pergaulan dunia dengan dukungan sumber daya manusia yang tangguh dan berdaya saing global. Serta Indonesia yang ramah lingkungan dalam pengelolaan negara. Mewujudkannya, tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak saja. Melainkan perlu gotong royong dari berbagai pihak dan kalangan," pungkas Bamsoet. □





FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**Dr. Abdul Kharis Almasyhari**, Anggota MPR Fraksi PKS

## Revisi UU Penyiaran Agar Jagad Siaran Indonesia Menjadi Lebih Baik

**D**EWAN Perwakilan Rakyat (DPR) sedang membahas Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran atau UU Penyiaran. Saat ini, Revisi UU Penyiaran yang merupakan usul inisiatif DPR sudah berada di Badan Legislasi (Baleg) DPR. UU Penyiaran ini sudah berusia dua dasa warsa lebih sehingga diperlukan revisi, karena sudah tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi digital yang begitu pesat. Untuk itu, DPR sudah mengusulkan Revisi UU Penyiaran pada 2 Oktober 2023 lalu.

Berdasarkan draf Revisi UU Penyiaran, ada perluasan definisi penyiaran. Semula hanya dikenal media penyiaran konvensional, seperti TV swasta, TV berbayar, hingga TV komunitas. Dalam Revisi UU Penyiaran ada kategori baru, yaitu platform penyiaran digital, adalah penyiaran di luar media penyiaran konvensional, semisal Netflix, VIU, podcast, dan sebagainya.

Bila selama ini Komisi Penyiaran

Indonesia (KPI) hanya mengawasi pelaksanaan standar isi siaran (SIS) di media penyiaran konvensional maka dalam Revisi UU Penyiaran ini, KPI juga akan mengawasi SIS pada konten siaran di lembaga penyiaran dan/atau penyelenggara platform digital penyiaran.

Konten siaran adalah materi siaran digital yang diproduksi oleh penyelenggara platform digital penyiaran atau penyelenggara platform teknologi penyiaran lainnya, baik perseorangan maupun lembaga yang menyelenggarakan konten siaran melalui platform digital penyiaran.

Saat ini media penyiaran konvensional mendapat kontrol yang kuat dari KPI dan membayar pajak. Sebaliknya, platform penyiaran digital bebas kejar tayang dan tidak membayar pajak. Maka, dalam Revisi UU Penyiaran, regulasi atau aturan-aturan penyiaran yang berlaku pada TV konvensional juga berlaku pada penyiaran digital. Begitu pula larangan dan sanksi

administrasi yang diberikan oleh KPI sama untuk penyiaran digital maupun TV konvensional. Larangan atas konten siaran digital di antaranya tayangan terkait narkoba, perjudian, rokok, alkohol, aksi kekerasan, mengandung unsur mistik, hingga perilaku LGBT.

Bagaimana perkembangan pembahasan Revisi UU Penyiaran ini? Berikut penuturan anggota MPR dari Fraksi PKS yang juga Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dr. Abdul Kharis Almasyhari. Petikannya.

### Sejauh ini bagaimana perkembangan pembahasan Revisi UU Penyiaran?

Revisi UU Penyiaran sudah berada di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Sudah kami kirimkan (dari Komisi I) draf yang sudah kita selesaikan ke Badan Legislasi, untuk dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi. Kami sudah dua kali mengadakan rapat pembahasan Revisi UU Penyiaran ini bersama Badan Legislasi. Kita berharap bisa

mengadakan rapat satu kali lagi bersama Badan Legislasi, mudah-mudahan pembahasan draf Revisi UU Penyiaran ini bisa diselesaikan.

Setelah itu, kalau pembahasan Revisi UU Penyiaran ini sudah selesai dan disetujui oleh Badan Legislasi maka kita akan bawa ke Rapat Paripurna DPR. Bila nanti disetujui oleh Rapat Paripurna DPR, selanjutnya draf Revisi UU Penyiaran yang sudah disetujui sebagai usul inisiatif DPR itu akan dikirimkan ke pemerintah. Nanti, dari pemerintah akan membuat DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) sandingan yang akan dikirim ke kita untuk memulai pembahasan revisi UU ini.

Kalau nanti sudah ada DIM sandingan dari pemerintah, rasanya mudah-mudahan tidak terlalu lama kita bisa selesaikan pembahasan Revisi UU Penyiaran ini. Sebab, dari tiga isu besar dalam UU Penyiaran ini, dua isu sudah diselesaikan (termaktub) dalam UU Cipta Kerja, yaitu isu multiplexing dan isu analog switch off. Dua isu itu sudah selesai di UU Ciptaker yang lalu. Dan, sekarang tinggal masalah atau isu isi siaran.

**Kira-kira apa yang membedakan antara UU Penyiaran dengan Revisi UU Penyiaran yang sedang dibahas ini, atau apa yang direvisi dari UU Penyiaran ini?**

Revisi UU Penyiaran ini nanti lebih pada masalah-masalah isi siaran. Perubahan atau revisi pada UU Penyiaran ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi siaran yang begitu pesat. Terutama pada isi siaran, sehingga dalam revisi pada UU Penyiaran ini ada hal-hal yang perlu kita tambahkan. Kami melihat memang perlu ada tambahan-tambahan itu. Isu sentral dalam Revisi UU Penyiaran ini adalah isi siaran. Isi siaran tentunya akan menyangkut peraturan terhadap seluruh bentuk siaran, dan dalam bentuk media apapun.

**Apakah UU Penyiaran setelah direvisi nanti juga akan mengatur media sosial (twitter, Instagram, facebook, youtube)?**

Ini berbeda. RUU Penyiaran ini bukan membatasi media sosial. Yang menjadi perhatian dalam Revisi UU Penyiaran ini menyangkut siaran. Jadi berbeda, media sosial dan siaran. Ini beda domain dengan media sosial. Jadi, kalau bentuknya siaran maka diatur dalam UU ini.

**Bagaimana dengan siaran digital,**

**apakah masuk dalam ketentuan yang diatur dalam UU Penyiaran?**

Iya, siaran digital masuk dalam kategori siaran. Sepanjang berbentuk siaran maka diatur dalam UU Penyiaran. Jadi, kalau Anda menyiarkan sesuatu, dan masuk dalam kategori siaran, tentu akan diawasi oleh KPI.

**Apakah kategori siaran itu termasuk Podcast?**

Iya, termasuk *Podcast* dan sebagainya. Itu dikategorikan siaran.

**Apakah bisa dijelaskan lebih rinci, apa yang diatur dalam Revisi UU Penyiaran ini?**

Jadi, begini. Kita membandingkan kalau di televisi terrestrial atau TV konvensional (sistem penyiaran televisi yang tidak melibatkan transmisi satelit, biasanya menggunakan gelombang radio melalui pemancar atau antena televisi) diatur dengan

hal-hal seperti itu harus kita atur.

**Apakah artinya aturan dan ketentuan yang berlaku untuk penyiaran konvensional juga berlaku pada penyiaran digital, termasuk soal standar materi atau isi siaran, sanksi administratif, pajak, dan sebagainya?**

Iya, nanti ada kesamaan ketentuan dan aturan baik untuk penyiaran konvensional maupun penyiaran digital. Baik *live streaming* maupun rekaman, *podcast* dan sebagainya itu menjadi satu dan sama dengan siaran TV. Baik TV maupun digital bisa diakses tidak hanya pada saat siaran itu tayang. Jadi, statusnya relatif sama. Tujuannya bukan untuk membatasi, melainkan untuk menjunjung etika bersama agar jagad siaran di Indonesia itu menjadi lebih baik.

**Apakah ada target Revisi UU Penyiaran ini akan diselesaikan?**



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

UU Penyiaran, tetapi kenapa platform penyiaran digital bisa bebas. Paham ya? Akhirnya, di media baru (platform penyiaran digital) bebas siaran tanpa aturan, sedangkan TV konvensional diatur izin, dan sebagainya dengan *rigid* atau ketat.

Jadi, dasarnya dengan revisi UU Penyiaran ini agar ruang siar atau jagad siar Indonesia itu kondusif dan aman buat anak-anak, misalnya. Contoh, beberapa waktu lalu ada penyelenggara yang bentuknya siaran tiba-tiba menggunakan bahasa “misuh-misuh” atau bahasa yang mengumpat atau memaki. Siaran seperti itu tentu akan memengaruhi anak-anak. Akhirnya, bahasa “maki-maki” itu menjadi tren yang dipakai anak-anak. Jadi,

Sebelum periode DPR sekarang berakhir ditargetkan pembahasan Revisi UU Penyiaran ini bisa selesai. DPR RI periode 2019 – 2024 masih memiliki dua kali masa sidang. Sepanjang Baleg segera membahas Revisi UU Penyiaran, dan bisa disahkan sebagai usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna, lalu kita kirimkan draf Revisi UU Penyiaran ke pemerintah, dan pemerintah membuat DIM sandingannya, saya kira bisa selesai karena masih ada dua kali masa sidang. Satu kali masa sidang, kita harapkan Revisi UU Penyiaran ini bisa disahkan menjadi undang-undang. Artinya, tahun ini diharapkan kita bisa mengesahkan Revisi UU Penyiaran menjadi undang-undang. □

# Lolos ke Senayan, Akan Majukan

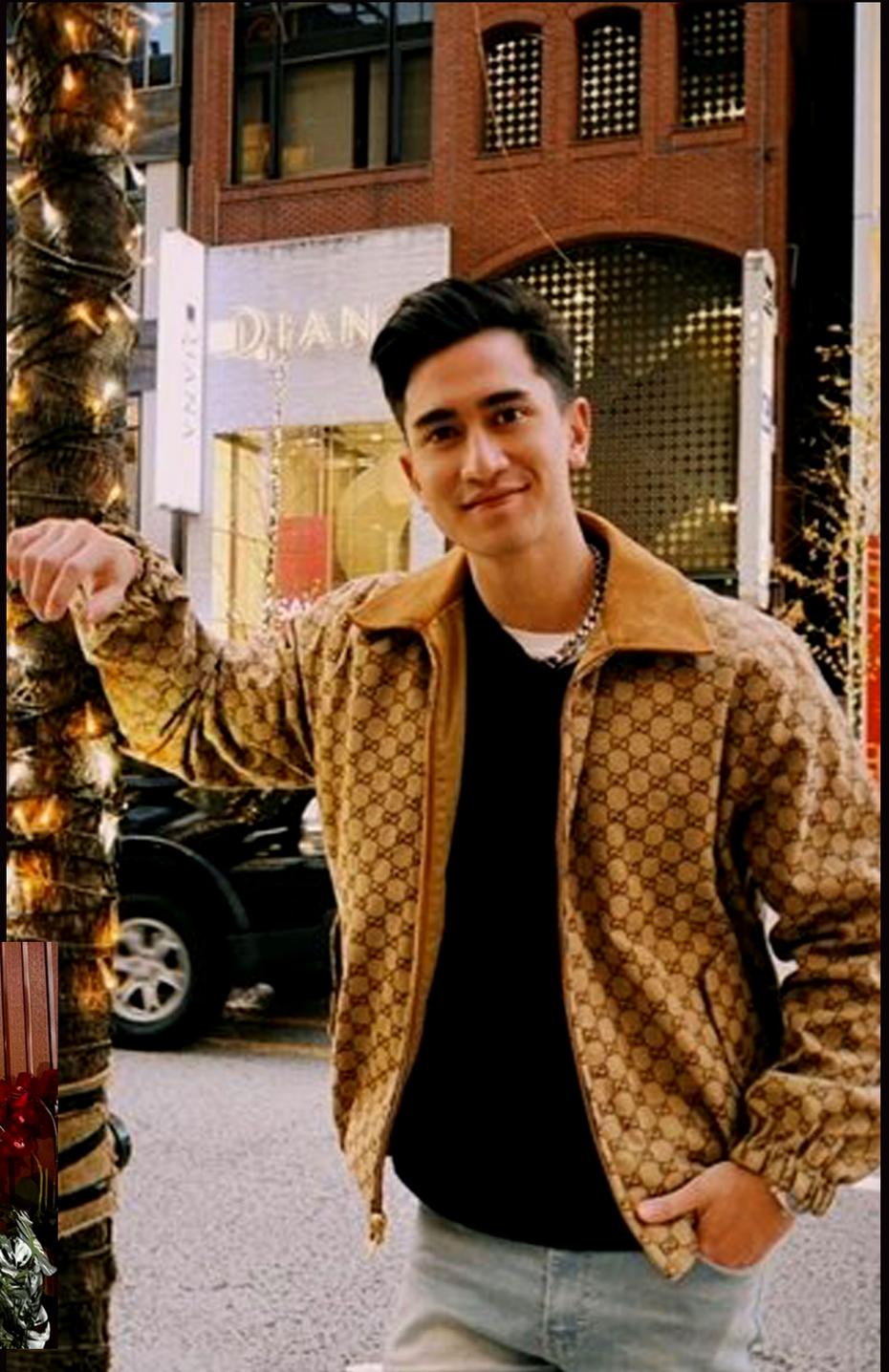
*Generasi Muda*

**A**KTOR Verrell Bramasta Fadilla Soedjoko, atau biasa disapa **Verrell Bramasta**, tak lama lagi berkantor di Senayan, Jakarta. Pemain sinetron kelahiran 1996, yang juga putera artis Venna Melinda ini, dalam Pemilu Legislatif 2024 berhasil meraih tiket ke Senayan. Dia tercatat sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 dari Partai Amanat Nasional (PAN) dapil Jawa Barat VII.

“Saya bersyukur baru pertama kali terjun politik, langsung dipercaya rakyat. Saya akan berjuang untuk kepentingan rakyat, khususnya anak muda, agar maju dan berkembang,” begitu janji Verrell bila kelak sudah duduk sebagai anggota DPR RI di Senayan.

Verrell menyatakan, dia akan fokus pada milenial dan gen-Z. “Karena 60% populasi dapil aku itu anak-anak muda dan juga pelaku UMKM,” ujar Aktor Sinetron Tepopuler di Indonesian Television Awards 2020 ini. Dia mengaku, punya ide untuk membuat Indonesia lebih baik lagi. □

DER



*Varrell Bramasta*

## Bangga Anak Masuk Seleksi Timnas U-16

**T**ERSEBAR kabar Diego Andres Sinathrya, putera kedua pasangan artis **Donna Agnesia** dan Darius Sinathrya, dipanggil mengikuti seleksi Timnas sepakbola U-16. Benarkan? "Seleksinya sih tanggal 1-4 Mei 2024 di Yogyakarta. Semoga Diego bisa memberikan yang terbaik. Apapun hasilnya kita harapkan yang terbaik," ujar Donna Agnesia tentang kabar itu.

Donna menyatakan, masuk Timnas memang mimpi anak saya. Apalagi bisa lolos seleksi dan sampai bisa berlaga membela nama bangsa. "Ya, saya harap lolos seleksi," ujar Donna yang mulai dikenal sebagai penggemar olahraga sepakbola, setelah menjadi pemandu acara siaran langsung Ligue 1 di stasiun TV BeIN Sports ini.

Artis yang tercatat pernah menjadi presenter Piala Dunia 2022 ini juga berkomentar tentang perjuangan Timnas U-23 di Piala Asia AFC. "Saya bangga melihat perkembangan Timnas di bawah asuhan Shin Tae Yong. Saya berharap, Indonesia bisa berjaya, bukan hanya di Asia Tenggara atau Asia, tapi juga tingkat dunia," katanya. □

DER



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**Donna Agnesia**



**Shareefa Daanish**

## Banyak Adegan Ekstrim Dilakukan Sendiri

**A**RTIS film, presenter, dan model Shareefa Daanish Sumartono atau **Shareefa Daanish** sangat *excited* membintangi film bergenre horror berjudul: 'Menjelang Ajal.' Film yang disutradarai Hadrah Daeng Ratu ini memang mengikuti tren film horror yang penuh sajian *jump scare* yang sedang marak di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir ini.

Dalam film tersebut, artis berdarah Jawa, Sunda, dan Tionghoa, kelahiran London, Inggris, kelahiran 21 Juni 1982, ini berperan sebagai seorang ibu bernama Sekar yang mendapatkan teror jin akibat memakai penglaris. Untuk kebutuhan efek visual, sosok Sekar ditampilkan terbang, tubuh terlempar hingga kayang.

Meski disediakan jasa stuntman, ternyata artis yang namanya melejit sejak berperan sebagai Barista dalam serial komedi situasi 'The Coffee Bean Show' di tahun 2007 ini, hampir semua adegan dia lakukan sendiri. "Saya rasain bisa melakukannya *koq*, kenapa *gak*? Jadinya, 80% adegan di film itu saya lakukan sendiri, kecuali kalau *gak* mungkin bisa dilakukan, baru saya minta diganti," kata Shareefa di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (26/4/2024). □

DER



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

## Gereja Sion Salah Satu Saksi Sejarah Kolonialisme di Jakarta

**S**ELAMA lebih dari tiga setengah abad kaum kolonialis menjajah Indonesia, banyak meninggalkan bukti sejarah. Mulai dari rumah dinas, gedung pekantoran, berbagai infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bendungan, juga penjara hingga rumah ibadah. Bukti-bukti sejarah, itu tersebar luas diseantero Indonesia. Tak terkecuali yang berada di sudut Jalan Pangeran Jayakarta dan Mangga Dua Raya Jakarta Pusat. Bukti sejarah yang ada di tempat itu adalah rumah ibadah tua bernama Gereja Sion.

Sion adalah salah satu gereja tertua di Indonesia. Peletakan batu pertama gereja ini dilakukan pada 19 Oktober 1693. Setelah dua tahun proses pembangunannya, pada 1695 gereja dengan nama asli *Portugeesche Buitenkerk* atau Gereja Portugis, itu diresmikan.

Perubahan nama gereja Portugis menjadi Sion terjadi pada 1957. Saat itu, persidangan Sinode GPIB Gereja Portugis memutuskan, mengubah namanya menjadi GPIB Jemaat Sion. Oleh masyarakat bangunan tersebut kemudian dikenal sebagai Gereja Sion. Nama Sion sendiri berasal dari nama sebuah bukit di daerah Palestina berbahasa Ibrani dan merupakan lambang keselamatan pada



bangsa Israel kuno.

Tertarik dengan kemasyhurannya, *Majalah Majelis* pun menyempatkan diri melihat secara langsung keberadaan dan perawatan terhadap bangunan yang sudah menjadi cagar budaya itu. Karena itu, pada Ahad beberapa waktu lalu kami pun berangkat dan melihat langsung keberadaan Gereja Sion dari dekat.

Gereja Sion berada tak jauh dari Stasiun Kota. Dari stasiun ke arah Mangga Dua, jaraknya sekitar 200 meter saja. Dari Stasiun kami berjalan kaki memakan waktu tak lebih

dari sepuluh menit. Kemudian melintas di atas jembatan penyeberangan orang (JPU), dan saat urun kita sudah berada persis di depan Gereja Sion.

Saat kita melewati JPU, dari ketinggian, di sekeliling Gereja Sion sudah tampak mobil-mobil yang diparkir beserta para jemaatnya. Tidak itu saja, tampak pula plank sekolah yang ada di lingkungan Gereja Sion, mulai dari TK, SD, sampai SMP. .

Pada hari Ahad, saat Majelis ke sana, terlihat masih banyak jemaat yang berkerumun. Pada saat itu jam menunjuk pukul 13.10 WIB. Rupanya mereka yang masih berada di Sion sengaja berlama-lama memanfaatkan pertemuan untuk saling melepas kangen.

"Ini hari Ahad ada dua kali kebaktian di Gereja Sion, yaitu jam 07.00 WIB dan 10.00 WIB. Mereka yang masih bertahan di sini, sengaja berlama-lama untuk melepas kangen dengan sesama jemaat. Maklum, mereka juga jarang bertemu, sementara rumah mereka saling berjauhan. Jemaat sendiri betah berada di sini, karena suasananya tenang," ungkap Waspo Kepala Tata Usaha Gereja Sion.

Menurut Waspo, saat ini jemaat Sion di



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

dominasi oleh orangtua. Salah satunya karena daerah di sekitar gereja semakin tidak layak untuk tempat hunian. Akibatnya, kebanyakan jemaat berusia muda memilih pindah tempat, dan menyisakan para orangtua.

Karena itu, jangan heran bila selesai kebaktian suasana di gereja Sion masih terlihat ramai. Bahkan hingga lewat tengah hari, atau sekitar pukul 14.00 WIB masih ada warga yang berkerumun di tempat tersebut.

### Altar Antik

Sebagai peninggalan kolonialis, Gereja Sion memiliki arsitektur dan struktur bangunan yang sangat kuat. Sion berdiri di atas tanah seluas 6.725 meter persegi. Gereja Sion merupakan gedung tertua di Jakarta yang peruntukannya masih sama seperti awal didirikan. Gereja ini memiliki enam pilar yang cukup besar. Dalam usianya yang menginjak 329 tahun, keenam pilar Gereja Sion masih terlihat kokoh, kecuali cat tembok warna putih yang menutupi pilar-pilat tersebut terlihat mulai kusam.

Keenam pilar dalam Gereja Sion menopang bagian langit-langit kayu yang sama tingginya dan melengkung seperti setengah tong. Konon bentuk arsitektur itu membuat suara di dalamnya terdengar bulat dan tidak menimbulkan gema.

Di atas langit-langit terdapat puluhan balok kayu ulin yang masih utuh dan sangat kuat untuk menopang ratusan genteng yang ada di atasnya. Kayu-kayu tersebut masih bertahan sejak pertama diletakkan di tempat

tersebut.

Gereja tua ini ditopang 10.000 kayu dolken bulat sebagai fondasi bangunannya. Pondasi itu membuat bangunan gereja tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Bahkan, gempa bumi besar yang diakibatkan oleh letusan gunung Krakatau pada 1883 disebut-sebut tak sedikit pun meretakkan Gereja Sion.



Salah satu yang menjadi ciri khas Gereja Sion adalah jendela lengkung antik setinggi tiga meter, dan pintu gerbang gereja dengan tiang antik bergaya Yunani. Bentuk bangunannya segi empat memiliki ruang tambahan yang juga berbentuk segi empat sebagai tempat dewan gereja berkumpul (konsistori).

Lantai gereja terbuat dari batu alam dengan ukuran 40 cm x 40 cm dengan ketebalan tak kurang dari 5 cm. Semua bagian lantai juga terlihat masih utuh. Di bagian dalam, beberapa kursi berukiran bagus dan bangku dari kayu hitam atau eboni masih juga dipakai.

Dari sekian keunikan di Gereja Sion, altar adalah salah satu yang terkesan paling unik. Terbuat dari kayu tua dengan beberapa ornamen di antaranya berupa beberapa anak bersayap. Altar ini memiliki tinggi tak kurang dari empat meter, sehingga untuk sampai di atas harus melewati tangga selebar tubuh orang dewasa.

"Semua yang ada di gereja ini sudah berusia sangat tua, sehingga perlakuan dan perawatannya mesti hati-hati. Beberapa kayu yang lapuk diperbaiki dengan cara menambal, menggunakan bahan bubuk koran dengan semen. Sementara lantai batu kita siram dengan air biasa, dan digosok memakai sikat halus agar keaslian teksturnya tidak mengalami kerusakan," kata Tasum, juru pelihara gereja, dari Balai Pelestarian Cagar Budaya.

Menurut Tasum, sebagai bangunan tua, Sion juga memiliki kisah-kisah mistis. Salah satunya adalah perempuan dan anak-anak yang mengenakan pakain putih dan sering menampakkan diri di beberapa sisi bangunan gereja.

"Mereka suka duduk dikursi-kursi yang ada di bagian belakang gereja, tetapi hanya mereka yang memiliki indra keenam yang bisa melihatnya," kata Tasum. □

MBO

H. Yanuar Prihatin, M.Si.

# Seorang Wakil Rakyat sekaligus *Motivator Uluung*



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**P**OLITISI dan motivator dua profesi yang menyatu dalam diri seorang Yanuar Prihatin, yang biasa disapa Kang Yanuar. Sebelum menapaki karier sebagai politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Kang Yanuar lebih dulu dikenal sebagai seorang motivator yang sudah banyak makan asam garam. Dalam kurun waktu 11 tahun, lelaki berkumis ini banyak sekali menggelar berbagai seminar motivasi, training, dan workshop kepada ribuan orang.

Setiap kali akan memulai pemberian motivasi, Yanuar berteriak lantang: "Siapa ingin sukses? Katakan SAYA!! "Sukses itu mudah. Karena sukses didapat dari impian bertemu dengan kekuatan diri," jelas Yanuar. Untuk kegiatan sebagai seorang motivator, Yanuar sudah tampil di sekitar 150 kabupaten dan kota di Indonesia, dan bertatap muka dengan ribuan orang peserta.

Yanuar mengaku, aktif menjadi motivator sejak tahun 2013 hingga sekarang. "Niat dan tujuan saya adalah menjadi manusia bermanfaat untuk orang lain, dengan berbagi ilmu dan pengalaman," katanya. Dan, mungkin sulit dibantah, kariernya sebagai seorang motivator sangat menunjang dan mendukung Yanuar dalam menggapai

kariernya di bidang politik.

Kang Yanuar mengungkapkan, semua wawasan dan pengetahuan yang dibaginya kepada orang lain itu merupakan hasil dari minat yang kuat pada dunia pendidikan, pengembangan SDM, pemberdayaan diri, public speaking, ilmu pikiran, kesuksesan hidup, kewirausahaan, dan spritual healing. Semua itu diperkuat dengan kebiasaan membaca, berorganisasi, dan syiar Islam melalui zikrullah.

Jadi, kata Yanuar, apa yang dia peroleh ini tidak datang secara tiba-tiba, tapi melalui proses belajar yang panjang dari para master trainer yang kompeten, juga ternama, yakni Ary Ginanjar Agustian (ESQ Center), Tung Desem Waringin (TDM), Merry Riani, Ongky Hojanto (Public Speaking Academy), Rezky Daniel (LKP Internasional Mind Technology).

"Dari para Master Trainer ini, saya belajar tentang *quantum excellence, trainerpreneur, public speaking, financial revolution, NLP (Neuro Linguistic Programming)* hingga ilmu hipnosis dan hipnoterapi," ungkapnya.

Tak disangka, semua ilmu dan niat mulianya tersebut menjadi materi tambahan yang sangat bermanfaat dalam menjalankan



pengabdianya sebagai seorang Wakil Rakyat di Senayan. “Tentu sangat bermanfaat, sebab tugas seorang Wakil Rakyat adalah berbicara, menyuarakan aspirasi rakyat, itu poin utamanya,” terangnya.

Di lingkungan PKB sendiri, Yanuar dikenal sebagai trainer dan motivator pemilu. Dia adalah penulis buku motivator pertama di Indonesia tentang spiritualitas pemenangan pemilu.

Kepiawaian dan kebersahajaan suami dari Elliana ini, baik di dunia motivasi maupun politik, tidak lepas dari pengaruh orang tuanya, terutama ayahnya KH. Ahmad Bagdja, Sekjen PBNU pada era Gus Dur yang menjabat Ketua PBNU periode 1994 -1999.

Yanuar Prihatin lahir dan tumbuh serta dibesarkan memang dari keluarga pendidik dan organisatoris ulung. Sinergitas didikan yang luar biasa diperoleh dari ayahnya yang kemudian membuat karakteristik dan jiwanya begitu kuat.

Yanuar lahir di Cirebon, Jawa Barat, 30 Desember 1970. Pendidikan dasar hingga menengah atas diselesaikan di tanah kelahirannya, Desa Sindanglout, Cirebon. Pendidikan tingkat sarjana (S1) dan S2 di tempuh di Jakarta.

“Masa kecil saya kebanyakan di desa kelahiran saya. Biasa saja seperti juga anak lainnya, tapi memang dari dulu menginginkan agar hidup saya memberikan manfaat buat orang banyak. Dan, itu terus terpatri hingga dewasa dan sampai saat ini,” katanya.

Untuk mewujudkan keinginannya itu, Yanuar terjun dalam kegiatan organisasi. Untuk pertama kalinya dia aktif di organisasi Nahdlatul Ulama (NU), dan tercatat sebagai anggota Departemen Pengurus Cabang (PC) IPNU Kabupaten Cirebon, periode 1988-1990. Selanjutnya, Kang Yanuar terpilih menjadi Wakil Sekretaris PC PMII DKI Jakarta periode 1992-1993.

Kariernya di lingkungan organisasi NU ini terus menanjak. Pada tahun 2004 hingga 2014, Kang Yanuar menjabat Wakil Sekretaris PP Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (PP Lakpesdam NU). Dia juga menjabat Bendahara PP Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (PP LWP NU) untuk periode 2009-2014.

Selain di NU, Kang Yanuar juga aktif di Majelis Zikir Yayasan Pendidikan, Olahraga. Dia tercatat sebagai Sekretaris PP Majelis Zikir Zulfuqar Indonesia (MZZI) 2006-sekarang. Lalu, Pendiri dan



Pembina Yayasan Cahaya Sekolah Kehidupan (CSK) 2015 hingga saat ini.

Di samping itu, Yanuar juga merupakan Pembina DPD PPSI (Persatuan Pencak Silat Indonesia) Kabupaten Kuningan 2021 sampai sekarang, dan juga Ketua Yayasan Arkasih 2010-sekarang. Serta termasuk pendiri PKBM CSK Kabupaten Kuningan 2020.

Banyak bidang lain yang juga digeluti oleh Kang Yanuar, termasuk bidang penelitian. Sebagai peneliti, dia mengawali kariernya sebagai Peneliti LPPM Universitas Jakarta, 1993-2001. Dia juga pernah menjadi Stringer Majalah Vista TV (1996-1997), Dosen FIA dan FISIP Universitas Jakarta (1997-2001). Dan, menjabat Direktur PT. Nirin Orbit Lintas (2002-2003).

### Terjun ke Politik

Dengan bermodalkan ketokohan dan ketenarannya, Yanuar pun mulai mengembangkan kariernya di bidang politik. Dengan latar belakang yang dimilikinya, Yanuar pun memilih bergabung ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Di organisasi politik ini berbagai jabatan dipegangnya. Sembari menjadi Anggota Departemen DPP PKB pada tahun 2002-2005, Yanuar juga menjabat Wakil Sekretaris DPC PKB Kota Bekasi, 2002-2007. Dan, pada masa bakti 2019-2024 dia menjabat Ketua Bidang Pengembangan SDM DPP PKB.

Pada Pemilu Legislatif (Pileg) tahun 2014, Yanuar tercatat sebagai caleg DPR RI mewakili PKB untuk dapil Jabar X, meliputi Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Pangandaran dan Kota Banjar di Jawa Barat. Ternyata dia berhasil memperoleh kepercayaan rakyat, menjadi anggota DPR RI dan sekaligus anggota MPR RI periode



FOTO-FOTO: STIMEWA

2014-2019. Dan, untuk Pileg 2019, dia kembali terpilih menjadi anggota DPR/MPR periode 2019-2024. Dan, Pileg 2024, dia menempati nomor urut 1 untuk Dapil Jawa Barat X.

Sebagai anggota Parlemen, Yanuar dikenal sosok yang sangat tegas, dan vokal. Pada tahun 2021, saat Pandemi Covid melanda dunia, termasuk Indonesia, Yanuar sebagai Anggota Komisi II DPR RI bicara keras. Dia menilai rencana Kesekjenan DPR RI akan menggunakan fasilitas hotel untuk isolasi mandiri bagi anggota DPR yang terpapar Covid sangat menyakiti hati rakyat Indonesia.

“Di tengah berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat, rencana semacam ini sungguh menyakiti hati rakyat,” katanya waktu itu. Menurut dia, kondisi saat itu sangat sulit, karena warga yang terpapar Covid harus antre untuk dapat pelayanan di rumah sakit, bahkan belum tentu dapat kamar jika ingin isolasi di RS.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

“Coba rasakan situasi darurat semacam ini bagi masyarakat bawah yang terpapar Covid pasti lebih sulit lagi. Obat-obatan gratis yang disiapkan pemerintah belum tentu menjangkau mereka sepenuhnya,” ujarnya. Yanuar menilai, agak memalukan apabila anggota DPR minta diberikan fasilitas khusus untuk isoman (isolasi mandiri) di saat suasana rakyat sedang kesusahan.

Sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yanuar Prihatin, juga memberi penilaian tentang masalah cuti pejabat saat kampanye di Pemilu 2024. Menurut Yanuar, kampanye pejabat negara harus diatur ulang dalam revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Menurutnya, sorotan MK agar perjalanan dinas pejabat negara diatur ulang supaya tidak berhimpitan dengan jadwal kampanye layak ditindaklanjuti.

“Saya kira sangat penting untuk mengatur ulang kampanye para pejabat negara setingkat Presiden/Wakil Presiden dan Menteri ini. Selama ini, sadar atau tidak sadar, mereka seringkali menyalahgunakan kewenangannya sebagai pejabat untuk kepentingan elektoral,” katanya.

Sebagai anggota MPR RI dan sekarang ditugaskan di Badan Pengkajian MPR RI, Kang Yanuar sangat aktif melaksanakan program MPR, yakni Sosialisasi Empat Pilar MPR RI ke beberapa daerah dengan sasaran beragam warga masyarakat sebagai peserta.



Ada yang menarik disampaikan oleh Kang Yanuar. Sesuatu yang dia yakini dan harus menjadi motivasi seluruh anak bangsa Indonesia untuk mewujudkannya, yakni dia bermimpi, suatu waktu Indonesia akan menjadi negara hebat, besar, dan sangat berpengaruh di dunia. Kuncinya, hal itu akan terjadi manakala kualitas manusia Indonesia mencapai derajat yang terbaik. □

DER

## Biodata

Nama Lengkap : **H. Yanuar Prihatin, M.Si.**  
 Agama : Islam  
 Tempat/Tanggal Lahir : Cirebon, 30 Desember 1970  
 Istri : Elliana

### Pendidikan

- SD Negeri Cipeujeuh 2, Cirebon (1977–1983)
- SMP Negeri 1 Sindanglout (1983–1986)
- SMA Negeri Sindanglout (1986–1989)
- S-1 Administrasi Niaga, Universitas Jakarta (1989–1996)
- S-2 Ilmu Politik, Universitas Indonesia (1999–2003)

### Organisasi

- Sekretaris PC PMII DKI Jari (1992–1993)
- Wakil Sekretaris PP Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (2004–2009)
- Bendahara PP LWP Nahdlatul Ulama (2009–2014)
- Wakil Sekretaris DPC PKB Kota Bekasi (2002–2007)
- Anggota Departemen DPP PKB (2002–2005)
- Ketua DPP PKB (2008–2019)[3]
- Bendahara PP Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (2015–2020)
- Ketua Bidang UMKM dan Ekonomi Kreatif DPP PKB (2019–2024)

### Karir

- Peneliti LPPM Universitas Jakarta (1993–2001)
- *Stringer* Majalah Vista TV (1996–1997)
- Dosen FIA dan FISIP Universitas Indonesia (1997–2001)
- Dosen Universitas Jakarta (1997–2001)
- Direktur PT Kosrindo (2001–2003)
- Direktur PT Nirin Orbit Lintas (2002–2003)
- Tenaga Ahli Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2005–2012)
- Anggota DPR-RI (2014–sekarang)
- Anggota Komisi II (2014–sekarang)

## Meneguhkan Spiritualitas Kebangsaan Pascakontestasi

### Pengantar

Pesta demokrasi sudah usai. Di balik setiap pencapaian dan kegagalan, setiap anak bangsa mesti mengedepankan spiritualitas kebangsaan. Mengedepankan spiritualitas kebangsaan berarti mengimplementasikan setiap utas nilai yang termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945. Implementasi nilai secara praktis yang dapat disimpulkan, yakni mengakui bahwa proses demokrasi berjalan baik dengan setiap celah kekurangan yang mesti dijelaskan dan diselesaikan sesuai aturan yang berlaku. Selain pengakuan, rekonsiliasi antarkontestan menjadi tindakan lanjutan, sebab sebagai warga negara semua mendapatkan ruang untuk keadilan. Pengakuan dan rekonsiliasi lumrah dalam dinamika politik karena pada akhirnya semangat yang patut ditanamkan adalah demi kemajuan bangsa dan negara.

Implementasi nilai dalam tataran ide mungkin menjadi refleksi dengan satu pertanyaan: sudahkah ideologi kehidupan berbangsa mendasari dinamika berdemokrasi melalui kontestasi politik? Sepintas, pertanyaan demikian dapat dijawab dengan mudah. Tetapi, dibutuhkan tindakan mengambil jarak dengan menempatkan posisi sebagai warga negara untuk merefleksikan pertanyaan dimaksud. Tulisan singkat ini akan memberi simpul perjalanan berpikir mulai dari arti menjadi warga negara, Pancasila sebagai eksistensi manusia Indonesia, dan pentingnya meneguhkan spiritualitas kebangsaan pascakontestasi.

### Menjadi Warga Negara Indonesia

Warga negara berasal dari kata bahasa Latin *civis-civitas* yang berarti keadaan menjadi penduduk tetap suatu kota; kata bahasa Inggris abad pertengahan *citizein-citizen* artinya penduduk kota. Warga negara berarti seseorang yang secara hukum menjadi bagian dari suatu negara serta memiliki hak dan perlindungan dari negara tersebut. Setiap negara unik karena memiliki sejarah, realitas sosial-budaya, suku, adat-istiadat, bahasa, sistem kepercayaan, ideologi, bentuk pemerintahan, sumber hukum, sumber daya alam, dan atribusi lain yang meneguhkan status negara merdeka dan berdaulat.

Indonesia, nama yang baru populer di akhir abad XIX dan awal abad XX karena sebelumnya negara kita terikat dengan keterhubungan antarkerajaan dalam satu simpul wilayah Nusantara. Apabila nama Indonesia terbentuk dari analisa atas

wilayah geografis, Nusantara meskipun merujuk pada keberadaan wilayah antara pulau-pulau, lebih merepresentasikan tanah air dengan aspek sosial budaya, sejarah dan ekonomi karena terkait dengan jalur perdagangan rempah-rempah. Memahami status sebagai warga negara tidak cukup dengan memenuhi persyaratan sebagai warga negara, tetapi lebih dari itu diperlukan klasifikasi atas diskursus “menjadi warga negara Indonesia”. Sebagaimana ditekankan Foucault dalam *The Order of Things* (1971) bahwa pada budaya tertentu dan pada waktu tertentu, selalu hanya ada satu ‘episteme’ yang mendefinisikan kondisi kemungkinan semua pengetahuan, baik yang diekspresikan dalam teori maupun yang tersembunyi secara diam-diam melalui tindakan praktis. Dengan demikian, pemahaman dan pengetahuan sebagai warga negara Indonesia patut sejalan dengan sejarah diri dan perkembangan negara, memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta menempatkan diri sebagai agen nilai dan ideologi kebangsaan sebagaimana tercantum dalam Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika.

Menjadi warga negara Indonesia mengandaikan bahwa setiap individu dan komunitas mengerti tentang ideologi kebangsaan, sumber segala norma kehidupan 2 | berbangsa dan cara hidup sebagai warga negara, khususnya terkait dengan realisasi hak sosial politik. Pengertian tentang akar kehidupan tersebut menjadi penunjang berdemokrasi apalagi saat ini tiga generasi menjalani kehidupan bersama dengan pengalaman berbeda sejak transisi orde lama, masa orde baru, dan periode reformasi. Sebab lain, inovasi teknologi digital memberi dampak signifikan dalam cara pandang generasi muda terhadap eksistensi negara Indonesia yang lekat dengan semboyan ‘satu dalam keberagaman’. Ragam bentuk pengetahuan dalam kapasitas kewarganegaraan saat ini kemudian dapat diperkuat dengan pertimbangan bahwa generasi nanti akan menemukan berbagai inovasi dan pemahaman terkait status warga negara. Bagaimanapun juga setiap kerutan kehidupan anak bangsa akan selalu tergantikan dengan jiwa-jiwa muda. Arti menjadi warga negara pada akhirnya melampaui status menjadi bagian utuh dari Indonesia, memahami ideologi maupun semboyan bernegara dan keharusan mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan.

Menjadi warga negara Indonesia berarti mendaku sebagai individu dan komunitas partisipatoris, elemen dinamis yang mengutamakan keaktifan, saling memandang sebagai subyek dengan pelibatan

mental dan emosi agar memberi kebaruan dalam dinamika negara. Keaktifan demikian sejalan dengan pemikiran Driyarkara yang menekankan bahwa manusia itu menegara tidak sekadar bernegara (baca: memiliki negara). Menegara merupakan tindakan aktif dengan metafora pikiran menjadi kata-kata yang tertulis dan terungkap agar terbaca dan terdengar. Menegara dapat direfleksikan sebagai representasi aksi bersama yang mengandalkan kesatuan pikiran, emosi dan tindakan berbasis persatuan, musyawarah dengan fondasi cinta tanah air. Dalam dinamika demikian negara merupakan bentuk kehidupan yang mengedepankan keberadaan dan kesadaran manusia.

Menjadi warga negara yakni mampu menempatkan diri sebagai subyek dalam kultur menegara, berpartisipasi aktif dalam dinamika bersama untuk mencapai cita-cita yang digariskan konstitusi. Oleh karena itu, pemahaman dan pengetahuan tentang Pancasila sebagai filsafat bangsa patut disegarkan kembali untuk menunjang dinamika mengada dan seutuhnya menjadi warga negara Indonesia.

### **Pancasila sebagai Eksistensi Manusia Indonesia**

Indonesia berdiri di atas pilar Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Keempat pilar atau konsensus kebangsaan tersebut memuat nilai yang diakui menjadi pedoman dalam dinamika kehidupan bangsa. Dari keempat pilar tersebut, tulisan ini hendak menyelami Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Indonesia. Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Indonesia berdasar atas prinsip konstitusionalisme. Dalam prinsip demikian, perwujudan demokrasi Indonesia berpijak pada tiga kesepakatan, yakni kesepakatan terkait tujuan dan cita-cita bersama (the general goal of society or general acceptance of the same philosophy of government); kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan pemerintahan negara (the basis of government), serta kesepakatan soal bentuk insitusi-institusi dan prosedur ketatanegaraan, the form of institutions and procedures (Andrews, 1968). Salah satu hubungan yang diatur konsensus atau kesepakatan tersebut, yakni hubungan antar pemerintah dan warga negara.

Pemerintah dan warga negara berkorelasi dalam dinamika demokrasi terkait dengan distribusi kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Artinya, pemerintah adalah warga negara yang dipercayakan untuk menjalankan pemerintahan demi kesejahteraan

bersama. Warga negara adalah seluruh entitas individu dan komunitas yang berada dalam suatu sistem pemerintahan. Ketidakterpisahan ini menghadirkan celah untuk kembali menekankan status Pancasila sebagai eksistensi manusia Indonesia. 3 | Dalam status tersebut, setiap warga negara perlu menyadari bahwa Pancasila dirumuskan dari realitas kehidupan bangsa, sebuah rumusan realitas manusia Indonesia. Maka, Pancasila bukan sekadar dasar negara tetapi lebih dari itu menjadi spiritualitas kehidupan menegara. Pancasila merupakan software yang mengaktivasi tindakan partisipatoris individu dan komunitas dalam kehidupan berbangsa, termasuk elemen pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Keseluruhan sila Pancasila menunjang keberadaan manusia Indonesia, khususnya dalam dinamika demokrasi. Sehingga, kontestasi politik tidak terbatas pada euforia menang atau kalah, terpilih atau tidak, tetapi lebih dari itu, menjadi perwujudan realisasi hak dan kewajiban politik yang mengedepankan kehendak membangun bangsa menuju kebaikan bersama.

Salah satu otokritik dalam kontestasi pemilihan umum 2024, kita terjebak dalam resiprositas semu, berkorban untuk mendapatkan sesuatu, *tit for tat*. Kita berdemokrasi dengan meninggalkan jejak akan spekulasi moral dan tindakan praktis terkait keterbalasan pada suatu waktu. Kultur demikian menguat berwujud politik pragmatis yang bertujuan menguatkan posisi ketimbang menentukan arah atau bahkan parameter baru dalam model politik kontemporer yang “hampir” kehilangan nilai manusia. Dalam realitas demikian, Pancasila seolah terdegradasi sebatas “dasar bernegara” tanpa implikasi praktis yang menjiwai partisipasi warga negara untuk berdemokrasi. Padahal, simpul ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan menjadi siklus nilai yang mesti direalisasikan sebagai dasar berpikir dan bertindak. Mestinya, pendidikan politik diperkuat untuk memberikan paradigma berpikir menuju kualitas demokrasi yang diharapkan.

Oleh karena Pancasila dirumuskan dari realitas manusia Indonesia yang terdiri atas keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan golongan, Pancasila patut diimplementasikan secara mengakar dalam kehidupan bangsa. Hal ini karena Pancasila adalah bagian dari keberadaan manusia, ideologi yang menyatukan sekaligus mempertahankan keberagaman dan perangkat yang mendasari tindakan sebagai manusia Indonesia.

Oleh:  
**Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M**  
Wakil Ketua MPR RI



Dengan demikian, oleh karena Pancasila adalah penopang eksistensi manusia Indonesia, Pancasila semestinya menyadarkan setiap elemen untuk menyematkan komitmen kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan dimulai dari kemauan mengubah tatatan dari saling memberi keuntungan menuju kehendak menderita bersama dalam berdemokrasi. Pancasila mengingatkan kepada setiap anak bangsa bahwa peradaban kontemporer mengesampingkan etika sehingga manusia Indonesia patut menghadirkan nilai kemanusiaan dalam setiap ruang perjumpaan.

### **Penutup: Peneguhan Spiritualitas Kebangsaan**

Ketika mengelaborasi pemikirannya tentang karakter dalam *The Revival of Religious Sciences*, filsuf Al Ghazali menekankan tentang pentingnya intelektualitas dan kesadaran moral. Menurutnya, karakter atau personalitas itu inheren dengan kehidupan manusia sehingga melalui disiplin dan latihan berkelanjutan manusia mampu mencapai keseimbangan jiwa. Manusia memiliki kemampuan alamiah untuk mengembangkan rasionalitas dan melalui rasio manusia mampu mencapai karakter kebajikan. Pendidikan, sastra, agama dan politik merupakan bidang kehidupan manusia yang mampu mengembangkan kemampuan tersebut.

Para pendiri bangsa Indonesia telah meletakkan berbagai sumber pembelajaran tentang spiritualitas kebangsaan. Mulai dari pergerakan pendidikan untuk mencerdaskan bangsa, gerakan emansipasi perempuan, sumpah pemuda yang mengedepankan satu bangsa, bahasa dan tanah air Indonesia sampai periode kemerdekaan dengan penetapan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Keseluruhan garis waktu sejarah 4 | menunjukkan bahwa karakter kebangsaan mesti ditumbuhkan melalui persatuan dan kesatuan, upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan realisasi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karakter kebangsaan tersebut menembus sekat mekanisme distribusi kekuasaan. Maka, sesudah pesta demokrasi kita patut meneguhkan kembali spiritualitas kebangsaan.

Spiritualitas kebangsaan tercermin dari Pancasila, fondasi karakter manusia Indonesia. Sebagai rumusan ideologi, Pancasila memuat aspek pengetahuan tentang dasar keberadaan manusia serta relasi manusia dengan Yang Ilahi dan sesama. Selanjutnya, Pancasila memberi pendasaran moral tentang korelasi manusia

yang mengutamakan persatuan dan dialog. Persatuan memungkinkan dialog dan dialog hanya dapat ditempuh karena adanya persatuan. Pengetahuan dan moral dari Pancasila menghantarkan pada tindakan mencapai cita-cita keadilan. Peneguhan karakter dan spiritualitas atau cara hidup manusia Indonesia mesti ditempuh dalam berbagai bidang kehidupan, khususnya politik. Tanpa kehendak politik yang autentik, spiritualitas kebangsaan sebatas slogan yang digaungkan terus menerus. Kehendak politik mesti diperkuat agar setiap pemimpin mampu menjadi teladan dalam meneguhkan spiritualitas kebangsaan Indonesia.

Kontestasi sudah selesai. Kita membutuhkan kesadaran kognitif-dualistik (*consciousness*) penguat kesadaran spontan-responsif (*awareness*) untuk memahami bahwa Pancasila merupakan spiritualitas kehidupan berbangsa, penanda keberadaan kita sebagai manusia Indonesia, simbol keindonesiaan yang mesti diwariskan lintas generasi. Dalam konteks ini kita dapat menyatakan bahwa ideologi kehidupan berbangsa sungguh mendasari dinamika berdemokrasi melalui kontestasi politik dengan berbagai pekerjaan rumah yang mesti dibenahi.

Pada prinsipnya, kontestasi politik tidak lebih besar dari anugerah kehidupan yang kita terima sebagai warga negara Indonesia. Saatnya kita teguhkan dan implementasikan spiritualitas berbangsa melalui pikiran, rasa, dan kerja bersama untuk kemajuan Indonesia. Karena setiap kerja, kehendak, tindakan dan tujuan politik mestinya berdampak pada masyarakat sekaligus menjadi cerminan hubungan dengan Yang Tak Terdefinisi dalam satu frasa yakni *lillahi ta'ala*. Atau, *ad maiorem dei gloriam*. □

**Bahan Bacaan:** William G. Andrews, 1968, *Constitution and Constitutionalism, 3rd Edition*, Van Nostrand Company, New Jersey Michel Foucault, 1971, *The Order of Things, An Archaeology of the Human Sciences*, Vintage Books, New York al-Ghazâlî, 2001, *Faith in Divine Unity and Trust in Divine Providence [Book 35 of The Revival of Religious Sciences]*, D. Burrell (trans.), Louisville (Kenn.): *Fons Vitae*. Driyarkara, N. (Nicolaus), 1913-1967. (2006). *Karya Lengkap Driyarkara: esai-esai filsafat pemikir yang terlibat penuh dalam perjuangan bangsanya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Penyunting – Sudiarja, S.J., et. al

## Pancasila di Mata Generasi Milenial

Generasi muda atau milenial mengungkap tentang Pancasila. Mereka menyadari nilai-nilai yang ada, atau nilai-nilai yang sudah hidup sejak Pancasila itu belum dirumuskan itu penting. Di lapangan mereka menyadari ada berbagai sikap yang menjadi kendala saat mengimplementasikan Pancasila, salah satunya sikap paling nasionalis. Buku terbitan Badan Pengkajian MPR ini mengungkap berbagai pandangan dan masalah Pancasila dari kalangan kaum milenial.

**G**ENERASI muda atau yang saat ini tren dengan sebutan generasi milenial merupakan generasi masa depan di mana pada mereka-lah nasib bangsa kelak akan ditentukan. Bagi orangtua dan pemerintah, sebagai generasi pelanjut kehidupan berbangsa dan bernegara, mereka adalah aset. Untuk itu, berbagai macam upaya dilakukan agar mereka selain selamat dari berbagai ancaman kehidupan yang tidak selaras dengan nilai-nilai luhur, juga mereka tetap memegang nilai-nilai jati diri bangsa.

Salah satu upaya untuk membangun generasi muda yang tangguh, siap menghadapi tantangan zaman tanpa melupakan jati diri bangsanya adalah menanamkan nilai-nilai Pancasila pada mereka. Menanamkan nilai-nilai Pancasila pada generasi milenial perlu dilakukan dengan kiat yang tak sama dengan elemen masyarakat lainnya, sebab generasi ini memiliki pola pikir dan tingkah laku yang energik dan *out of the box*.

Bagaimana kiat menanamkan dasar negara kepada generasi muda? Kita akan paham bila membaca buku yang berjudul: *Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Di Kalangan Anak Muda Milenial Indonesia*. Buku ini merupakan hasil kerja sama antara Badan Pengkajian MPR dan *Center for the Study of Religion and Culture (CSRC)* Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Buku setebal vi + 166 halaman itu terbagi dalam enam bab.

Direktur CSRC, Idris Hemay, dalam *Pengantar* (halaman i) menuturkan: Laporan (buku) di hadapan pembaca ini merupakan hasil kajian akademik tentang revitalisasi nilai-nilai Pancasila di kalangan anak muda milenial Indonesia. Kajian akademik ini dilaksanakan oleh CSRC atas dukungan Badan Pengkajian MPR.

Kajian dilakukan dalam rangka untuk menggali pandangan anak muda milenial tentang revitalisasi nilai-nilai Pancasila. Secara khusus tujuan penyelenggaraan kajian akademik ini adalah: *pertama*, untuk mendalami pandangan kalangan anak muda milenial mengenai Pancasila dan strategi revitalisasi nilai-nilainya di kalangan generasi milenial. *Kedua*, untuk mendalami berbagai bentuk praksis yang bertujuan untuk mendukung revitalisasi nilai-nilai Pancasila di kalangan anak muda milenial. *Ketiga*, untuk mendapatkan bahan

pengembangan rekomendasi kebijakan yang berbasis riset yang bertujuan untuk revitalisasi nilai-nilai Pancasila di kalangan anak muda milenial.

Soal pemahamkan Pancasila di kalangan anak muda, kita mengetahuinya di *Bab III*. Di bab ini dijelaskan tentang persepsi Pancasila dari mereka. Di halaman 44 diungkap, secara umum anak muda milenial memiliki kesepakatan umum bahwa Pancasila sebagai kesepakatan brilian para *founding fathers*, adalah dasar dan ideologi negara. Bagi mereka dengan fungsi strategis tersebut, Pancasila dapat menjadi alat pemersatu yang kuat dan kokoh.

Salah seorang mahasiswa dari Pulau Nias mengatakan, Pancasila merupakan pondasi bangsa. Ibarat rumah, Pancasila merupakan pondasi penopang strukturnya. Jika pondasi rubuh, maka struktur rumah akan rubuh. Jika generasi milenial tidak sadar akan fungsi Pancasila, sebagai pondasi berbangsa dan bernegara, maka bangunan ini dapat runtuh.

Lalu bagaimana nilai-nilai Pancasila selama ini? Seorang mahasiswa UIN dari Majalengka, Jawa Barat, di halaman 48 mengungkapkan, dirinya menyadari bahwa cara hidup masyarakat Indonesia sudah menjalankan Pancasila, bahkan sebelum Pancasila dirumuskan. Salah satu contohnya, sejak dulu masyarakat di desanya sudah terbiasa hidup berdampingan dengan beda suku atau agama. Dengan kata lain, selama ini apa yang termuat dalam Pancasila sudah menjadi gaya hidup

masyarakat, sehingga bukanlah sesuatu yang baru lagi.

Meski generasi milenial paham dan mengerti fungsi Pancasila, namun di buku ini juga diungkap beberapa faiktor terkait kendala penerapan Pancasila. Salah satu faktor adalah adanya sikap *hipernasionalisme*. Di halaman 84 dijelaskan dengan cara pandang dan ekspresi kekuatan otoritas atau kelompok tertentu mengenai nasionalisme secara berlebihan. Nasionalisme model ini mengedepankan simbol, lambang, upacara, dan bersifat agresif. Nasionalisme yang didengungkan dengan klaim dan propaganda paling nasionalis, paling pribumi, paling berhak atas tanah air, sehingga cenderung memusuhi kelompok lain. □

AWG



# Bamsoet Sambut Baik Bedah Buku Kapal Selam “Diplomasi Sang Hiu Kencana”

**K**ETUA MPR RI sekaligus Warga Kehormatan Korps Marinir dan Warga Kehormatan Satuan Kapal Selam dari TNI-Angkatan Laut Bambang Soesatyo kembali menegaskan, mendukung peningkatan Alutsista dan kesejahteraan prajurit TNI AL. Termasuk melalui diplomasi maritim dan peran polisional, khususnya melalui pemanfaatan kapal selam.

“Mengingat posisi Indonesia yang sangat strategis. Misalnya, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau, dan memiliki garis pantai 99.083 km, atau terpanjang ke-2 di dunia setelah Kanada. Indonesia juga memiliki luas laut terbesar ke-6 di dunia setelah Perancis, Amerika Serikat, Australia, Rusia, Inggris,” jelas Bamsoet saat memberikan sambutan virtual dalam acara bedah buku “Diplomasi Sang Hiu Kencana” oleh KASAL

“Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi maritim yang sangat besar. Namun, potensi tersebut juga diiringi dengan berbagai tantangan, seperti perompakan, penyelundupan dan terorisme maritim. Karena itu, penting bagi kita untuk memiliki sistem ketahanan dan keamanan maritim yang kuat untuk menjaga teritorial dan kedaulatan NKRI,” ujar Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan, kapal selam memiliki efek deterren (pencegahan) yang tinggi dalam menjaga keamanan laut di Indonesia. Kemampuannya untuk bergerak secara diam-diam dan menyerang dari bawah laut menjadikan kapal selam sebagai alat pertahanan yang sangat efektif.

“Kapal selam merupakan salah satu arsenal penting TNI, khususnya TNI AL, dalam menjaga keamanan laut di Indonesia. Peran kapal selam,



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

TNI Dr. Muhammad Ali di Hanggar Kapal Selam Komando Armada (Koarmada) II di Surabaya, Sabtu (20/04/2024).

Acara peluncuran buku ini dipimpin oleh KASAL TNI Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, S.E., M.M., M.Tr.Opsla. dan dihadiri oleh Laksamana TNI (Pur) Suparno (Sesepuh Kapal Selam), Dankodiklat, Pangkoarmada II, Koarmada RI, Staf Khusus Panglima TNI Mayjen TNI (Mar) Dr(Can) Oni Junianto, S.A.P., M.M., Kababinkum TNI Laksda TNI Kresno Buntoro SH., LL.M., Ph.D., Pangkotama wilayah Surabaya, Pejabat Utama Mabesal, Pejabat Akademisi terkemuka seperti Rektor Universitas Trisakti, Rektor Universitas Brawijaya, Rektor Unair, Rektor ITS, Rektor Unesa, Rektor Universitas Hang Tuah Surabaya, serta para mahasiswa dari berbagai Universitas.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM dan Keamanan, ini mendorong penguatan sistem ketahanan dan keamanan maritim Indonesia melalui diplomasi maritim dan penguatan Alutsista TNI AL. Dengan prinsip Trinitas TNI AL untuk melakukan peran militer, peran diplomasi dan peran polisional, khususnya melalui pemanfaatan kapal selam, diharapkan dapat mewujudkan laut Indonesia yang aman, damai, dan sejahtera.

baik konvensional maupun nirawak, terbukti mampu menjaga stabilitas keamanan maritim nusantara. Kemampuannya yang unik dan canggih menjadikan kapal selam sebagai alat pertahanan yang sangat efektif,” kata Bamsoet.

Penerima penghargaan Brevet Baret Ungu Korps Marinir Warga Kehormatan TNI AL, Brevet Wing Penerbang Kelas 1 Pesawat Tempur Warga Kehormatan TNI-AU, serta Brevet Hiu Kencana Satuan Kapal Selam Warga Kehormatan TNI AL ini mengingatkan agar TNI terus meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit TNI AL dalam menjaga kedaulatan dan wilayah maritim NKRI. Tidak kalah pentingnya, menjalankan fungsi diplomasi kemaritiman sebagai cerminan wajah Indonesia di mata dunia.

“Patut diapresiasi keberhasilan TNI AL menyelenggarakan Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2023 pada 4-8 Juni 2023 di Makassar. Latihan gabungan non tempur di Selat Makassar yang diikuti oleh Angkatan Laut dari 36 negara di dunia ini telah memberikan dampak positif terhadap diplomasi maritim Indonesia. Di antaranya, mampu membangun trust building, memperkuat citra positif dan menjadikan Indonesia sebagai pemain kunci dalam kerjasama maritim global,” pungkas Bamsoet. □

## Bicara Buku 'Building A Legacy'

# Warisan Pengetahuan dan Pengalaman Fadel Muhammad untuk Generasi Milenials

INDONESIA banyak memiliki tokoh sukses yang sangat dikagumi masyarakat. Kesuksesan mereka mampu membuat semua orang berdecak kagum. Sudah barang tentu, perjalanan hidup mereka untuk sampai pada puncak kesuksesan tidaklah mudah. Perjuangan para tokoh untuk mencapai kesuksesan itu adalah sesuatu yang menarik dan bisa dijadikan pelajaran berharga. Salah satu tokoh nasional tersebut adalah Wakil Ketua MPR RI Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad.

Dalam kegiatan acara Bicara Buku Bersama Wakil Rakyat, Pimpinan MPR dari Kelompok DPD RI Fadel Muhammad tampil sebagai narasumber

Buku tersebut berisi kumpulan pilihan berbagai buah pikir yang keluar dari pengalaman hidup, wawasan akademis, dan pengalaman berorganisasi mulai dari organisasi mahasiswa sampai partai politik besar, menjadi entrepreneur, lalu terjun ke birokrasi sebagai kepala daerah atau gubernur, serta menjadi seorang Menteri negara dan berkecukupan di politik sebagai wakil rakyat.

"Mengapa saya menulis ini, karena Alhamdulillah dalam perjalanan hidup dan karir saya, terutama menjadi seorang Gubernur, saya jalankan maksimal serta memberikan manfaat yang baik untuk rakyat. Jadi, saya berpikir semua ini mesti diketahui dan kalau bisa dijadikan

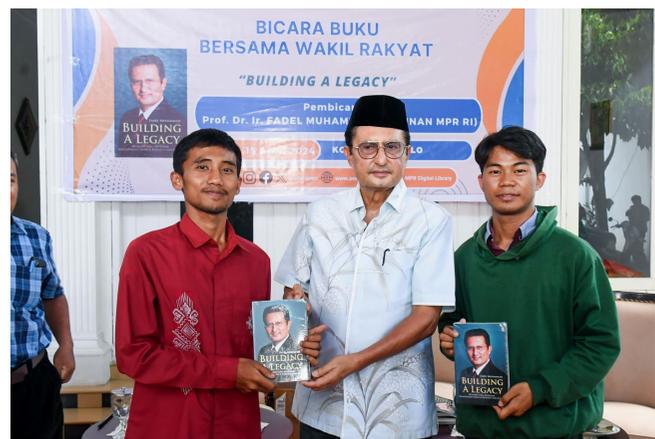


FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

bersama dua narasumber lainnya, yakni: Penggiat literasi Hardi Nurdin dan Guru Besar Universitas Negeri Gorontalo (UNG) Prof. Dr. Lukman Laliyo. Dan, acara ini membedah buku karya Fadel Muhammad berjudul: 'Building A Legacy: Menimba Ilmu, Mengajar, Mengembangkan Bisnis dan Berbakti Pada Bangsa.'

Kegiatan diskusi dengan topik Bicara Buku ini digelar di Rumah Aspirasi Fadel Muhammad di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Senin (15/4/2024). Acara ini digelar atas inisiasi Senat Mahasiswa Fakultas MIPA UNG bekerjasama dengan MPR RI. Peserta yang menghadiri acara ini juga mayoritas mahasiswa UNG lintas fakultas dan masyarakat umum.

Dalam sambutannya, mantan Gubernur Provinsi Gorontalo dua periode ini mengungkapkan bahwa buku ini ditulis olehnya selama hampir satu tahun, menjelang beranjak usia 70 tahun, dan terbit di bulan Mei dua tahun lalu.

pelajaran berharga untuk generasi penerus," ungkap Fadel Muhammad.

Jadi, kata Fadel, buku ini memang cocok untuk dia wariskan kepada para generasi muda milenials, calon pemimpin daerah dan bangsa, masa depan. "Saya berharap buku ini menambah wawasan kalian," ujarnya kepada mahasiswa peserta.

Sementara dua narasumber lainnya sepakat bahwa buku karya Fadel Muhammad 'Building A Legacy' berisi lautan pengetahuan yang sangat bermanfaat untuk generasi muda. "Yang saya kagumi dari beliau adalah biasanya seorang tokoh akan meredup seiring bertambahnya usia. Tapi, Fadel Muhammad seperti kelapa makin berusia makin banyak santannya, makin berkualitas, dan karirnya tetap stabil," papar Prof. Dr. Lukman Laliyo, secara menegaskan bahwa buku ini membedah secara total keunikan seorang Fadel Muhammad. □

